

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

by Tinuk Cahyani

Submission date: 15-May-2020 02:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1324833232

File name: 72._Hukum_Waris_dalam_Islam_FIX.pdf (2.05M)

Word count: 45708

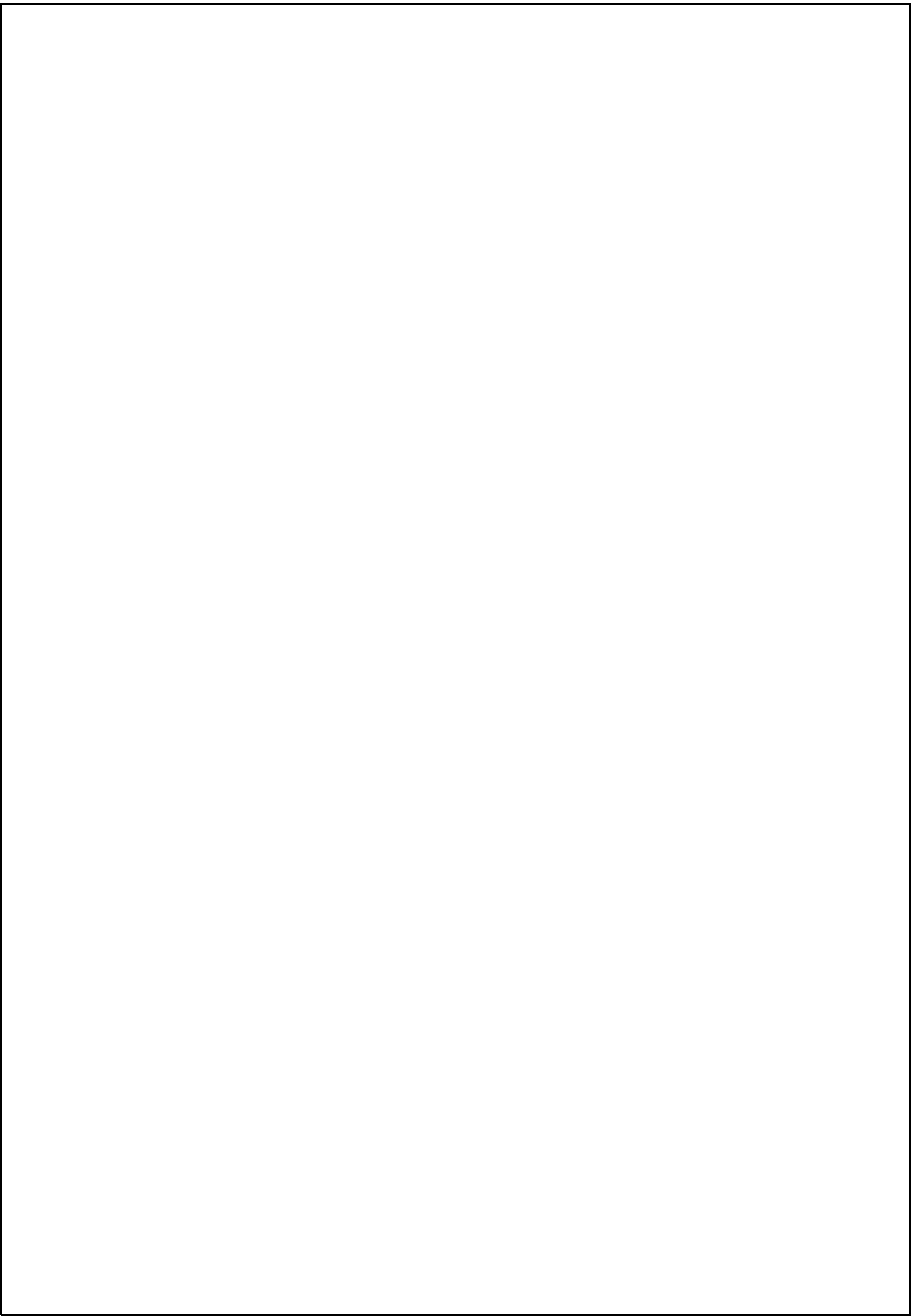
Character count: 260255

HUKUM WARIS dalam **ISLAM**

Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya



TINUK DWI CAHYANI



Tinuk Dwi Cahyani

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya

Hak Cipta © Tinuk Dwi Cahyani, 2018

Hak Terbit pada UMM Press

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon: 0877 0166 6388, (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: ummpress@gmail.com

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Cetakan Pertama, September 2018

ISBN : 978-979-796-327-9

x; 180 hlm.; 16 x 23 cm

Setting & Layout : Septian R

Design Cover : Andi Firmansah

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Saudari Tinuk Dwi Cahyani datang kepada saya. Saudari Tinuk Dwi Cahyani minta agar saya memberikan sambutan atas buku berjudul "Hukum Waris dalam Islam" yang ditulisnya. Dengan senang hati saya bersedia memenuhi permintaan tersebut.

Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Saudari Tinuk Dwi Cahyani atas buku "Hukum Waris dalam Islam" yang telah selesai ditulis dan siap untuk terbit. Dalam amatan saya, akhir-akhir ini *trend* menulis di kalangan para dosen menyusut. Sebabnya mungkin karena tugas-tugas mengajar dan segala hal di sekitar mengajar amat membebani para dosen.

Hukum waris Islam s⁵gat berbeda dengan berbagai sistem hukum waris lainnya, misalnya hukum waris berdasarkan hukum adat dan hukum waris berdasarkan *Burgelijk Wetboek* (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Menurut hukum waris Islam ada tiga golongan ahli waris, yaitu (1) ahli waris *dzawil faraid* atau *dzul faraid*, (2) ahli waris *asabah*, dan (3) ahli waris *dzawil arham*. Penggolongan ahli waris seperti hukum waris Islam tersebut tidak dijumpai di dalam sistem hukum waris lainnya. *Burgelijk Wetboek* mengenal pembagian ahli waris, tetapi konsekuensinya berbeda dengan pembagian ahli waris menurut hukum Islam.

Konsep ahli waris *dzawil faraid* tidak dikenal dalam sistem hukum waris apa pun. Ahli waris *dzawil faraid* adalah ahli waris yang bagiannya



atas harta warisan telah ditentukan, baik oleh Alquran, Sunnah, maupun Ijtihad.

Hal-hal yang saya sampaikan tersebut dibahas secara jelas oleh Saudari Tinuk Dwi Cahyani di dalam bukunya tersebut. Mudah-mudahan buku tersebut diikuti oleh buku-buku yang lain, baik oleh saudara Tinuk Dwi Cahyani, maupun penulis-penulis lainnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Malang, 27 Agustus 2018

Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., M.H
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahillah naskah buku ini terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan hadir. Penulis benar-benar merasa tertantang untuk mewujudkan naskah buku ini sebagai bagian untuk mempertahankan slogan pribadi *banyak memberi banyak menerima*, sehingga kami bisa merampungkan buku berjudul "Hukum Waris Dalam Islam". Bagi kami, buku ini merupakan karya yang diharapkan dapat menjadi motivasi moral dan akademis, yang di kemudian hari dapat berkarya lebih baik lagi. Di samping itu, barangkali memang bukan satu-satunya yang membahas soal kewarisan islam dala, hubungannya dengan hukum positif Indonesia, tetapi setidaknya buku ini merupakan opsi, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baik bagi kalangan akademisi maupun pembaru hukum nasional (bidang kewarisan islam).

Buku ini juga dapat gunakan sebagai pegangan atau paduan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi di bidang hukum kewarisan atau mahasiswa Fakultas Hukum progam strata satu (S1) dan strata dua (S2) di lingkungan perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta, atau Fakultas Agama Islam atau jurusan Akhwal Syakhshiyah. Selain itu, juga dapat dijadikan pegangan bagi kalangan praktisi maupun tenaga pengajar di bidang hukum keislaman. Dengan terbitnya buku ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk semua bantuan, motivasi, dan sarannya. Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan



kesalahan, penulis menyadari juga bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan sebagai kekurangannya. Karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus-tulusnya. Kritik merupakan perhatian agar dapat menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa manfaat kepada pembaca. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ini dapat menginspirasi generasi bangsa ini agar menjadi generasi yang tanggap dan tangguh. Jadilah generasi yang bermartabat, kreatif, dan mandiri.

Malang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	9
A. Definisi Waris	9
B. Definisi Hukum Waris Islam	10
C. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam	30
Bab 3 Ketentuan Ahli Waris	37
A. Sebab-sebab Adanya Hak Waris	37
B. Rukun Waris	42
C. Syarat Waris	45
D. Hijab Waris	48
Bab 4 Klasifikasi Ahli Waris	59
A. Ahli Waris Dzawil Furudh	59
B. Ashabah	66



HUKUM WARIS DALAM ISLAM

Bab 5 Pihak yang Masih Berhak atas Waris	77
A. Pengertian Ahli Waris Dzawil Arham	77
B. Cara Pembagian Waris Dzawil Arham	82
C. Pihak di Luar Ahli Waris Dzawil Arham	86
 Bab 6 Ketentuan Khusus	 87
A. Pengertian Aul	87
B. Radd	90
 Bab 7 Wasiat	 95
A. Pengertian Wasiat	95
B. Adab Berwasiat	111
C. Batalnya Wasiat	111
D. Wasiat Wajibah	115
E. Pencabutan Wasiat	119
 Bab 8 Contoh-contoh Kasus dan Penyelesaiannya	 121
 Daftar Pustaka	 169
Indeks	173
Biografi Penulis	175

BAB 1

PENDAHULUAN

²
Di Indonesia berlaku 3 hukum waris yakni: hukum waris adat, hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam. Meskipun masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan menundukkan diri kepada hukum waris apa yang diinginkan, namun bagi orang Islam intinya dengan memilih hukum waris Islam bila terjadi sengketa penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama, jika ingin menyelesaikan perkara menggunakan hukum waris adat atau perdata/BW maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri setempat, jika ingin melalui jalur litigasi/Pengadilan. Jika ingin menyelesaikan dengan menggunakan jalur nonlitigasi/di luar pengadilan maka jalur yang ditempuh adalah mediasi atau negosiasi. Dalam pembahasan buku kali ini penulis memfokuskan untuk membahas mengenai hukum waris Islam.

Masyarakat yang memiliki masalah hukum waris bisa mengutamakan jalur nonlitigasi (mediasi atau negosiasi) sebelum gegabah mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini disebabkan hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan dari bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia. Hal ini disebabkan karena ada kehidupan pasti ada kematian. Pembahasan waris bisa muncul dan ada karena adanya kematian, kalau tidak ada kematian maka hukum waris tidak pernah ada. Jadi yang menjadi titik penting bagi hukum waris adalah adanya kematian. Akibat dari kematian tersebut timbullah hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia maupun penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari kematian seseorang.

Untuk itulah ilmu hukum waris sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat karena dalam kehidupan manusia selama di dunia mereka mencari nafkah yang berupa harta dan memiliki hubungan dengan sesama manusia baik diakibatkan karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum waris yang riil dihadapinya dan butuh solusi dalam menyelesaikan masalahnya karena berkaitan dengan harta serta hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Buku ini khusus membahas hukum waris Islam, yang berbeda dari hukum waris perdata/BW atau hukum waris adat dan yang membedakan adalah landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hukum waris Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist. Penulis fokus untuk membahas Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, yang artinya akan kita bahas sebagai berikut.

QS. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹ Dan jika

1 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat An-Nisa': 34)

anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapak (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga, jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana²." (QS. An-Nisa' Ayat 11)

Sebelum penulis menguraikan mengenai rumus singkat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan mengenai unsur-unsur dalam pewarisan yakni terdiri dari: Pewaris (P), Ahli Waris (AW) dan Harta Waris (HW). Yang mana masing-masing unsur-unsur Pewarisan akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pewaris (P) adalah orang yang meninggal dan meninggalkan Harta Waris (HW) serta memiliki Ahli Waris (AW).
2. Harta Waris (HW) adalah harta yang sudah di kurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan oleh Pewaris (P) sehingga jika sudah bersih maka disebut Harta waris (HW)nya siap di bagikan kepada seluruh Ahli Waris (AW).
3. Ahli Waris (AW) adalah orang yang sah menerima Harta Waris (HW) dari Pewaris (P) serta memiliki hubungan darah dengan Pewaris (P) atau memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris (P).

2 Al-Qur'an Medina, Dilengkapi dengan Terjemahan, dan Materi tentang Akhlak Mulia, Penyusun Materi: Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, Abu Hafidz Arrazi, Bandung: Madina, 2007, hal. 78.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) unsur-unsur Pewarisan sebagai berikut:

1. Pewaris (P) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli Waris (AW) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris (P), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris (AW).
3. Harta Warisan (HW) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (P) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
4. Harta Peninggalan (HP) adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (P) baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Penjelasan dalam bentuk rumus berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, yakni sebagai berikut:

- I. Pewaris (P) adalah orang tua (bapak atau ibu)
Ahli Waris (AW) adalah anak-anak
Anak Laki-laki : Anak Perempuan
 $2 : 1$
> 2 anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (P)
1 anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (P) dan apabila 2 orang anak perempuan saja mendapatkan $\frac{2}{3}$
- II. Pewaris (P) adalah anak
Ahli Warisnya (AW) adalah orang tua (bapak ibu) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan Pewaris (P) (jika Pewaris mempunyai anak).
Jika Pewaris (P) tidak mempunyai anak maka Ahli Warisnya (AW) adalah orang tua (bapak ibu) saja maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan sisanya Bapak ($\frac{2}{3}$).

Pewaris (P) mempunyai beberapa saudara maka Ahli Warisnya (AW) adalah orang tua (Ibu) dan beberapa saudaranya. Ibu mendapatkan 1/6 dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh (P), jika Pewaris (P) memiliki beberapa saudara.

Catatan:

Seluruh Ahli waris (AW) menerima bagian seperti terurai di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh Pewaris (P) atau jika memiliki utang (telah atau sudah dibayar) utang Pewaris (P). Artinya Harta Waris (HW) yang dibagikan kepada seluruh Ahli waris (AW) harus sudah terlebih dahulu dikurangi/dilaksanakan dulu wasiatnya (jika ada wasiat), serta utang-utang yang dimiliki Pewaris (P) semasa masih hidup (jika memiliki utang-utang).

QS. An-Nisa' Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).³ Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun⁴.” (QS. An-Nisa' Ayat 12)

Penjelasan dalam bentuk rumus berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, yakni sebagai berikut:

I. Pewaris (P) adalah istri

Ahli Waris (AW) adalah Suami

Suami = $\frac{1}{2}$ (jika istri tidak mempunyai anak)

Suami = $\frac{1}{4}$ (jika istri mempunyai anak)

Catatan:

Seluruh Ahli waris (AW) menerima bagian seperti terurai di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh Pewaris (P) atau jika memiliki utang (telah atau sudah dibayar) utang Pewaris (P). Artinya Harta Waris (HW) yang dibagikan kepada seluruh Ahli waris (AW) harus sudah terlebih dahulu dikurangi/dilaksanakan dulu wasiatnya (jika ada wasiat), serta utang-utang yang dimiliki Pewaris (P) semasa masih hidup (jika memiliki utang-utang).

3 Menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan, seperti: (a) mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan, (b) berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga, jika ada niat mengurangi hak waris, jug atidak diperbolehkan

4 Al-Qur'an Medina, Dilengkapi dengan Terjemahan, dan Materi tentang Akhlak Mulia, Penyusun Materi: Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, Abu Hafidz Arrazi, Bandung: Madina, 2007, hal. 79.

II. Pewaris (P) adalah Suami

Ahli Waris (AW) adalah Istri

Istri = $\frac{1}{4}$ (jika suami tidak mempunyai anak)

Istri = $\frac{1}{8}$ (jika suami mempunyai anak)

Catatan:

Seluruh Ahli waris (AW) menerima bagian seperti terurai di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh Pewaris (P) atau jika memiliki utang (telah atau sudah dibayar) utang Pewaris (P). Artinya Harta Waris (HW) yang dibagikan kepada seluruh Ahli waris (AW) harus sudah terlebih dahulu dikurangi/dilaksanakan dulu wasiatnya (jika ada wasiat), serta utang-utang yang dimiliki Pewaris (P) semasa masih hidup (jika memiliki utang-utang).

III. Pewaris (P) yakni laki-laki maupun perempuan (tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara seibu.

Ahli Waris (AW) adalah seorang saudara laki-laki (seibu/seorang saudara perempuan seibu) = bagiannya $\frac{1}{6}$

Ahli Waris (AW) adalah lebih 1 saudara (seibu) = $\frac{1}{3}$ (bersekutu/bersama-sama), baik laki-laki maupun perempuan.

Catatan:

Seluruh Ahli waris (AW) menerima bagian seperti terurai di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh Pewaris (P) atau jika memiliki utang (telah atau sudah dibayar) utang Pewaris (P). Artinya Harta Waris (HW) yang dibagikan kepada seluruh Ahli waris (AW) harus sudah terlebih dahulu dikurangi/dilaksanakan dulu wasiatnya (jika ada wasiat), serta utang-utang yang dimiliki Pewaris (P) semasa masih hidup (jika memiliki utang-utang).

QS. An-Nisa' Ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَجُلٌ وَرَثَةٌ فَبِمَا تَرَكَ تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ أُنثَىٰ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ

الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).⁵ Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati, dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶ (QS. An-Nisa' Ayat 176)

Penjelasan dalam bentuk rumus berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176, yakni sebagai berikut:

- I. Pewaris (P) adalah saudara (tidak mempunyai anak)
 - a. Ahli Waris (AW) adalah saudara perempuan tunggal sekandung/sebapak
seorang saudara perempuan tunggal = $\frac{1}{2}$ bagian
 - b. Ahli Waris (AW) adalah Saudara laki-laki sekandung/sebapak, seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak.
- II. Pewaris (P) adalah saudara (tidak mempunyai anak)
 - a. Ahli Waris (AW) adalah 2 saudara perempuan
2 saudara perempuan = $\frac{2}{3}$ bagian
 - b. saudara laki-laki dengan saudara perempuan = 2 : 1

⁵ Kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak.

⁶ Al-Qur'an Medina, Dilengkapi dengan Terjemahan, dan Materi tentang Akhlak Mulia, Penyusun Materi: Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, Abu Hafidz Arrazi, Bandung: Madina, 2007, hal. 106.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

A. Definisi Waris

Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun makna istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak (uang), harta tidak bergerak (tanah), atau apa saja yang berupa hak-hak legal secara syar'i.¹

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya sebagai berikut:²

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

Menurut Soepomo:

"Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-

1 Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Depok, 2015, hal. 32

2 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: dalam perspektif Islam*, Adat dan BW, PT Refika Aditama ; Bandung, April 2011, hal. 3

barang yang tidak berwujud benda (*immatererele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan:

“Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut penulis, hukum waris adalah aturan-aturan yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan tentang harta benda yang dimiliki seseorang (yang telah meninggal dunia) sehingga harta benda yang dimilikinya beralih kepada yang berhak untuk menerima harta tersebut yakni ahli warisnya (AW). Namun dalam masalah waris yang menjadi pokok rujukan adalah harus diawali karena adanya kematian. Jika tidak ada kematian maka perpindahan harta tersebut bukan di kategorikan dalam hukum waris. Yang perlu diinginkan dalam hukum yang menjadi hak bagi ahli waris (AW) maka melekat pula kewajiban bagi ahli waris (AW) tersebut. Maksudnya adalah ahli waris (AW) berhak mendapatkan harta waris (HW) dari pewaris (P), namun disisi lain ahli waris (AW) berkewajiban memenuhi seluruh kewajiban dari pewaris (P) semasa masih hidup. Misalnya hutangnya pewaris (P), biaya pemakaman untuk pewaris (P) atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus di penuhi oleh pewaris (P).

B. Definisi Hukum Waris Islam

1 Literatur hukum waris Islam mengenal beberapa istilah untuk menanamkan hukum Waris Islam, seperti *fiqih* mawaris, ilmu *faraidh*, dan hukum Waris. Perbedaan penamaan ini dikarenakan berbeda pokok pembahasan yang menjadi titik utama.

Kata mewaris berasal dari bahasa Arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mewaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.

Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mewaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari lafadz *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mufrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *faridlu* atau *faridhla* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT. Al-Baqoroh ayat 237.
2. Qut'un, yaitu suatu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT. An-Nisa' ayat 7.
3. Inzal, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT. Al-Qashas ayat 87.
4. Tabyin, yaitu penjelasan seperti firman Allah SWT. At-Tahrim ayat 2.
5. Ihlal, yaitu menghalalkan, seperti firman Allah SWT. Al-Ahzab ayat 38.
6. Atha', yaitu pemberian.

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan sebab ilmu *faraidl* mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Melalui peraturan-peraturan yang telah disyariatkannya.

Ulama *faradiun* sebagian mendefinisikan ilmu *faraidl* sebagai berikut:

1. Ilmu faqih yang bertautkan dengan pembagian harta pustaka, pengetahuan dengan tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.
2. Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diteri oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Menurut istilah, 'mewaris' dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Adapun penggunaan kata 'mewaris' lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam literatur hukum di Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan, termasuk keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu 'waris', 'mewaris', 'pusaka', dan 'hukum waris'. Yang menggunakan nama 'hukum waris', memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama 'warisan' memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata 'waris', dengan asal kata 'waris' yang kemudian yang dibubuhi awalan "ke" dan akhiran "an". Kata 'waris' itu sendiri dapat berarti orang, 'pewaris' sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan dengan jalannya perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

M. Tahir Azhari dalam bukunya Karakteristik Hukum Waris Islam memberikan pernyataan, bahwa hukum waris Islam yang juga dikenal dengan "*The Islamic Law of Inheritance*" mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya "*Civil Law*" ataupun "*Common Law*". Menurut penulis, karakteristik tersendiri dalam sistem hukum yang dimiliki oleh hukum waris Islam adalah mengenai bagian masing-masing ahli waris (AW) yang telah ditetapkan bagiannya oleh al-Qur'an, misal: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{6}$. Artinya bagian masing-masing ahli waris sudah ada disebutkan bagiannya langsung oleh Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan hukum waris perdata yang mana

menyebutkan bagian ahli waris adalah sama rata (yang dalam hal ini artinya bagiannya belum diketahui berapa bagian masing-masing ahli waris, tergantung dari jumlah ahli waris yang disesuaikan dengan setiap kasus memiliki ahli waris yang berbeda, maka bagian masing-masing ahli warispun berbeda). Sama halnya dengan hukum waris Adat, yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, Bilateral dan Parental. Yang mana dalam hal bagian ahli waris masih belum diketahui bagiannya, disesuaikan dengan sistem kekerabatan masing-masing daerah. Hal ini menambah ketidakjelasan bagian masing-masing ahli waris.

Dijelaskan Amir Syarifuddin mengenai pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidl*. Menurut penulis, dalam pengertian tersebut di atas adalah jika seseorang meninggal dunia biasa disebut Pewaris (P), dan memiliki ahli waris (AW) yang sah serta Pewaris memiliki Harta Waris (HW), maka HW tersebut dapat beralih kepemilikan menjadi sah milik AW berdasarkan aturan hukum waris Islam yang menjadi pedoman atau rujukan adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Proses beralihnya harta dari P kepada AW itulah yang disebut dengan *faraidl*.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan ketentuan hukum bagi umat Islam Indonesia. Pengertian Hukum Waris yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab *fiqih*, telah terangkum menjadi sebuah rumusan pengertian hukum waris yang representative, di dalam Pasal 171 hukuf a KHI dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

1

Berdasarkan definisi hukum waris Islam tersebut di atas dapat diambil benang merah, bahwa hukum waris Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan. Adapun menurut sistem hukum perdata dapat disimpulkan, bahwa hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

4

Menurut penulis, hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan tentang harta benda yang dimiliki seseorang (yang telah meninggal dunia) sehingga harta benda yang dimilikinya beralih kepada yang berhak untuk menerima harta tersebut yakni ahli warisnya (AW). Namun dalam masalah waris yang menjadi pokok rujukan adalah harus diawali karena adanya kematian. Jika tidak ada kematian maka perpindahan harta tersebut bukan di kategorikan dalam hukum waris. Yang perlu diingat dalam hukum waris Islam yang menjadi hak bagi ahli waris (AW) maka melekat pula kewajiban bagi ahli waris (AW) tersebut. Maksudnya adalah ahli waris (AW) berhak mendapatkan harta waris (HW) dari pewaris (P), namun di sisi lain ahli waris (AW) berkewajiban memenuhi seluruh kewajiban dari pewaris (P) semasa masih hidup. Misalnya hutangnya pewaris (P), biaya pemakaman untuk pewaris (P) atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pewaris (P) termasuk berdasarkan aturan hukum Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah waris. Jika ada masalah waris muncul dan ingin penyelesaian dengan cara litigasi (di pengadilan) menggunakan hukum waris Islam, maka pengadilan yang dipilih adalah Pengadilan Agama.

4

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Menurut bunyi pasal di atas, maka masalah waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Di seluruh Indonesia, mungkin tidak ada masalah hukum yang lebih membingungkan dari pada masalah waris, masalah yang mudah sekali menimbulkan kekacauan dan perdebatan seru di kalangan para ahli hukum maupun aktivis politik. Banyak sekali bahan bacaan dan karangan yang diterbitkan sejak permulaan abad ini. Namun masih belum nampak ada kesimpulan yang menyeluruh dan belum pernah pula dicoba membuat undang-undang yang mengatur masalah waris untuk seluruh Indonesia. Hanya dalam Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, diketemukan beberapa ketentuan yang menyangkut waris, terutama dalam bentuk bahan penelitian dan administrasi.³

Untuk itulah, karena minimnya aturan mengenai waris di Indonesia maka hukum waris Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini aturannya pun didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Buku II yang mengatur mengenai Kewarisan. Hal ini disebabkan, persoalan waris yang diharapkan bisa di selesaikan dengan cara non litigasi (di luar mediasi) yang terdiri dari mediasi atau negosiasi. Hal ini bisa dilakukan

3 Zaini Ahmad Noeh (Alih bahasa), *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), hlm. 231

oleh mediator yang netral (independen) tidak memihak salah satu pihak dengan harapan agar terjadi kesepakatan dalam mediasi (jika para pihak sudah sepakat maka bisa dituangkan dalam akta kesepakatan di atas materai). Apabila melakukan negosiasi maka peran negosiator untuk bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak sangat dibutuhkan untuk mencari jalan tengah untuk mencapai kesepakatan artinya pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengalah, beretika baik ingin menyelesaikan masalah waris ini, saling menyadari dan saling merendahkan egoisnya masing-masing agar kesepakatan bisa tercapai.

Artinya persoalan hukum waris yang merupakan persoalan keluarga (perdata/privat), namun bisa sampai ke persoalan pidana. Hal ini disebabkan bisa menimbulkan sengketa yang berujung kepada saling menghilangkan atau menyelundupkan harta waris atau bahkan sampai bunuh membunuh hanya karena persoalan harta waris yang awalnya masalah keluarga. Persoalan waris merupakan persoalan yang sensitif, dan berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, umumnya persoalan ini muncul dalam sebuah keluarga, membuat rusak hubungan para ahli waris menjadi hancur persaudaraannya bahkan saling membenci satu ahli waris dengan ahli waris yang lain jika tidak ada pemecahan atau aturan hukum yang jelas bagi hukum waris ini.

Untuk itulah kemudian muncul undang-undang yang dirancang oleh negara untuk menambah aturan-aturan⁵ untuk mendukung mengenai masalah waris ini. Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah mengenai:

(a) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Menurut penulis yang berhak menjadi ahli waris memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan darah (baik garis lurus ke atas, ke bawah, maupun kesamping);
2. Memiliki hubungan perkawinan (yaitu suami istri yang saling mewaris), artinya jika suami yang meninggal duluan maka istri menjadi ahli waris, dan sebaliknya;
3. Islam;
4. Tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sesuai ketentuan.

(b) Penentuan harta peninggalan

Harta peninggalan (sirkah) di sini adalah harta yang dimiliki oleh Pewaris namun jika ada utang-utang atau tanggungan utang yang

lain maka harus dikeluarkan atau dikurangi. Setelah bersih (*netto*) maka baru disebut harta waris. Dalam hal ini harta waris adalah harta yang sudah siap untuk dibagikan kepada ahli waris.

(c) Bagian masing-masing ahli waris

Mengenai bagian ahli waris sesuai dengan yang ditentukan dalam al-Qur'an surat an-nisa' ayat 11,12 dan 176 serta hadist Nabi Muhammad SAW.

(d) Melaksanakan pembagian harta waris

Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat aturan hukum yang berlaku, yakni hukum waris Islam ada dalam al-qur'an. Berapa bagian masing-masing ahli waris yang berhak mereka terima. Atau juga bisa meminta penetapan Pengadilan Agama mengenai bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam (al-qur'an, hadist dan Kompilasi Hukum Islam/KHI). Salah satunya yang tertuang dalam Al-qur'an surat an-nisa' ayat 11, 12 dan 176 serta KHI buku II tentang kewarisan.

⁵ Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) ⁵. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.⁴

Menurut penulis, maka seluruh umat Islam yang memiliki masalah kewarisan maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama, yang artinya tunduk kepada hukum waris Islam. Dengan harapan akan terus terjaga dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum waris Islam, yang akan terjaga ilmu waris Islam karena seluruh umat Islam menggunakan hukum waris Islam.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Pustaka Kartini, 1993), hal. 148.

Dalam penjelasan ⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bilamana pewarisan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah nusantara,⁵ yang selama ini berbeda satu sama lain ⁴ karena dasar hukumnya berbeda. Selain itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan ⁵, pertolongan, dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa ⁵ antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁶

Artinya jelas bahwa Pengadilan Agama, melakukan pemeriksaan perkara sengketa waris pun harus melalui mediasi terlebih dahulu sebelum proses persidangan terjadi. Jika mediasi berhasil maka sidang tidak dilanjutkan dan ada kesepakatan mediasi tertuang dalam sebuah akta. Namun jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan ke agenda persidangan.

Jika ada yang terpaksa ke pengadilan (jalur litigasi) maka merujuknya kepada Al-Qur'an, hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana proses di pengadilan membutuhkan waktu dan tenaga serta finansial. Untuk itulah, jika memiliki masalah waris lebih baik diselesaikan dengan cara nonlitigasi (di luar pengadilan) yakni bisa dengan metode mediasi, atau negosiasi. Namun jika non litigasi gagal maka mau tidak mau masalah ini harus diselesaikan, yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tata cara berperkara Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) atau secara lisan (bagi yang buta huruf), atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP.

5 M. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 259.

6 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, cetakan kedua Maret 2016, hal. 137.

2. Penggugat wajib/membayar panjar/uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 21 ayat (4) HIR).
3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.
4. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidang.
5. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
6. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan, bila sudah lengkap dan benar, menentukan hari sidang dan memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak-pihak.
7. Panitera juru sita memanggil penggugat/kuasanya dan tergugat dengan Surat Panggilan Sidang (*Relaas*) secara resmi dan patut.
8. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh panitera pengganti.

Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, memutuskan dan mengadili mengenai perkara waris. Yang dimaksud dengan perkara waris adalah:

1. Menentukan siapakah yang meninggal dunia/pewaris;
2. Menentukan siapakah ahli warisnya;
3. Menentukan mengenai harta waris;
4. Menentukan bagian masing-masing ahli waris;
5. Melaksanakan pembagian harta waris;
6. Penetapan mengenai permohonan waris yakni siapakah ahli warisnya yang sah dan berhak menerima dan berapakah bagian masing-masing ahli waris yang harus diterima oleh ahli waris dan kewajiban apa saja yang harus dikeluarkan oleh ahli waris.
7. Putusan mengenai gugatan waris yakni menentukan siapakah gugatan yang dikabulkan dari salah satu pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Artinya dikabulkan yang mana gugatan Penggugat atau Tergugat.

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Buku II tentang kewarisan, terinci sebagai berikut:

Bab I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 171).

Bab II Tentang Ahli Waris (Pasal 172 s/d Pasal 175).

Bab III Tentang Besarnya Bahagian (Pasal 172 s/d Pasal 175).

Bab IV Tentang *Aul* dan *Rad* (Pasal 172 s/d Pasal 175).

⁴ Dalam pasal 109 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai wasiat wajibah, bagian Ayah angkat berhak 1/3 bagian. Meskipun hukum Islam, tidak ada hubungan waris-mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya orang tua angkat dengan anaknya. Hal ini bisa diberikan melalui wasiat wajibah. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai penertiban dan penyeragaman hibah. Hal ini diatur dalam bab VI, buku II KHI. Pada dasarnya apa yang diatur dalam KHI hampir sama nilai-nilai normanya dengan yang terdapat dalam hukum waris adat dan hukum waris barat/BW. Namun demikian, perumusan hukum hibah yang diatur KHI mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian demi untuk terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat.

Modifikasi tersebut di antaranya adalah:

- a. Pembatasan secara definitif:
 - 1) Tentang umur penghibah minimal 21 tahun.
 - 2) Tentang pembatasan secara definitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3.
- b. Secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum acara di Pengadilan Agama selain hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih dirasa adanya kekurangan bagi hakim Pengadilan Agama akan adanya hukum materiil yang menjadi

7 M. Yahya Harahap, Hlm. 72

patokan dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Agama. Lain halnya di Peradilan Umum di dalam perkara pidana sudah terdapat hukum pidana materiil yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Agama para hakim Pengadilan Agama berpegangan pada kitab-kitab fikih karangan para ulama fikih sehingga dalam penanganan suatu perkara yang sama terdapat perbedaan dalam penetapan maupun putusan Pengadilan Agama sebagai produk-produk Pengadilan Agama.⁸ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terjadinya perbedaan produk Peradilan Agama digambarkan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

“Akibat sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikkan fikih dengan syari’ah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang madzab yang dianut dan digandrungi.”⁹

Karena terjadinya perbedaan dalam memberikan penetapan maupun menjatuhkan putusan itulah akhirnya pemerintah saat itu memikirkan aturan yang dibutuhkan untuk standar yang sama dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang penulis uraikan dalam sejarah kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Kehadiran KHI sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Departemen Agama. Sejak awal berdirinya departemen ini setelah melalui perjalanan panjang tersebut,

4

8 Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud, M.D., Dkk (Editor), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

9 M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Al-Hikmah dan Direktorat Binbaga PAI, Jakarta, 1992, hal. 21.

pada tanggal 25 Maret 1985, ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dengan proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada tersusunnya KHI, seperti penelitian terhadap “kitab kuning” penelitian yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara dengan ulama se-Indonesia, studi banding ke beberapa Negara Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data dan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

Proses pembentukan KHI inilah yang menjadikan pasal-pasal yang tertuang di dalam KHI. Yang mana, dalam KHI terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I membahas mengenai Perkawinan, buku II membahas mengenai Waris, buku III membahas mengenai wakaf. Melihat proses pembentukan KHI sebagaimana terurai diatas, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa pembentukannya telah melalui proses yang panjang dan dilakukan oleh ahlinya. Jika melihat kebelakang, sebenarnya apa yang menyebabkan harus ada regulasi yang ada di Pengadilan Agama salah satunya adalah mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia.

Hal inilah yang mendorong pemerintah saat itu harus segera membentuk tim khusus yang diberi tugas untuk merancang, membahas dan menggodok KHI untuk terobosan baru dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹¹

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan KHI, sebagai berikut:

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hal. 40.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, 2013: 18.

1. Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di seluruh Indonesia;
2. Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka di tanah air;
3. Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun;
4. Mengadakan studi banding menyangkut pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di negara-negara muslim, daerah timur tengah, Turki dan terutama sekali negara-negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

Dengan demikian, pihak Departemen Agama atau sekarang disebut Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materilnya, khususnya menyangkut hukum materilnya. Direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. Kitab tersebut adalah KHI.¹²

Dengan harapan, pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum dan mendapat keadilan yang sama dalam kasus yang hampir sama karena pedomannya satu yakni KHI di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Lebih lanjut Wasit Aulawi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam;
2. Mengatasi berbagai masalah *khilafiah* (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum;
3. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.¹³

Menurut penulis, dari pandangan diatas maka hukum dapat memberikan manfaat bagi *justiciabelen* (pencari keadilan) serta rasa keadilan

12 Dr. Pagar, M. Ag, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CitaPustaka, 2007), hlm. 44.

13 Wasit Aulawi, 1989: 12.

bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dapat dirasakan secara seimbang sesuai dengan aturan hukum Islam. Disisi lain, kehadiran KHI mampu mengatasi perbendaan pendapat yang disebabkan oleh mazhab atau fiqh-fiqh yang ada, dengan kehadiran KHI maka kepastian hukum bagi *justiciabelen* bisa terjamin. Kehadiran KHI menjadikan rujukan yang utama bagi seluruh Pengadilan Agama dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum nasional.

Mengingat persoalan hukum saat itu terjadi disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama, yakni memiliki perkara yang sama dan posisi kasus yang hampir sama namun putusannya bisa sangat jauh berbeda. Hal ini yang mendorong agar segera dibentuk aturan yang dapat menjadi rujukan (keseragaman) aturan hukum di seluruh Pengadilan Agama. padahal *justiciabelen* mengharapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menghadapi perkara di Pengadilan Agama.

Akhirnya dengan disahkannya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) tersebut diharapkan bisa meminimalisir dalam kasus yang sama namun putusan bisa tidak sama disebabkan karena belum adanya aturan yang seragam, yang baku di Pengadilan Agama. Tidak hanya menurut perspektif hakim saja. Namun, memiliki aturan yang sama dan standar mulai sabang sampai merauke, merujuk kepada aturan yang sama. Jadi menghasilkan putusan yang tidak sama padahal kasusnya sama. Maka terjadi disparitas putusan hakim.

Kuatnya keinginan untuk melahirkan KHI, dan penuh keseriusan dalam pelaksanaannya. Hal ini, tidaklah mudah untuk segera menyelesaikannya. Salah satu penyebabnya adalah KHI ini bersifat materiil dan mengatur khusus untuk umat Islam, apakah tidak menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Melihat riil kondisi masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika, artinya tidak hanya umat Islam saja yang ada di masyarakat namun juga ada non Islam. Apalagi jika hal ini ditarik ke ranah politik, maka dominasi umat Islam dibandingkan umat non Islam, yang akan kembali ke Piagam Jakarta yakni umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam. Hal ini, tidak mengherankan jika proses pembentukan KHI memakan waktu 30-an (tiga puluh) tahun.¹⁴ Proses yang sangat panjang dalam pembentukan KHI, artinya tidak mudah dalam sebuah regulasi yang akhirnya dapat

14 *Ibid*, h. 127-174.

berlaku disebuah Pengadilan. Hal ini, disebabkan karena berbagai macam faktor dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh faktor politik, kebijakan dan kondisi masyarakat yang latar belakang agama, suku, pandangan, wawasan serta ilmu pengetahuan yang beragam.

Dengan waktu yang lama tersebut, diharapkan KHI ini bisa dijadikan acuan yang diterapkan di Pengadilan Agama karena dalam proses pembentukannya saja membutuhkan waktu yang sangat panjang, pemikiran banyak pihak dan melalui kajian-kajian, diskusi-diskusi untuk menghasilkan aturan yang maksimal. Namun demikian, pasal-pasal yang ada dalam KHI sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia, yang mana bisa jadi kasus hukum yang di Indonesia, belum tentu terjadi di negara lain. Maka dipilihlah bahasa yang mudah dipahami, singkat jelas dan berdasarkan kasus-kasus yang riil terjadi dalam masyarakat di Indonesia sehingga membutuhkan jalan keluar bagi permasalahan hukum yang dihadapi. Namun demikian, pasal-pasal dalam KHI di sana-sini memiliki kekurangan dan kelemahan khususnya jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ketentuan *syar'iah* Islam. Dengan harapan, di masa yang akan datang akan ada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam proses pembentukan KHI melibatkan berbagai macam unsur, yaitu birokrat Mahkamah Agung (MA) dan Hakim Agung MA, ulama dan cendekiawan/intelektual muslim. Tim inilah yang bertugas menyusun kaidah-kaidah ke dalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan manfaat sarana, bahan dan narasumber yang pada saat itu. Proses pembentukan KHI pertama adalah penyusunan KHI yakni mengkaji kitab-kitab fiqh oleh para cendekiawan/intelektual yang mana kepakarannya tidak diragukan lagi. Para pakar yang sudah ahli dalam bidang kitab fiqh tersebut melakukan pengkajian sebanyak 38 kitab dengan 160 rincian pokok masalah mengenai hukum materiil tentang bidang hukum keluarga yaitu: hukum perkawinan, cerai-talak, itsbat nikah, izin poligami, kewarisan, *testament/wasiat*, hibah/hadiah, wakaf dan sedekah.

Langkah selanjutnya, yakni melakukan wawancara kepada 185 ulama di 10 lokasi dibawah Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Yang menjadi catatan penting adalah tidak semua ulama di Indonesia dijadikan responden, namun ulama yang sudah memiliki kemampuan kapasitas ilmu agama yang tinggi, memadai dan kharismatik serta disegani dalam

masyarakat. dalam melakukan wawancara, responden disodori pertanyaan dan permasalahan-permasalahan dalam bentuk quisioner terdiri dari 102 masalah mengenai persoalan hukum perkawinan, cerai-talak, itsbat nikah, izin poligami, kewarisan, *testament/wasiat*, hibah/hadiah, wakaf dan sedekah. Hasil dari quisioner inilah yang memberikan kontribusi bagi terbentuknya KHI.

Langkah berikutnya adalah merujuk kepada putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan untuk memutus masalah yang sama atau yang disebut *yurisprudensi*. Hal ini dilakukan kajian *yurisprudensi* mulai zaman Hindia Belanda sampai KHI ini akan dibentuk. Kenapa kajian ini dilakukan disebabkan *yurisprudensi* pada riilnya pernah diberlakukan bagi *justiciabelen* pada saat itu. Dengan mengkaji *yurisprudensi* maka bisa memberikan pandangan dan prediksi mengenai hukum pada saat itu. Mengetahui hal-hal yang memiliki masalah hukum khususnya hukum keluarga dan cara penyelesaiannya. Untuk itulah, hal ini menjadikan rujukan bagi pembentukan KHI.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh tim pembentukan KHI adalah melakukan studi banding ke berbagai negara yang ada di timur tengah, khususnya negara-negara muslim. Hal ini tim melakukan perbandingan, penerapan dan pelaksanaan mengenai hukum keluarga yang ada di negara-negara muslim. Dengan harapan memberikan kontribusi bagi pembentukan KHI, plus dan minus bisa disaksikan secara langsung dengan rujukan negara-negara muslim yang telah menerapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, harapannya adalah mampu memberikan pandangan, wawasan, pengetahuan yang sama bagi seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama khusus mengenai persoalan keluarga dapat terpecahkan dengan baik.

Proses selanjutnya setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut di Ciawi Bogor. Setelah itu disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, melalui surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988, Perihal: Kompilasi Hukum Islam. Dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama. Lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa yang ada dan masih berlaku sekarang ini.¹⁵

15 Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm. 50.

4

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Menteri Agama membuat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama itu berisi:

- Pertama: Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- Kedua: Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.
- Ketiga: Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

1. Menurut Hukum Adat

Dalam buku ajar ini meskipun membahas mengenai hukum waris Islam namun dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia karena juga mengenai waris adat dan waris BW/Perdata. Dalam hal ini, penulis membahas sedikit mengenai Hukum Waris Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam garis penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (materiel maupun immaterial). Prinsip-prinsip tersebut biasa berupa patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*altermerend*), matrilineal maupun bilateral, dan prinsip unilateral berganda atau *dubble unilateral*. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem waris individual yang merupakan sistem waris dimana para ahli waris mewaris secara perorangan (Jawa, Sulawesi, Batak, dan lain-lain).
- b. Sistem waris kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewaris harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem waris mayorat:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, sistem tersebut dapat ditemui di daerah Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo.

2. Menurut KUH Perdata

Selanjutnya hukum waris di Indonesia salah satunya mengenai hukum waris perdata/BW maka di dalam buku ajar ini, penulis mengutip pendapat Wirjono Projodikoro memberikan pengertian hukum waris menurut KUHPerdata yang meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan atau "*erflater*" yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga, dimana si peninggal warisan berada;
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris;
- c. Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang kemudian setelah dialihkan kepada ahli waris menimbulkan persoalan. Mengenai bagaimana dan sampai dimana wujud peralihan kekayaan tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggalan warisan dan ahli waris tinggal bersama.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengatakan, bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata cara peralihan pelbagai hak-hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹⁶ Menurut penulis, dalam hukum waris Barat peraturan-peraturan yang dimaksud adalah yang terdapat pada KUH Perdata dan beralihnya hak-hak disini berkaitan dengan Harta Waris (HW) yang dimiliki oleh Pewaris (P) serta kewajiban-kewajiban (utang, pajak, biaya rumah sakit dan biaya pemakaman) yang dimiliki P namun belum dilaksanakan oleh P maka menjadi tanggungjawab ahli warisnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pewaris (P). Dalam hukum waris dikatakan Pewaris artinya orang yang telah meninggal dunia (*wettelijk erfrecht*), Ahli Waris (AW) adalah orang yang berhak menerima Harta Waris karena memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan Pewaris (P) dan tidak *onwaardig*.

Menurut Prof. Djodigono memberikan definisi kewarisan dengan berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas/generasi yang menyusul.¹⁷ Artinya menurut penulis, harta benda Pewaris (P) berpindah kepada Ahli Waris (AW) dikarenakan P meninggal dunia, maka harta benda milik P beralih menjadi milik AW. Namun, dalam hal beralihnya harta ini sesuai dengan KUH Perdata.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat,¹⁸ artinya harta bruto dikurangi pengeluaran-pengeluaran menjadi netto. Selanjutnya, netto itulah yang merupakan harta waris, yang mana jika sudah netto maka harta tersebut siap untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang sah menurut KUH Perdata.

Dalam hukum waris perdata/BW mengenai ahli waris terdiri dari golongan-golongan yakni sebagai berikut:

-
- ¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017) hlm 3-9
- ¹⁷ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013) hlm 119
- ¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Banjarmasin : Pustaka Baru Press, 2016) hlm 145

1. Golongan I

Ahli warisnya terdiri dari: anak beserta keturunannya sampai derajat ke-6, dan istri atau suami yang hidup terlama.

2. Golongan II

Ahli Warisnya adalah orang tua (yakni bapak dan ibu) dan saudara.

3. Golongan III

Ahli Warisnya adalah kakek, nenek, saudara kakek-nenek.

4. Golongan IV

Ahli Warisnya adalah paman dan bibi, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam.

Uraian sedikit di atas mengenai hukum waris perdata/BW merupakan sedikit materi untuk buku ajar ini karena hukum waris Indonesia yang berlaku ada 3 hukum waris yakni hukum waris BW/Perdata, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Dengan harapan berikutnya akan ada buku ajar yang khusus membahas mengenai hukum waris perdata. Dalam hal ini, jika terjadi sengketa waris namun memilih dengan penyelesaian hukum waris perdata maka bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri (PN) yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan waris perdata.

C. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

1. Prinsip *Ijbari*

Yang dimaksud dengan prinsip *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.¹⁹ Dijalankannya prinsip *Ijbari* ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.²⁰

Menurut penulis, penjelasan di atas artinya ahli waris yang sah mendapatkan harta waris dari pewaris secara otomatis karena kedudukannya sebagai ahli waris yang sah. Tanpa diminta oleh ahli

19 Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hal. 18.

20 *Ibid.*

waris yang sah itu pun harta waris akan diberikan kepada ahli warisnya yang sah. Asalkan ahli warisnya tidak termasuk *onwaardig* (orang yang tidak patut menjadi ahli waris karena perbuatannya) artinya orang yang berusaha membunuh pewaris atau memiliki niatan untuk membunuh pewaris, menghilangkan atau merusak surat wasiat atau memalsukan surat wasiat. Jadi, karena kedudukan ahli waris itu sendiri, maka dia berhak mendapatkan harta waris. Maksudnya adalah kedudukan dia sebagai anak sah maka otomatis dia berhak mendapatkan harta waris dari orang tua dan sebaliknya, kedudukan dia sebagai suami maka otomatis mendapatkan haknya jika isteri meninggal, dan sebaliknya.

Dalam bukunya A. Rachmad Budiono, ditegaskan prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalau ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak ahli waris yang baik.

Jika keadaan di atas dibandingkan dengan KUH Perdata, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam KUH Perdata, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus pula menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris.

Dilihat dari segi pewaris, saat ini belum meninggal dunia, iapun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap hartanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah. Pembatasannya adalah bahwa seseorang hanya boleh mewasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga hartanya. Yang disebut

terakhir ini jelas menunjukkan adanya pembatasan seseorang terhadap hartanya.

2. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya.²¹

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan tidak dibagi-bagi asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kanak-kanak. Apapun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagi-baginya warisan itu tidak menghapus hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

Menghilangkan bentuk individual dengan jalan mencampurkannya dengan sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang ditegaskan oleh Al-Quran surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya:

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama kamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakai) itu adalah dosa yang besar."

Oleh karena itu, bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara harta seseorang dengan harta anak yatim. Pencampuran itu, tentu akan menyebabkan

21 A. Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 3.

tertukarnya dan termaknnya harta anak yatim tersebut. Jika ini terjadi, maka jika hal ini terjadi merupakan dosa besar. Secara khusus, perbuatan ini terkena sanksi Surat An-Nisa' ayat 2, 6 dan 10. Secara umum perbuatan itu melanggar surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya:

"Dan janganlah sebagai kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) membwa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui)."

2 Ada perbedaan yang sangat mencolok jika prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam tersebut dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam hukum kewarisan adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam kaitan ini, Professor Soekanto menegaskan bahwa "di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan turun-temurun diperoleh oleh nenek-moyang tak dapat dibagi; jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh". Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon. "Tiap-tiap anak turun menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks family itu menjadi terlalu besar, maka kompleks family itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka yang dibagi dua.²²

Menurut penulis, pemaparan di atas hak untuk mendapatkan harta waris itu adalah menjadi milik masing-masing ahli waris yang sah tersebut. Artinya ahli waris mendapatkan harta waris karena kedudukannya sebagai ahli waris itu patsendiri. Khususnya dalam ajaran Islam, bahwa ahli waris mendapatkan haknya masing-masing jangan mengambil hak ahli waris yang lain. Apalagi mempersoalkan masalah harta dan menjadi sengketa itu tidak diharapkan bagi umat yang beriman karena kerugian yang akan diperoleh bagi seluruh ahli waris jika terjadi sengketa.

3. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis

22 A. Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 3

kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.²³

Yang artinya seluruh ahli waris yang sah sama-sama berhak untuk mendapatkan harta waris, tidak memandang jenis kelamin meskipun bagiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, dalam waris Islam memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Yang mana seluruh ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum. Untuk ahli waris mendapatkan harta waris sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

4. Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, "yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup".²⁴

Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuai hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya ada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan hartanya. Yang paling penting, kejadian yang disebut terakhir ini tetap bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.

Prinsip kewarisan hanya karena kematian ini bisa dihalangi dari penggunaan kata-kata waras yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Dari

²³ *Ibid*, hal. 5

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 25.

keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kata warasa mengandung arti peralihan harta setelah adanya kematian.

2 Meskipun kematian tetap merupakan unsur yang amat penting, tetapi bukan merupakan unsur yang harus ada untuk adanya kewarisan. Prinsip dalam hukum kewarisan adat ini sangat erat kaitannya dengan mentas dan mencarnya anak-anak atau generasi baru yang akan terbentuk. Mentas berarti anak atau generasi itu telah mampu berdiri sendiri, tak bergantung kepada orang tuannya. Mencar berarti memisahkan anak atau generasi dari lingkungan keluarga aslinya. Jika kedua hal itu telah tercapai, maka tujuan proses pewarisan dalam hukum adata telah tercapai. "Mewarisi, menurut anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengoprasikan harta keluarga kepada keturunan, terutama kepada anak laki-laki serta anak perempuan."²⁵

Dalam hal ini maksudnya adalah, harta waris bisa dipecah dan dilaksanakan jika sudah ada kematian dari pemilik harta tersebut. Begitu pula wasiat, dilaksanakan pada saat orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dunia.

25 A. Rachmat Budiono. Op. Cit., hlm 7

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

KETENTUAN AHLI WARIS

A. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

- A**da 3 sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:¹
1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
 2. Pernikahan (suami/istri), yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
 3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum

¹ Dalam buku karangan Aunur Rahim Faqih, sebab-sebab mawaris, beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya proses waris dalam Islam menurut Sayid Sabiq adalah karena tiga hal, yaitu sebab hubungan, kerabat/nasab, perkawinan, dan wala' (memerdekakan budak). Adapun literatur lain menyebutkan terdapat 4 hal penyebab suatu waris itu terjadi, perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam. Penjelasan rinci sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (*nasab*)

Salah satu sebab dapat beralihnya harta, dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah dikarenakan adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan *nasab* yang disebabkan oleh kelahiran. *Nasab* di sini

1 Muhammad Ali Asshabuni, Op. Cit, hal. 38.

menyebabkan dia berhak mendapatkan harta waris. Untuk itulah, dalam Islam hubungan *nasab* sangat penting. Kita harus mengetahui *nasab* kita karena berkaitan dengan waris, dan bahkan hukum perkawinan pun membutuhkan adanya *nasab*.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan *nasab* antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang dari si mati).
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok/asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak keturunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

Menurut penulis, hubungan nasab atau hubungan darah disini adalah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris (P) baik garis lurus keatas maupun kebawah dan kesamping. Maksud dari garis lurus keatas adalah yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris yakni orang tuanya, kakek neneknya, orang tuanya kakek nenek sampai keatas. Kemudian, maksud dari garis lurus kebawah adalah yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris yakni anak, cucu, cicit dan seterusnya sampai kebawah. Selanjutnya, mengenai garis lurus kesamping adalah saudara, paman, bibi dan keturunan paman bibi.

2. Hubungan Perkawinan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (*persemendaan*) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri juga menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dengan terikatnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan berakibat kepada suami istri saling mewaris jika ada salah satu pihak ada yang meninggal duluan, maka pihak yang masih hidup otomatis menjadi ahli waris. Dijelaskan Muhibbin dalam bukunya hukum waris Islam mengenai sebuah perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan waris antar suami dan istri didasarkan pada 2 syarat berikut:

- a. Perkawinan itu sah menurut syariat Islam.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah

berlangsung akad nikah yang sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walau belum kumpul (hubungan kelamin). Ketentuan ini berdasar pada keumuman ayat tentang mawaris dan tindakan Rosulullah SAW. yang telah memberikan keputusan hukum tentang waris terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan mas kawinnya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW:

“telah memutuskan waris barwa’ binti wasit. Suaminya telah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan mas kawinnya.”

Sikap Rosulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan Barwa’ dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya waris. Terjadinya proses waris didasarkan kepada keabsahan syarat dan rukun pernikahan yang telah terpenuhi, bukan berdasar kepada telah terjadinya hubungan badan atau dilunasinya mas kawin oleh sang suami. Sebaliknya jika perkawinan itu tidak sah menurut agama atau dinyatakan *fazit* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris mewaris antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Menurut penulis, perkawinan disini harus memenuhi rukun perkawinan berdasarkan aturan hukum Islam. Rukun nikah sebagai berikut:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Wali
- 4) 2 orang saksi
- 5) Ijab dan qobul

Jika sebuah perkawinan berlangsung namun tidak memenuhi rukun sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinan itu tidak sah. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui pentingnya dan wajibnya rukun nikah itu harus dipenuhi. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan, namun wali

tidak dihadirkan maka hal ini jelas rukun nikah diatas wajib terpenuhi smuanya. Rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, wajib seluruhnya dipenuhi karena bersifat komulatif bukan alternatif.

b. ¹ Perkawinannya masih utuh

Hubungan perkawinan yang dimaksud dapat memperoleh hak waris adalah perkawinan yang utuh, dimana sang suami dan istri masih berada dalam tali ikatan perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *Talaq Raj'i* dan si perempuan sedang berada dalam masa iddah maka status si perempuan tersebut masih sebagai seorang istri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin (menurut Jumhur Ulama) ¹ karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

Menurut penulis, dalam hal persoalan waris mewaris antara suami isteri yang disebabkan karena mereka terikat perkawinan yang sah dan ikatan itu masih utuh. Maksud utuh disini adalah tidak putus akibat perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau putusan pengadilan yang disebabkan karena adanya pembatalan perkawinan atau kematian. Dalam buku ini, membahas mengenai waris Islam, maka putus perkawinan karena kematian inilah yang menyebabkan ada ilmu mengenai hukum waris. Bagaimana proses beralihnya dari orang yang telah meninggal kepada orang yang memiliki hubungan perkawinan dengannya. Berapa bagian dari harta yang ditinggalkan bagi ahli warisnya yang sah. Hal ini diatur dalam hukum waris.

3. ¹ Hubungan Al-Wala'

Pengertian *wala'* adalah hubungan waris mewaris karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Dijelaskan Moh. Muhibbin bahwa sekarang ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tatanan wacana saja. Dikarenakan hubungan *wala'* ini terjadi disebabkan oleh usaha seorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik

budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap dalam hal mengurus, memiliki, dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri. Selain itu, ia menjadi cakap bertindak hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budak tersebut, hal tersebut guna menarik para pemilik budak lainnya untuk memerdekakan budak lainnya. Kepada Rasulullah SAW memberikan hak *wala'* kepada orang yang telah memerdekakan budaknya itu sesuai hadistnya yang berbunyi: Hak *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budaknya (HR.Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, Rasulullah menganggap *wala'* itu sebagai hubungan kerabat yang berdasarkan nasab secara hukum (nasab hukumnya), beliau bersabda: *Wala'* itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh di jual dan di ghibahkan (HR.Al-hakim). Dengan demikian orang yang mempunyai hak *wala'* mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budak tersebut meninggal dunia. Namun, jika melihat kondisi Indonesia saat ini untuk masalah budak atau membebaskan budak tidak ada di masyarakat Indonesia. Namun jika budak ditafsirkan yang lain oleh ali fiqih kontemporer maka itu menjadi kajian lain.

1

4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang di sebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris akan diwarisi oleh umat Islam.²

Jadi menurut penulis, dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa hubungan umat Islam satu dengan yang lain sangat erat (*Ukhuwah Islamiyah*). Hal ini terlihat apabila Pewaris tidak memiliki Ahli Waris (AW) maka yang berhak mendapatkan harta waris tersebut adalah *Baitul Maal* artinya dari dana yang masuk kepada *Baitul Maal* peruntukannya pun untuk kegiatan dan membantu umat Islam baik secara langsung maupun tidak langsung.

2 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit. hlm 41-44

B. Rukun Waris

Dalam buku Auliya Muthiah, rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara, suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi, misalnya perkara salat. Apabila salah satu dari rukun salat tidak dipenuhi maka salat seseorang itu tidak sah. Begitupula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan hakiki pewaris telah benar-benar meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukumnya. Para ulama *fiqh* membedakan kematian pewaris menjadi tiga macam yaitu: mati *haqiqi*, mati *hukmy* dan mati *taqdiry*.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum yang menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah *fiqh* juga disebut dengan '*waarits*', adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. ini berarti bahwa jika

seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan.

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan kedalam tiga macam yaitu: mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (menurut putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Mati *haqiqy* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh mata dan dapat dirasa dengan panca indra yang lain, dengan kata lain mayat si pewaris benar-benar ada atau benar-benar diketahui oleh ahli waris dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mati *hukmy* adalah kematian disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya sudah mati atau masih hidup. Seperti seseorang yang dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman mati itu belum dilaksanakan maka seseorang itu dinyatakan telah mati. Mati *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan adanya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati, seperti seseorang yang hilang karena ada bencana alam. Selama beberapa waktu yang lama orang tersebut tidak ada kabarnya. Orang ini dengan adanya dugaan yang kuat dinyatakan telah mati, meskipun mayatnya tidak ditemukan.

Adapun hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya dapat mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini adalah *mafqud*, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.

Masalah *mafqud* terjadi dalam hal keberadaan seorang ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqud* tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak si *mafqud* tersebut masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut si *mafqud* tersebut tidak datang sehingga dia dapat di duga telah mati, maka bagian tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan saham masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri sebagai ahli waris dalam keadaan mengandung ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak itu lahir.

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus perkasus.³ Maksudnya adalah setiap kasus tidak sama penyelesaian dalam hal jika mati secara bersama-sama, dilihat sesuai dengan kasus posisi masing-masing.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris. Para ahli fiqh juga bisa menyebut harta warisan dengan istilah '*mauruts*', adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan '*tirkah*', yaitu apa yang ditinggalkan oleh 'orang' yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan

3 Aulia Muthiah, Op. cit., hlm 153-156

baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih/netto dari segala sangkut paut dengan Allah dan orang lain.⁴

C. Syarat Waris

Syarat-syarat waris juga ada 3:

1. Meninggalnya seseorang (Pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya Ahli Waris (AW) yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Seluruh Ahli Waris (AW) diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.
3. Adanya Harta Waris (HW) yang siap dibagikan kepada Ahli Waris (AW). Setelah dikurangi dengan seluruh utang, pajak, biaya rumah skait, biaya pemakaman, dan lain-lain.

Menurut Moh. Muhibbin⁵ waris-mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewaris memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya muwarrits (orang yang mewariskan).

Kematian seorang muwarrits itu menurut ulama di bedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

4 Muhammad Ali Asshabuni, Op. Cit, hal. 39.

5 Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm 62

Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi) di dalam saat kematian muwarits. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di dalam kematian muwarits baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada *muwarits* dan *warits*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada orang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan Negara. Adapun menurut Aunur Rahim Faqih⁶ syarat-syarat mewarisi erat kaitannya dengan sebab-sebab seseorang dapat saling mewarisi, yakni sebagai berikut:

1. Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dapat menjadi sebab mewarisi dalam sistem hukum Waris Islam, baik hubungan kekeluargaan yang bersifat *haqiqi* (sebenarnya) atau hubungan kekeluargaan yang bersifat *hukmi* (hubungan kekeluargaan yang terjadi disebabkan oleh pembebasan budak). Sesuai dengan firman Allah dalam QS AL-Anfal: 75.

“orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Hubungan Perkawinan

Firman Allah dalam QS An-nisa: 12

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.”

3. Hubungan Agama (sesama muslim)

Jikalau seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam sebagai warisan. Sebagaimana Rosulullah bersabda:

“Saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris”. (HR Ahmad dan Abu Daud). Hadits Nabi Muhammad yang lain “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR Jama’ah).

6 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit. hlm 44-45

Hubungan agama dapat diketahui sesuai dengan penjelasan di dalam kompilasi hukum Islam:

Ahli waris diketahui beragama Islam salah satunya adalah melalui Kartu Tanda Penduduknya, cara ibadah yakni amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam atau pengakuan yang dibuktikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk yang masih belum cakap hukum, bayi yang baru lahir atau balita atau anak yang belum dewasa, beragama sesuai dengan ayahnya atau lingkungannya.

4. Hubungan *Wala'* (sebab memerdekakan budak)

Seorang majikan dapat mewariskan harta bendanya ketika dia meninggal dunia kepada budak yang telah ia merdekakan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Selanjutnya bagaimana dikatakan Mardani dalam bukunya Hukum Waris Islam, bahwa syarat-syarat mendapat warisan selain mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan agama, terdapat syarat khusus lain yang harus dipenuhi agar berhak mendapat warisan secara hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewariskan sudah meninggal dunia.

Ulama membedakan mati kepada tiga macam ketentuan, yaitu:

- 1) mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya). Dalam hal ini manusia dianggap mati ketika sudah menghembuskan nafas terakhir, memenuhi ketentuan bagi mayit dalam Islam kemudian dikuburkan;
- 2) mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan
- 3) mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* atau *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Seperti halnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya benturan keras pada perut sang ibunya.

b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*.

c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.

d. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

D. Hijab Waris

Hijab adalah dinding atau penghalang, yang menghalangi Ahli Waris (AW) dari menerima waris, atau mengurangi bagian Ahli Waris (AW). Orang yang meng-hijab disebut Hajib, sedangkan orang yang terhijab disebut Mahjub. Jadi tidak seluruh Ahli Waris (AW) yang termasuk dalam Daftar Ahli Waris (AW) mendapat bagian waris, karena ada Ahli waris (AW) yang dapat dihijab (terhalang) oleh Ahli waris (AW) yang lebih dekat hubungannya dengan Pewaris (P). Oleh karena itu, ada Ahli Waris (AW) yang tidak memperoleh bagian waris sedikitpun dan Ahli Waris (AW) memiliki bagian warisnya berkurang akibat adanya Ahli Waris (AW) yang lebih dekat derajatnya kepada Pewaris (P) daripada dirinya. Ahli Waris (AW) yang lebih dekat tersebut menghijab Ahli Waris (AW) yang lebih jauh.⁷

Hijab terhadap waris ada 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hijab Nuqshan

Hijab Nuqshan adalah hijab yang hanya mengurangi bagian waris dari seorang Ahli Waris (AW).

2. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah hijab yang bersifat menghalangi dari mendapat bagian waris.

Dalam buku Aunur Rahim Faqih menjelaskan yang menjadi sebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak waris dari penghalang mempersakain) secara garis besar disebabkan oleh dua hal, yakni sebagai berikut:

1. Karena halangan waris.
2. Karena adanya beberapa kelompok yang menjadi penghalang waris (*hijab* dan *mahjub*).

Selanjutnya akan dipaparkan secara rinci mengenai kedua hal tersebut sebagaimana berikut:

1. Halangan Waris

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab

7 Subchan Bashori, *al-Faraidh Hukum Waris*, nusantara publisher, Jakarta, 2009, hal. 50

sehingga ia tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalangan mewarisi adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahawa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewarisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan Hadist Nabi:

“Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikitpun (HR. Imam Ahmad).”

Mengenai ⁵ bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan (*mawani'ul iris*), para *fuqaha* berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Fuqaha* aliran safiyyah dengan berpegang pada keumuman hadist di atas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.
- 2) Menurut *fuqaha* aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi terdapat empat macam, yakni sebagai berikut:
 - a) Pembunuhan dengan sengaja (*qatlul'amd*) yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
 - b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibhul 'amd*) seperti halnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
 - c) Pembunuhan karena salah (*qatlul khoto'*) seperti contoh seorang yang berburu menembaki mati sesuatu yang dikira monyet, namun ternyata seteah didekati adalah manusia.
 - d) Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati.

- 3) Menurut *Fuqaha* Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, sebagai berikut:
 - a) Pembunuhan dengan sengaja (*Qatlul 'Amd*)
 - b) Pembunuhan semi sengaja (*Qatlul Sybhl 'Amd*)
 - c) Pembunuhan tidak sengaja (*Qatlul Khotana'*)
- 4) Adapun menurut *fuqaha* aliran Hanadilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembunuhan sengaja
 - b) Pembunuhan mirip sengaja
 - c) Pembunuhan karena khilaf
 - d) Pembunuhan dianggap khilaf
 - e) Pembunuhan tidak langsung
 - f) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap penghalang baginya untuk mewarisi.
- 5) Selanjutnya Ulama Syiah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris adalah pembunuhan dengan ⁵sengaja, sedangkan pembunuhan yang hak, seperti halnya pembunuhan di medan perang, pelaksanaan hukuman mati, dan membela jiwa, harta, serta kehormatan ⁴tidak menjadi penghalang hak waris. Kelompok khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan ahli waris baik dengan sengaja atau pembunuhan sesuai hak tetapi tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Hal ini disebabkan perihal waris sudah terdapat ketentuannya di dalam al-quran, dan hadist tersebut di atas tidaklah cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat al-quran.

Secara teknis ketentuan tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapatkan hak waris diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

1 Alasan yang mendasari bahwa si pembunuh terhalang untuk mendapatkan hak waris dari yang dibunuhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya waris, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musabbabnya.
- 2) Mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak waris merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat Allah.

4 b. Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah salah satu alasan seseorang tidak mendapatkan hak waris. Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitupun sebaliknya seorang nonmuslim tidaklah dapat mewarisi dari seorang muslim. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang muslim.”

Para ahli hukum Islam (*Jumhur ulama*) sepakat bahwa orang nonmuslim (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam dengan dalih bahwa status orang nonmuslim lebih rendah dibandingkan dengan orang Islam. Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 14:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya.; dan baginya siksa yang menghinakan.”

5 Mengenai seorang Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang nonmuslim para ahli hukum Islam berbeda pandangan, secara umum pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) ⁵ Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris nonmuslim atau murtad. Pendapat ini juga terlebih dahulu dianut oleh para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usamah Ibnu Zaid, Jabir, dan Urwah. Di kalangan Ulama Muftahid pendapat ini juga di anut oleh Abu Hanifah, Malik, dan As-Syafii.
- 2) ⁵ Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang mendasari pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau *qiyas* kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Maidah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab). Dengan kata lain, kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris non muslim yang ahli kitab.

c. Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktik perbudakan, namun pada kenyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama serta sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl: 75:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Fakta sejarah menyebutkan bahwa perbudakan memanglah ada, bahkan bisa jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meskipun secara *de jure* eksistensi mereka sudah dianggap tidak ada. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta benda dan

telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan terdapat pandangan bahwa seorang budak itu adalah milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta benda peninggalannya, sebab ia sendiri dengan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, seorang budak dianggap tidaklah memiliki harta benda apapun.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya sebagai perbuatan yang mulia. Bahkan ketentuan di dalam Islam memerdekakan budak dijadikan sebagai *kafarat* (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, semisal bagi mereka yang membunuh dengan khilaf. Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan Islam agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

d. Berlainan Negara

Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai suatu Negara adalah apabila memiliki kepala Negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu yang dimaksud berlainan Negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut. Dalam hal berlainan Negara terdapat tiga kategori, yaitu: pertama, berlainan menurut hukumnya; kedua, berlainan menurut hakikatnya; ketiga, berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya.

Berlainan Negara antara sesama muslim, telah disepakati *fuqaha* hal ini tidak dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua Islam di Negara yang berbeda tetap memiliki kesatuan hukum yang sama meskipun berlainan sistem politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan Negara antara orang-orang yang non muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadist yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Maflum mukhalafahnya* bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berlainan Negara.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa perbedaan Negara menjadi penghalang mewarisi, sebab berbeda Negara antara orang non muslim berarti terputusnya *ishmah* (Kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun Negara dalam hakikatnya saja (muslim dan

muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.⁸ Maksudnya adalah bukan persoalan beda negaranya, jika beda negara namun sama-sama beragama Islam tetap memiliki hak waris, jika beda negara dan ternyata beda agama pula maka tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Jelas disini yang menjadi dasar adalah agama sama-sama Islam, bukan negaranya.

2. Karena Adanya Beberapa Kelompok yang Menjadi Penghalang Waris (Hijab dan Mahjub)

Pengertian hijab secara bahasa berarti *al-ma'u* (menghalangi, mencegah). Adapaun istilah adalah terhalangnya ahli waris oleh ahli waris yang lain karena ahli waris yang menghalangi itu lebih diutamakan kedudukannya dalam waris. Untuk itulah, haknya ahli waris yang lain dapat tertutup karena adalah ahli waris yang lebih utama tersebut.⁹ Menurut penulis, seseorang bisa menjadi ahli waris berdasarkan kedudukannya, namun masih ada ahli waris yang lebih utama dan memiliki kedudukan yang lebih dekat derajat pewarisannya dengan Pewaris (P) maka ahli waris itu bisa menghalangi ahli waris yang kedudukannya lebih jauh dengan Pewaris (P).

Adapun mahjub yakni karena ada ahli waris yang utama maka hak pusaka tertutupi oleh ahli waris yang lain. Hal ini artinya bagian yang awalnya besar bergeser mendapatkan bagian yang lebih kecil, atau kemungkinan bisa hilang keseluruhan. Untuk itulah hijab tersebut dibedakan menjadi dua macam:

a. Hijab Hirman

Hijab hirman, yaitu hak nya ahli waris hilang atau tertutup secara keseluruhan, disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, seperti saudara orang yang meninggal dunia terhibab (tertutup/terhalang) haknya jika meninggal dunia itu meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak. Demikian juga cucu jika terdapat anak laki-laki dari yang meninggal dunia.¹⁰ Artinya, yang dalam hukum waris biasa dikenal dengan adanya derajat dalam kekerabatan, maka dalam hal ini anak/cucu derajatnya lebih dekat

8 Sayid Sabiq, hlm. 427-428

9 Sayid Sabiq, *ibid.*, hlm. 440

10 Sayid Sabiq, *loc.cit.*, hlm. 440.

dengan Pewaris dibandingkan derajat kekerabatan antara saudara dengan Pewaris. Agar mudah memahami maka penulis, menguraikan dalam contoh singkat, sebagai berikut:

Seorang laki-laki bernama Joko menikah dengan Mawar, memiliki anak bernama Budi dan Bunga. Di sisi lain, Joko memiliki saudara sekandung, bernama Sulastri dan Jojon. Pada bulan Desember tahun 2017 Joko meninggal dunia. Maka, dalam hal ini Budi menghibah Sulastri dan Jojon. Hal ini menyebabkan Sulastri dan Jojon tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta waris dari Joko, karena hubungan kekerabatan Budi dan Bunga lebih dekat dengan Pewaris dibandingkan Sulastri dan Jojon. Dengan demikian, Ahli waris Joko adalah Mawar, Budi dan Bunga.

Dari seluruh kerabat yang tidak terhalang (terhibah) haknya kecuali jika ada penghalang sebagai berikut:

- 1) Suami atau isteri
- 2) Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
- 3) Ayah
- 4) Ibu

Secara lebih rinci ahli waris yang menjadi *mahjub* karena adanya *hijab hiirman*, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Kakek *mahjub* oleh bapak
- 2) Nenek garis ibu *mahjub* oleh ibu
- 3) Nenek garis bapak *mahjub* oleh bapak dan ibu
- 4) Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki
- 5) Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki)
- 6) Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki, dan
 - c) Bapak
- 7) Saudara sepapak laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki

11 Ibnu Rusdy, hlm. 493

- b) Cucu laki-laki
- c) Bapak
- d) Saudara kandung, dan
- e) Saudara kandung Perempuan beserta anak atau cucu perempuan
- 4 8) Saudara seibu laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Bapak, dan
 - d) Kakek
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Bapak, dan
 - d) Datuk
 - e) Saudara laki-laki sekandung, dan
 - f) Saudara laki-laki seapak
 - 4 g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - h) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
- 10) Anak laki-lakinya saudara laki-laki seapak *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Bapak
 - d) Datuk
 - e) Saudara laki-laki sekandung, dan
 - f) Saudara laki-laki seapak
 - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - h) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*
- 11) Paman sekandung *mahjub* oleh:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki

- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seapak
- g) Anak laki-laki saudara sekandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak, dan
- i) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*

12) Paman seapak *mahjub* oleh:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seapak
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Paman sekandung (dengan bapak)
- j) Paman seapak, dan
- k) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, dan
- l) Anak laki-laki dari paman seapak *mahjub* oleh 11 orang tersebut di atas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hubungan kekerabatan dalam hukum waris Islam menentukan seseorang² mendapatkan harta waris apa tidak, karena terhijab atau tidak oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Pewaris (P).

b. *Hijab Nuqshan*

Hijab Nuqshan yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut:¹²

12 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit. hlm 46-55

- 1) Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini suami bergeser bagiannya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan. (QS. An-Nissa' ayat 12)
- 2) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu hasil perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
- 3) Ibu jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
- 4) Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya menjadi $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada 2 anak perempuan atau dua anak laki-laki maka cucu perempuan tidak berhak/tertutup.
- 5) Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih atau saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.

Dalam hal ini, hak ahli waris menjadi berkurang disebabkan muncul ahli waris berikutnya yang memiliki kedudukan dalam derajat yang sama, sehingga yang bergeser bagiannya menjadi lebih kecil jika tidak ada ahli waris yang dalam derajat itu bagiannya tetap sesuai dengan ketentuan yang awal. Di sini, hukum waris Islam melihat bahwa seluruh ahli waris misalnya: suami dan anak maka sama-sama diutamakan dalam mendapatkan harta waris sehingga menjadikan bagiannya suami menjadi lebih sedikit jika dibandingkan suami itu tidak memiliki anak. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penjelasan diatas, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk contoh kasus sederhana. Misalnya: Budi dan Ani menikah, mereka memiliki anak bernama Wati dan Herman. Jika Ani meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah Budi, Wati dan Herman. Bagian yang diterima oleh Budi sebesar $\frac{1}{4}$ karena Ani memiliki anak. Jika Ani tidak memiliki anak maka Budi mendapatkan bagian sebanyak $\frac{1}{2}$.

BAB 4

KLASIFIKASI AHLI WARIS

A. Ahli Waris Dzawil Furudh

Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh adalah kelompok Ahli Waris (AW) yang tertentu bagian warisnya, seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.¹ Dzawil Furudh muncul di KHI dalam pasal 192 ketika membahas masalah aul yang terjadi apabila di antara ahli waris hanya meninggalkan ahli waris dzawil furudh. Ahli waris ini antara lain: janda dan duda, ayah dan anak perempuan menjadi ahli waris dzawil furudh selama tidak mewaris bersama anak laki-laki, ibu pada dasarnya juga merupakan ahli waris dzawil furudh.²

Adapun golongan yang memperoleh bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam Al-Qur'an pada kelompok ayat kewarisan inti/utama terdiri dari delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebut dalam hadits Rasulullah, sehingga menjadi 12 orang:

1. Anak perempuan
2. Bapak
3. Ibu
4. Janda
5. Duda
6. Saudara laki-laki seibu (dalam hal kalalah)
7. Saudara laki-laki dan saudara bersyirkah (dalam hal kalalah) seibu
8. Saudari (dalam hal kalalah)

1 Subchan Bashori. Op. cit , 67.

2 A. Azhar Basyir, *Laporan Seminar Hukum Waris bagi umat islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1977), hlm. 41

9. Cucu perempuan dari putra
10. Nenek
11. Kakek
12. Saudari seayah (Ahmad Azhar, 1981: 26)

Dengan demikian, Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh adalah Ahli Waris yang ketentuan bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur'an. Ahli Waris Dzawil Furudh merupakan bagian ahli waris yang diatur oleh Al-Qur'an, yaitu:

1. Ahli Waris Dzawil Furudh yang selalu menjadi Ahli Waris Dzawil Furudh. Misalnya: ibu, janda, duda.
2. Ahli Waris Dzawil Furudh yang bisa menjadi Ahli Waris Dzawil Furudh dan lain kali menjadi Ahli Waris Ashabah. Misalnya: anak, bapak & saudara wanita

Hak-hak atau bagian ahli waris Dzawil Furudh:

1. **Dzuwil Furudh yang Berhak Menerima Setengah (Nishf) Harta** Yakni:³
 - a. Suami, dia akan menerima 1/2 bagian dengan syarat tidak ada anak
 - b. Anak perempuan, dia menerima 1/2 bagian, dengan syarat:
 - 1) Tidak adanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, yakni anak laki-laki Pewaris;
 - 2) Tidak lebih dari satu orang anak perempuan.
 - c. Anak perempuannya anak laki-laki, syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bersama saudara laki-laki yang memperoleh bagian ashabah, yakni anak laki-lakinya anak laki-laki.
 - 2) dia hanya seorang diri.
 - 3) Tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki.

Hal yang menjadi dasar bahwa anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan 1/2 bagian yaitu kedudukannya bisa disamakan dengan anak perempuan, sedangkan anak perempuan bisa mendapatkan 1/2 bagian jika tidak ada anak laki-laki. Dalam Al-Qur'an disebutkan yang artinya:

3 Aunur rahim Faqih, Hlm. 116

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari hartanya ditinggalkan, jika ia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika ia (orang yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga, jika ia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4) ayat 11).⁴

- d. Saudara perempuan sekandung, ia akan memperoleh 1/2 bagian dengan syarat:
 - 1) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya ashabah.
 - 2) Dia sendirian (berjumlah satu orang).
 - 3) Pewaris sudah tidak memiliki lagi garis keturunan keatas yakni ayah atau kakek dan tidak memiliki garis keturunan kebawah yakni anak atau cucu, baik perempuan maupun laki-laki.
- e. Saudara perempuan seayah, ia akan mendapat bagian (setengah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara laki-laki yang memperoleh ashabah yakni saudara laki-laki seayah.
 - 2) Dia sendirian (berjumlah satu orang).
 - 3) Pewaris sudah tidak memiliki lagi garis keturunan keatas yakni ayah atau kakek dan tidak memiliki garis keturunan kebawah yakni anak atau cucu, baik perempuan maupun laki-laki.
 - 4) Tidak memiliki saudara perempuan sekandung.

4 Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm 32

Ketentuan ini berdasarkan ijma' para ulama dan Firman Allah SWT yang artinya:

"dan bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari separuh harta yang ditinggalkannya." (QS. An-Nisa' ayat 176).⁵

2. Dzuwul Furudh yang Berhak Menerima Seperempat (Rubu') Harta

Ahli waris memiliki hak menerima 1/4 bagian terdiri atas:

- a. Suami, yaitu akan memperoleh 1/4 bagian jika istrinya yang meninggal memiliki anak atau anaknya anak laki-laki, baik dari hasil perkawinannya dengan dia atau dengan suami lain dasarnya adalah ada dalam Al-Qur'an yang artinya: *jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat bagian dari harta yang ditinggalkannya. (QS. An-Nisa' ayat 12).*
- b. Istri, yakni dia akan memperoleh 1/4 bagian apabila suami tidak memiliki anak atau anaknya anak (cucu) terus garis keturunan kebawah, baik dari istrinya itu atau dari istri lain. Hal ini merujuk kepada Al-Qur'an yang artinya: *bagi istri mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (QS. An-Nisa' ayat 12).*

Perlu menjadi catatan bahwa bagi istri, baik seorang atau lebih tetap merupakan satu kesatuan. Jadi meskipun jumlahnya lebih dari satu maka bagiannya tetap tidak berubah, hal ini merujuk kepada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sebagai tersebut di atas, yang menggunakan bentuk jama'. Dari sisi lain, seandainya masing-masing istri diberi seperempat, sedang suami mempunyai empat orang istri, tentu mereka menghabiskan semua harta peninggalan suami. Oleh karena itu, seorang istri atau lebih, tetap bagiannya seperempat, tidak bertambah dari ketentuan yang telah ditetapkan lantaran bertambahnya jumlah istri.⁶

Hal ini penulis berpendapat bahwa bagian istri memperoleh 1/4 jika suami tidak memiliki anak. Istri disini, tidak hanya terbatas jika istrinya satu, jika istrinya lebih dari satupun tetap mendapatkan 1/4 jika suami memiliki anak. Jadi, misalnya istrinya satu maka istri tersebut

5 Kata "Ukhtun" disini mengandung arti saudara perempuan sekandung dan seayah saja. Mengenai saudara perempuan seibu, ia tidak selamanya mendapat 1/2, tetapi bisa juga mendapat 1/6 dengan sebagaimana tersebut di atas.

6 Aunur Rahim Faqih, hlm. 120

mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika suami tidak mempunyai anak, dan begitu pula jika istri jumlahnya 2, 3 atau 4 maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika suami tidak memiliki anak.

3. Dzuwul Furudh yang Berhak Menerima Seperdelapan (Tsumun) Harta

Seperdelapan¹ merupakan bagian seorang ahli waris dari beberapa ahli waris, yaitu **seorang istri atau lebih, dengan ketentuan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki**, baik diperoleh dari perkawinannya dengan istri itu atau dari istri lain. Firman Allah SWT. yang artinya:

“Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya.” (QS. An-Nisa’ ayat 12).

4. Dzuwul Furudh yang Berhak Menerima Dua Pertiga (Tsulutsani) Harta

Ahli waris yang berhak menerima bagian dua pertiga terdiri atas empat orang, yang semuanya adalah perempuan, yaitu berikut ini:

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah. Firman Allah SWT yang artinya:

“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa’ ayat 11).

- b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal.
- 2) Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang meninggal.
- 3) ¹ Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai ashabah, pengertian anak laki-laki dalam derajat mereka.

- c. Dua ¹ saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat:

- 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, atau tidak ada ayah atau kakek (tidak ada usul atau keturunannya).
- 2) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah, yaitu saudara laki-laki kandung.
- 3) Tidak ada anak perempuan atau beberapa anak perempuan atau anak laki-laki (cucu perempuan dari cucu laki-laki), baik seorang atau lebih. Allah SW berfirman yang artinya:

"Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal".
(QS. An-Nisa' ayat 176).

- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat:
 - 1) Tidak ada keturunan atau usul (anak-anak, ayah, kakek).
 - 2) Tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah, yaitu saudara laki-laki seayah.
 - 3) Tidak ada anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan anak laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.

5. Dzuwul Furudh yang Berhak Menerima Sepertiga (Tsulust) Harta
Ahli waris yang berhak menerima bagian 1/3 (sepertiga) terdiri atas dua orang, yaitu:

- a. Ibu, dengan syarat:
 - 1) orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - 2) orang yang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu yang dapat mewarisi sehingga menjadikannya terhijab.

Firman Allah SWT yang artinya:

". . . jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu dan bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."

- b. Beberapa Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat:
 - 1) tidak ada usul atau furu' (orang tua atau anak) yang disebut dengan kalalah.

Jumlah mereka dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan semua, atau satu laki-laki dan satu perempuan.

Firman Allah SWT yang artinya:

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu..." (QS. An-Nisa' ayat 12).

Pada dasarnya bagian ibu itu apabila ada bapak adalah 1/3 sebagaimana disebut dalam Al-Quran, surat An-Nisa' ayat 11 yang telah dijelaskan diatas. Namun demikian dalam hal ini, terdapat dua masalah, yang keduanya disebut Ummariyatani, karena telah diputuskan oleh Umar r.a. sesuai dengan pendapat jumhur sahabat terdapat hal tersebut, yang kemudian ditanamkan masalah gharawain.

6. Dzuwul Furudh yang Berhak Menerima Seperenam (Sudus) Harta

Sudus (seperenam) adalah fardhu bagi ketujuh orang waris, sebagai berikut:

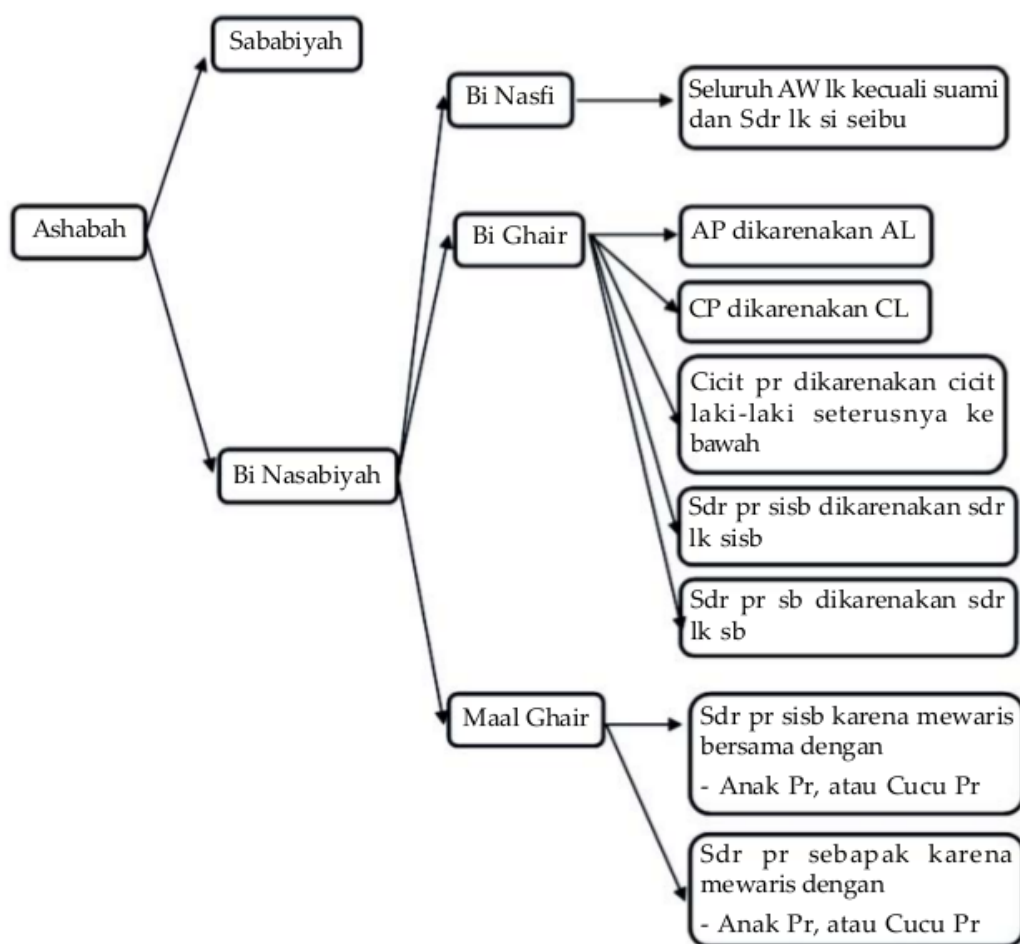
- a. Ayah, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
- b. Kakek sejati, jika yang meninggal itu meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah.
- c. Ibu, jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau dua orang dan seterusnya dari saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sekandung, seayah, atau, seibu.
- d. Nenek sejati, jika tidak ada ibu.
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang saja atau lebih bersama seorang anak perempuan kandung.
- f. Saudara perempuan seayah, seorang ataupun lebih bersama seorang saudara perempuan sekandung.
- g. Seorang anak ibu (saudara seibu), baik laki-laki ataupun juga perempuan.⁷

7 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit. hlm 116-123

B. Ashabah

Ahli Waris(AW) Ashabah adalah kelompok Ahli Waris (AW) yang hak warisnya tidak tertentu bagiannya sebagaimana Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh, tetapi bagiannya adalah menghabiskan seluruh Harta Waris (HW), atau seluruh sisa dari Harta Waris (HW) dikurangi bagian Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh, yaitu jika disamping ada Ahli Waris (AW) Ashabah juga ada Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh. Artinya apabila Ahli Waris (AW) yang ada terdiri dari Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh dan Ahli Waris (AW) Ashabah, maka Ahli Waris (AW) Dzawil Furudh diberikannya dahulu bagiannya, sisanya adalah hak Ahli Waris (AW) Ashabah.⁸

SKEMA ASHABAH



8 Subchan Bashori. Op. Cit., 72.

Ahli Waris (AW) Ashabah dapat dibedakan menjadi 3 golongan, sebagai berikut:⁹

1. Ashabah binnafsi.
2. Ashabah bil-ghoir.
3. Ashabah ma'al-ghoir.

Dalam buku Aunur Rahim Faqih, lafadz Ashabah merupakan bentuk jama' nya (Aashib) yaitu orang yang mempunyai hubungan ² darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau biasa disebut ahli waris mendapatkan harta yang sudah siap ² dibagikan kepada ahli waris atau biasa disebut harta waris, yang mana tidak ditentukan bagiannya dalam al-qur'an maupun hadis bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya tidak ada menyebutkan mendapatkan bagian 1/8, 1/4, 1/2 atau yang lainnya. Adapun ulama faraidhl mendefinisikan 'ashabah yakni ahli waris yang mendapatkan keseluruhan harta waris apabila menjadi ahli waris seorang diri dan mendapatkan sidanya. Ashabah furudh memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam aturan hukum mengenai faraidhl. Jika ahli waris meninggal dunia, merekalah yang menggantikan kedudukan ahli waris tersebut dan memiliki hak untuk mendapatkan semua bagiannya yang berupa harta waris tersebut, dan jika mereka menjadi ahli waris secara bersama dengan ahli waris yang mendapatkan bagian ⁴ ahli waris furudh, dengan demikian mereka akan memperoleh sisa ⁴ dari bagian yang telah diberikan kepada bagian ahli waris furudh. Tetapi jika harta waris tidak ada sisanya maka mereka tidak mendapatkan bagian.

Dalam pemecahan ⁴ sisa harta waris, ahli waris yang terdekat dengan Pewaris yang harus lebih diutamakan untuk mendapatkan harta waris. Dengan resiko, ahli waris yang memiliki derajat kekerabatan yang semakin jauh maka tidak mendapatkan bagian.¹⁰

Hal ini sesuai hadist Nabi SAW yang artinya:

"Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

⁹ Ibid., 73

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2007) hal. 99.

3

Ahli waris ashabah harus menanti sisa pembagian yang telah ditentukan bagiannya dari ahli waris atau biasa disebut ahli waris Dzul Faraid, dan keistimewaan ashabah iniia dapat menghabiskan seluruh harta waris yang ada, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya (ahli waris dzulfaraid) sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya.¹¹

Dalam hal hukum waris Islam, maka ashabah memiliki kemungkinan mendapatkan bagian yang lebih besar serta kedudukan ahli waris yang ashabah lebih diutamakan dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Jika yang ashabah masih hidup dan berhak menjadi ahli waris maka bisa menghalangi bagian ahli waris yang lain untuk menjadi ahli waris. Bahkan bisa jadi jika ada ahli waris yang ashabah maka ahli waris yang kedudukan kekerabatannya lebih jauh lagi dari Pewaris maka kemungkinan bisa mendapat sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian harta waris sama sekali.

1. Jenis-jenis Ashabah

3

Ashabah memiliki 2 jenis yakni ashabah nasabiah dan ashabah \ sababiyah. Ashabah Nasabiah yaitu yang menjadi ashabah-disebabkan adanya hubungan darah dengan si pewaris, sedangkan ashabah sababiah yaitu yang menjadi ashabah disebabkan adanya suatu sebab, misalnya pembebasan budak.¹² Artinya seorang ahli waris yang ashabah, memiliki dasar yang kuat kenapa dia dikatakan ahli waris ashabah harus memiliki dasar yang kuat apakah disebabkan karena nasab (keturunan) atau disebabkan pembebasan budak. Di sisi lain, ashabah nasabiah ada 3 jenis yaitu:

a. Ashabah bin nafsi

Ashabah bin nafsi (menjadi ashabah dengan sendirinya) adalah ahli waris laki-laki yang ketika dia mewaris tidak ada ahli waris perempuan, dan mereka menghabiskan semua sisa harta. Ahli waris ashabah bin nafsi terdiri dari empat kelompok keutamaan, mereka itu adalah:

- 1) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

11 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007) 1

12 Muhammad AliAsh-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris menurut-ajaran Islam*, (Surabaya, MutiaraIlmu, 2010), hal. 57-58

- 3) Saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki-seayah, anak-laki-laki dari saudara laki-laki/seayah seibu, saudara-laki-laki seayah\seterusnya kebawah. Jalur kesaudaraan terbatas pada saudara-saudara\laki-laki seayah-seibu dan saudara-saudara laki-laki seayah dan anak-anak laki-laki dari masing-masing. Adapun saudara-saudara-seibu, maka mereka adalah *ashabah furudh* (pewaris yang sudah ditetapkan bagiannya) dan tidak menjadi *ashabah*, karna mereka mempunyai-hubungan kerabat\melalui ibu.
- 4) Saudara lelaki-ayah seapak-seibu, saudar lelaki-ayah seapak, putera saudara lelaki-ayah seapak seibu dan putra saudara lelaki-ayah seapak dan seterusnya ke bawah.¹³

Dalam hal ini agar lebih mudah langsung penulis sampaikan contoh sederhananya, jika Pewaris meninggalkan Ahli Waris yaitu satu orang ayah dan satu anak laki-laki, maka ayahnya Pewaris mendapatkan bagian ¹ per enam dari harta waris dan sisanya (seluruh sisanya) akan diberikan kepada anak laki-lakinya Pewaris sebagai-bagian ahli waris *ashabah*. Dalam hal ini bapaknya Pewaris tidak mendapatkan *asshabah*, dikarenakan ada jalur *bunuwah* mendahului arah-*ubuwah*.¹⁴ Artinya anak laki-laki mendapatkan *ashabah* memiliki bagian yang lebih banyak, karena kedudukannya sebagai anak laki-laki lah dia (karena dirinya sendiri) dapat menjadi ahli waris.

Keempat jalur ahli waris *ashabah* ini mengandung makna skala prioritas untuk didahulukan sebagai *ashabah*, ketika pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki bersama ayah, maka hak menjadi *ashabah* jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan ³ ayah mendapat posisi sebagai ahli waris *dzawil furudh*. Jika setelah dibagikan kepada '*ashabul furudh* ternyata tidak memiliki sisa dari harta waris itu, maka para '*ashabah* pun tidak mendapat bagian.¹⁵

Jika-para '*ashaabah bin-nafsh* lebih dari 1 (satu) orang, maka cara penarjihannya (pengunggulnnya atau diutamakan) yakni:¹⁶

13 H. M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2013), ⁴l. 33

14 Aunur Rahim Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Mei 2017, hal. 106

15 *Ibid*, hal. 107.

16 *Ibid*, hal. 107.

1) Penarjihan dari segi arah

Jika terdapat kondisi dalam pembagian harta waris memiliki beberapa ahli waris *'ashabah bin nafsh*, maka yang diutamakan ditinjau dari segi arah. Yakni anak lebih didahulukan dibanding yang lain. Maka anak akan memperoleh seluruh harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris, atau akan memperoleh *ashabah* harta waris setelah diberikan kepada *'ashabul-furudh* sesuai dengan bagian masing-masing. Jika anak tidak ada maksudnya tidak ada adalah sudah meninggal, posisi anak yang telah meninggal dunia tadi akan digantikan oleh keturunannya dan seterusnya karena akan menggantikan posisi di atasnya jika yang di atasnya telah meninggal dunia.

Contohnya dalam kasus riil adalah jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: anak laki-laki, ayah dan saudara kandung. Maka, dalam kondisi seperti ini penyelesaian kasus adalah yang menjadi ahli waris *'ashabah* adalah anak laki-laki. Hal ini disebabkan ahli waris anak apalagi anak laki-laki lebih diutamakan dari pada ahli waris yang lain. Ahli waris ayah termasuk *'ashabul furudh* karena menjadi ahli waris secara bersama-sama dengan ahli waris anak laki-laki. Disisi lain, saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan harta waris disebabkan garis keturunan atau hubungan kekerabatan dengan pewaris lebih jauh dibandingkan anak laki-laki. Jadi dalam hal ini terjadi asas pergantian tempat bisa terjadi karena yang harusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia, yang mana harusnya menjadi ahli waris karena sudah meninggal maka tidak jadi menjadi ahli waris, sehingga diturunkan kepada anaknya (cucu pewaris).

2) Penarjihan secara derajat

Jika dalam sebuah kasus mengenai pembagian harta waris terdapat *'ashabah bin nafs*, selanjutnya mereka dalam hubungan kekerabatan derajat, maka penarjihannya melihat derajat para ahli waris, sehingga ahli waris yang memiliki hubungan derajat yang paling dekat dengan pewaris. Dalam hal ini jika ada kasus riil adalah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak dan cucu keturunan anak laki-laki. Maka hal ini penyelesaiannya adalah hak ahli waris secara

'*ashabah* diberikan kepada anak (karena anak masih hidup), sehingga cucu tidak mendapatkan bagian apapun dalam harta waris tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan anak lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris-dibandingkan dengan cucu laki-laki. Dalam hal ini, maka pewaris memiliki ahli waris anak sedangkan ahli waris anak masih ada (masih hidup) maka cucunya pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris dari pewaris, karena ahli waris anak masih ada sehingga tidak bisa dilakukan penggantian tempat.

3) Penarjihan berdasarkan kuatnya kekerabatan

Jika dalam sebuah kasus waris Islam maka pembagian waris terdapat banyak '*ashabah=bin=nafs* yang sama dalam arah dan derajatnya, sehingga penarjiannya akan mempertimbangkan manakah diantara ahli waris tersebut yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Misalnya, saudara seibu kedudukannya lebih kuat sebagai ahli waris dari pada seayah, paman seibu kedudukannya lebih kuat dari pada paman seayah, anak dari saudara seibu kedudukannya lebih kuat dari pada anak dari saudara seayah-dan seterusnya. Dalam hal ini hanya digunakan untuk kekerabatan saudara dan-arah paman. Sehingga disini, bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa mendapatkan harta waris atau berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatannya. Artinya seseorang yang kadang menjadi ahli waris bisa jadi dia tidak mendapatkan harta waris, jika hubungan kekerabatannya lebih jauh dengan pewaris serta yang lebih dekat dengan pewaris masih hidup (masih ada).

b. Ashabah bil ghair

Ashabah Bil Ghair (menjadi ashabah karena ada ahli waris yang lain) ialah ahli waris perempuan yang berkedudukan sebagai ahli waris dzawil furudh apabila mewaris bersama-sama ahli waris laki-laki maka mereka menjadi ashabah dan menghabiskan sisa harta. Ahli waris penerima '*ashabah bil ghair* mereka itu adalah:

- 1) Anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama-sama cucu laki-laki dari anak laki-laki.

- 3) Saudara perempuan sekandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah ketika mewaris bersama dengan saudara laki-laki seayah¹⁷

Ketentuan hal di atas sebagai salah satu acuan dalam melakukan penyelesaian kasus waris. Penjelasan di atas akan diuraikan sebagai berikut : jika ahli waris anak perempuan bersama-sama dengan ahli waris anak laki-laki, maka mereka mendapatkan harta waris yang berubah ashabah. Begitu pula berlaku untuk ahli waris cucu perempuan garis=laki-laki bersama ahli waris cucu=laki-laki garis laki-laki. Berlaku juga untuk ahli-waris saudara perempuan sekandung bersama ahli waris saudara laki-laki sekandung. Terakhir berlaku ashabah ahli waris saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Syarat-syarat 'ashabah bil ghair:¹⁸

- 1) Perempuan tersebut masuk menjadi ahli waris 'ashabah furudh (yakni ahli waris yang memiliki bagian tetap).

Ahli waris perempuan yang tidak tergolong 'ashabul furudh meskipun dia menjadi ahli waris bersama yang lain, tidak menjadi 'ashabah bil ghair. Contoh paling mudah adalah sebagai berikut: anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung tidak dapat dijadikan 'ashabah dengan saudara laki-laki sekandung. Hal itu disebabkan karna anak perempuannya saudara laki-laki sekandung tidak memperoleh bagian tetap sebagai ahli waris. Di sisi lain, saudara perempuan ayah-sekandung juga tidak dapat dijadikan 'ashabah dengan saudara laki-laki ayah sekandung. Hal itu disebabkan karena saudara perempuan ayah sekandung tidak memperoleh bagian tetap sebagai ahli waris.

- 2) Orang yang meng-ashabah-kan harus sama kedudukan dalam derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap ('ashabul furudh)

Untuk itulah, cucu perempuan dari anak laki-laki bila ia menjadi ahli waris secara bersama-sama dengan anak laki-laki, tidak dapat

17 3 hrawardi K. Lubis, Op. Cit. Hlm. 100

18 M. Thaha-Abul Ela-Khalifah, *Hukum-Waris*, (Cett. I Solo, TigaSerangkai, 2007) hlm. 409

menjadi 'ashabah bil ghair sebagaimana halnya saudara kandung jika bersama-sama anak laki-laki saudara kandung. Contohnya adalah saudara kandung mendapat bagian setengah dari seluruh harta waris, selanjutnya sisanya setengah diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara 'ashabah.

- 3) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan 'ashabul furudh dengan ashabahnyanya.

Perempuan sekandung yang mempunyai dua jurusan kekerabatan bila bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi 'ashabah=bil=ghair, kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki yang dapat menjadi 'ashabah bil ghair dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, bila ia dibutuhkan oleh cucu perempuan untuk mendapatkan harta warisan.¹⁹

- 4) Antara perempuan yang memiliki bagian tetap ('ashabul furudh) dengan orang yang meng-'ashabah-kan memiliki tingkatan dalam garis yang sama.

Untuk itulah, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang menjadi ahli waris bersama saudara kandung tidak menjadi 'ashabah=bil=ghair, disebabkan karena kedudukan=derajat mereka tidak sama. Anak perempuan dari anak laki-laki garisnya adalah buruwwah, sedangkan saudara seibu garisnya adalah ukhuwwah.

Adapun beberapa contoh dari 'ashabah bil ghair yakni:

- 1) Jika pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, anak-laki-laki, dan anak perempuan maka, ayah memperoleh 1/6 bagian sesuai ketentuan furudh, ibu memperoleh 1/6 bagian sesuai ketentuan furudh dan anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh sisanya sebagai 'ashabah dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kalilipat dari bagian perempuan.²⁰
- 2) Jika pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, ibu dan paman, maka bagian masing-masing ahli waris adalah anak perempuan memperoleh 1/2 bagian dari harta

¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Cet: III, Bandung, Pustaka Setia, 2006) hlm. 89-90

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 106

¹ warisan, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian berdasarkan urutan hubungan kekerabatan dan paman mendapatkan sisanya yakni 'ashabah.

- 3) Jika pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari 2 anak perempuan, isteri, dan paman, maka dalam hal ini bagian masing-masing ahli waris adalah dua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian merujuk kepada ketentuan furudh, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian berdasarkan ketentuan furudh, dan paman mendapatkan bagian yakni sisanya 'ashabah.

Hal yang tersebut diatas merupakan ahli waris ashabah bil ghair yang dapat digunakan untuk rujukan dalam penyelesaian kasus waris. Yang mana ketentuan mengenai ahli waris ashabah bil ghair memiliki bagian yang tidak sama dalam mendapatkan harta waris sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris dan hubungan kekerabatan dengan pewaris.

c. Ashabah ma'al ghair

Ashabah ma'al ghair adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris.²¹ Dalam hal ini maka keturunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai kedudukannya sebagai dzul faraidh dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Ashabah ma'al ghair ini diterima ahli waris:

- 1) Saudara perempuan seayah (satu orang atau lebih) bersama-sama dengan anak atau cucu perempuan (satu orang atau lebih). Contohnya adalah sebagai berikut: jika seseorang meninggal dunia maka disebut (pewaris), memiliki ahli waris yang terdiri dari satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan garis laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah. Untuk itulah bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut: satu orang anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, cucu perempuan garis laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, dan dua orang saudara perempuan seayah memperoleh 'ashabah.²²
- 2) Saudara perempuan sekandung (satu orang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (satu orang atau lebih), atau

²¹ ³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 62

²² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op.Cit*,m hal. 62-65

³ bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (satu orang atau lebih). Contohnya, jika seseorang meninggalkan ahli warisnya yakni terdiri dari satu orang anak perempuan, saudara perempuan dan ibu. Maka, bagian ahli waris sebagai berikut: anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 dari harta waris, saudara perempuan sekandung mendapatkan 'ashabah dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta waris.

Di sisi lain saudara perempuan seapak ³ menjadi 'ashabah bersama anak perempuan. Ia menjadi sama kekuatannya dengan saudara laki-laki seayah dan menutup anak laki-laki dari saudara laki-laki dan yang sesudah mereka.²³ Bahwa 'ashabah maal ghair memiliki dua kondisi dalam warisan:

- 1) Ia tidak mewarisi apapun. Hal itu terjadi jika seluruh harta warisan telah habis dibagikan kepada 'ashabul furudh.²⁴
- 2) Ia mewarisi apa yang tersisa setelah 'ashabul furudh.

Jadi yang menjadi Ashabah ma'al ghair hanya terjadi jika ahli waris ³ saudara perempuan seibu atau seayah mewarisi secara bersama-sama anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya. Jika saudara perempuan ayah seibu menjadi 'ashabah bersama saudara lainnya maka mereka seperti saudara laki-laki seayah maupun seibu. Untuk itulah ia menutupi saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan yang menutup 'ashabah yang derajatnya dibawah mereka seperti halnya anak-anak laki-laki dan saudara laki-laki serta paman seayah seibu atau seayah.

³ 2. Perbedaan Ashabah bin Nafsi dan Ashabah Ma'al Ghair

Ashabah bin nafsi adalah setiap perempuan yang mempunyai bagian tetap (ashabul furudh) kemudian mendapatkan ashabah dengan saudaranya. Misalnya, anak perempuan dengan anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Ketentuan hukum warisannya adalah seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kalilipat bagian perempuan.

Adapun *Ashabah maal ghair* adalah ashabah yang diperoleh saudara perempuan dengan anak perempuan. Ketentuan hukum warisnya adalah

²³ M. Thaha Abul Ela Khalifah, Op.Cit., hal. 412

²⁴ Dian Khairul Umam, Op. Cit., hal. 94-95

3 saudara-saudara perempuan mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian tetap (ashabul furudh). Dari ketentuan ini dapat diketahui letak perbedaannya, yaitu dalam *ashabah maal ghair*, selalu ada orang-orang yang memperoleh ashabah dengan dirinya sendiri, yaitu anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Adapun dalam *ashabah maal ghair* tidak ada orang lain (ahli waris) yang mendapat ashabah dengan sendiri.

Dalam Syarah Syirajiyah dijelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni:

3 a. Segi penerimaan pusaka

Ashabah bil ghair baik orang yang di ashabahkan maupun 3 muasibnya, bersama-sama menerima bagian dari harta waris sebagai ashabah dari ashabul furud, atau seluruh harta peninggalan jika seluruh ahli warisnya ashabah saja, dengan ketentuan, laki-laki mendapat bagian dua kalilipat bagian perempuan.

3 b. Segi mu'asib-nya

Muasib ashabah bil ghair yaitu para ashabah binnafsi, contohnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara sekandung atau seayah.

3 Di sisi lain ashabah ma'al ghair, muasibnya tidak turut menerima usubah. Ia hanya diminta untuk meng-ashabahkan saja. Yakni, ia menduduki fungsinya sebagai ashabul furud.²⁵

Ashabah sababiyah adalah ashabah muncul karena telah memerdekakan budak. Nabi Muhammad SAW bersabda: "hak ke tuanan itu milik orang memerdekakannya". Orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak boleh menjadi ahli waris, kecuali apabila yang bekas budak itu tidak meninggalkan orang yang terasuk ashabah nasabiyah. Dari Abdullah bin Syaddah dari putri Hamzah, ia berkata: bekas budakku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri, maka Rasulullah SAW membagi harta peninggalannya kepada kami dan kepada putrinya, yaitu beliau menetapkan separuh untukku dan separuhnya lagi untuk dia.

25 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit. hlm 116-123

BAB 5

PIHAK YANG MASIH BERHAK ATAS WARIS

A. Pengertian Ahli Waris Dzawil Arham

Pengertian *dzawil arham* secara umum mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ashhabul-furud*, *ashabah*, maupun golongan lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa *dzawil arham* adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Quran dan Sunnah, serta bukan termasuk *ashabah*.¹ Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan tidak mewarisi melalui *furudh* dan *ta'shib*, dia termasuk *dzawil arham*. Adapun rumpun-rumpun atau kelompok yang termasuk *dzawil arham* adalah:

1. Anak turunya anak-anak si pewaris (cucu-cucu) yang tidak termasuk *ashhabul furud* dan *ashabah*.
2. Kakek *ghairu shahih* dan nenek-nenek *ghairu-sahih*.
3. Anak turunya saudara-saudari yang tidak termasuk *ashhabul furud* dan *ashabah*.
4. Anak turunya kakek dan nenek. Kemudian turunan kakek dan nenek ini di bagi masing-masing kedalam enam kelompok, yaitu :
 - a. 'Am-'am seibu, 'ammah-'ammah, khal-khal, dan khalah-khalah baik sekandung maupun seayah bagi si pewaris. ('Am sekandung atau seayah adalah *ashabah*).

1 Ibid., hal. 127.

- b. Anak-anak turunan mereka, anak-anak perempuan 'am sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan anak-anak orang yang terakhir ini.
- c. Orang-orang seperti tersebut dalam kelompok pertama bagi ayah atau ibunya si pewaris.
- d. Anak-anak turun sebagaimana tersebut nomor 2 bagi kelompok ke 3.
- e. Orang-orang seperti tersebut dalam kelompok ke 1 bagi ayahnya ayah si pewaris.
- f. Anak-anak turun sebagaimana tersebut bagi kelompok ke 5.

Adapun syarat agar dzawil arham menerima harta warisan adalah ketika sudah tidak ada ashabul furudh atau ashabah sama sekali. Jika masih ada seorang saja dari ashabul furudh atau asabah maka para dzawil arham ini tidak mendapatkan harta warisan, karena jika para ashabul furudh tidak sampai menghabiskan harta warisan maka sisa harta warisan tersebut harus dikembalikan kepada ashabul furudh.

Bersama dengan salah seorang suami atau istri, jika suami atau istri yang menjadi ahli waris bersama dengan dzawil arham maka suami istri mengambil lebih dahulu bagian warisnya yang sudah ditentukan lebih dahulu. Kemudian sisanya diserahkan pada dzawil arham. Adapun pendapat jumhur fuqoha tentang bagian dan cara membagikan ke warisan dzawil arham adalah bila dzawil arham hanya seorang diri baik laki-laki ataupun perempuan maka menerima seluruh harta warisan, atau seluruh dari harta warisan yang sudah diambil untuk bagian suami atau istri.

Seluruh dzawil arham yang ada di waktu meninggalnya pewaris berapun banyak jumlah mereka akan menerima bagian yang sama tanpa memandang dekat atau jauhnya derajat. Jadi dzawil arham ini tidak ditentukan bagiannya masing-masing akan tetapi mereka berbagi bersama rata.²

Dengan demikian pengertian lengkap dari *dzawil arham* dalam tradisi patrilinealisme ialah:³

1. Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris.
2. Bukan termasuk *dzawil furudh* dan *ashabah* dan (jenisnya).

² 5 Ilia Muthiah., Op.Cit. hlm 165

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Gajah Mada University Press. 2017. hlm 51

3. Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan² an digaris bapak dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan).
4. Ahli waris yang termasuk dzawil arham ini tertutup selama masih ada kelompok dzawil furudh dan ashabah.

Keluasan arti dzawil arham yang didasarkan kepada pengertian lafadh *ulul arham* yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya:

“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat)” di dalam kitab Allah (QS. Al-Anfal ayat 75).

Pengertian dzawil arham secara umum mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan ashabul furudh, ashabah, maupun golongan lain. Demikian para ulama faraidh mengkhususkan pengertian dzawil arham kepada para ahli waris selain ashabul furudh dan ashabah, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa menurut istilah dzawil arham adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Quran dan Sunnah serta bukan termasuk ashabah. Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan tidak mewarisi melalui furudh dan ta'shib, dia termasuk dzawil arham misalnya saudara perempuan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya.

Mengenai kepusakaan dzawil arham para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan apakah dzawil arham dapat mempusakai atau tidak terhadap sisa harta peninggalan dari para ahli waris ashabul furudh yang tidak bisa menerima radd atau terhadap semua harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama sekali. Golongan pertama, didasarkan atas pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Malik, serta golongan sahabat diantaranya Zaid bin tsabit ibnu abbas r.a, Al-Auza'i, dan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa dzawil arham tidak dapat mewarisi sama sekali. Apabila tidak ada ahli waris ashabul furudh atau ashabah, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal.

Para fuqaha yang menolak kewarisan dzawil arham memperkuat pendapatnya dengan beberapa alasan sebagai berikut:⁴

1. Prinsip dalam pembagian harta waris adalah harus ada dasar dari nash yang qhat'i (Al-Quran dan Hadist), untuk masalah besar kecilnya bagian yang diperoleh oleh ahli waris dzawil arham sama sekali tidak terdapat penjelasannya. Untuk itulah, jika memberikan bagian waris kepada mereka tanpa adanya nash yang jelas berarti menambah ketentuan hukum baru dan hal ini merupakan kebathilan. Untuk itulah, jika memberikan bagian waris kepada mereka tanpa adanya nash yang jelas berarti menambah ketentuan hukum baru dan hal ini merupakan kebathilan.
2. Alasan kedua didasarkan kepada Hadist Nabi yang diceritakan oleh Atha bin Yasar, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "sesungguhnya Rosulullah SAW mengenakan jubah (pakaian luar) untuk beristikharah (minta petunjuk baik) kepada Allah SWT tentang pusaka paman dan bibi, kemudian Allah SWT memberikan petunjuk bahwa keduanya tidak ada hak pusaka" (HR. Sa'ad dalam musnadnya).

3. Apabila diserahkan ke baitul mal, harta pusaka itu akan mendatangkan manfaat yang banyak, dan seluruh kaum-kaum muslimin berhak memilikinya. Hal ini berbeda bila harta itu diberikan kepada dzawil arham karena kemanfaatannya kecil dan faedahnya hanya terbatas kepada mereka saja, sedangkan orang lain tidaklah berhak.

Golongan⁴ kedua terdiri dari para sahabat yaitu empat *khulafaur rasyidin* dan Ibnu Abbas. Golongan *tabi'in* terdiri dari Syuraih Al-Qadi, Ibnu sirin, Atha', dan Mujahid. Kemudian Imam Madzhab (Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbali). Pendapat golongan kedua ini adalah bahwa dzawil arham memiliki hak untuk mewarisi harta waris milik Pewaris apabila tidak ada ahli waris ashabul furudh dan ashabah. Berdasarkan apa yang mereka sampaikan tersebut di atas bahwa ahli waris dzawil arham lebih memiliki hak dalam mendapatkan harta waris dari pada ahli waris yang lainnya karena jalur kekerabatan dan ahli waris dzawil arham harus didahulukan dari pada baitul mal yang diperuntukkan kepada semua kaum muslimin.

4 Aumur Rahim Faqih, *Mawaris.*, UII Press, 2017, hlm 128

Alasan yang dikemukakan oleh empat *khulafaur rasyiddin* dan Ibnu Abbas dalam memperkuat pendapatnya yakni sebagai berikut:

1. Firman Allah yang menjelaskan bahwa sebagian kerabat itu lebih utama mewarisi harta peninggalan sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah SWT.
2. Menurut riwayat Ahmad bahwa Abu Ubaidah, Al-Jarrah pernah mengirimkan sepucuk surat kepada Sayyidina Umar r.a, yang menanyakan siapa pewaris Sahal bin Hanif yang telah mati terbunuh dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris selain saudara ibunya. Umar r.a menjawab:

“sesungguhnya saya mendengar Rosulullah SAW bersabda, paman itu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris”. (HR. Tirmizdi).

3. Dalam suatu riwayat diterangkan bahwa ketika peristiwa kematian Sabit bin Ad-Dahdah yang tidak meninggalkan seorang pun ahli waris ashabul furudh maupun ashabah, selain anak laki-laknya saudara perempuan yang bernama Abu Lubabah, Rosulullah SAW menanyakan kepada Ashim tentang siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya. Nabi bertanya:

Apakah kamu mengetahui seorang nasabnya? “Ashim menjawab, “sebenarnya ia adalah orang asing dan kami tidak mengenal keluarganya, selain anak laki-laki saudaranya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir”. Setelah mendengar jawaban tersebut, Rosulullah menyerahkan harta pusaka Sabit kepada Abu Lubabah”. (HR Abu Ubaid).

4. Golongan ini juga mengambil dalil akal dengan mengatakan bahwa dzawil arham lebih berhak mewarisi dari pada baitul mal, sebab baitul mal itu mengikat si pewaris dengan ikatan Islam, dengan artian harus sama-sama muslim, sedangkan dzawil arham diikat dengan dua ikatan, yaitu ikatan Islam dan rahim. Orang yang mempunyai hubungan kerabat dari dua jihat (arah) lebih kuat dari pada orang yang mempunyai kekerabatan hanya satu jihat. Misalnya saudara laki-laki kandung apabila berkumpul dengan saudara laki-laki seayah, maka semua harta diberikan kepada saudara laki-laki seayah karena kekerabatannya dari dua jihat, yaitu jihat ayah dan jihat ibu. Demikian juga dengan dzawil arham.

B. Cara Pembagian Waris Dzawil Arham

Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai cara pembagian harta warisan kepada dzawil arham. Dalam hal ini terdapat tiga golongan, yakni di antaranya adalah:

1. Madzhab Ahlur rahim

Asas Ar-Rahim adalah suatu asas dalam membagikan harta pusaka kepada dzawil arham atas dasar pengertian kerabat secara umum yang dapat ditetapkan dan mencakup kepada seluruh dzawil arham tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dan tidak mengutamakan salah satu rumpun dari rumpun lainnya karena dekatnya atau kuatnya kekerabatan mereka, tanpa membedakan antara yang dekat dengan yang jauh, antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut mereka tiap tiap orang yang dzawil arham berhak mewarisi, karena penyebab mereka mewarisi adalah hubungan rahim. Hal ini terpenuhi bagi seluruh dzawil arham. Oleh karenanya pemberian warisan diberikan kepada mereka dengan sama rata.

Madzhab ini disebut sebagai madzhab ahlur rahim karena mereka tidak membedakan antara seseorang dari ahli waris dalam pembagian dan tidak memperhatikan kekuatan atau kelemahan kerabat. Madzhab ahlur rahim mendasari alasannya dengan suatu analisis bahwa nash-nash yang mengharuskan adanya perbedaan penerimaan antara ashabul furudh dan ashabah adalah peninjauan dari segi jihat, derajat, dan kuatnya kekerabatan. Tidak ada nash yang mengatur pusaka dzawil arham dari segi peninjauan ini. Oleh karena itu, hak pusaka mereka harus ditinjau dari keumuman firman Allah SWT Surat Al-Anfal: 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal ayat 75).

Baik kerabat yang dekat maupun yang jauh, laki-laki maupun perempuan, semuanya mencakup arti umum lafadz arham pada ayat tersebut. Oleh karenanya tidak layak diadakan perbedaan satu dan lainnya.

Mengenai ketentuan dan cara memberikan pusaka kepada dzawil arham tidak memandang derajat dan kuatnya kerabat, selama masih dalam ikatan kekerabatan maka dzawil arham akan saling mewarisi. Seluruh harta peninggalan langsung dibagi secara sama rata antara dzawil arham dari berbagai rumpun selama mereka semua mempunyai asas umum yang sama sebagai dzawil arham.

2. Madzhab Ahlu-At-tanzil

Pengertian At-Tanzil: Madzhabat-tanzil ini menganut asas pembagian harta pusaka kepada ahli waris dzawil arham dengan seabadanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal dan menggantikannya sekiranya ia masih hidup. Jika derajat dzawil arham tersebut sudah jauh hendaklah bergeser naik atau turun hingga mencapai ahli waris yang menjadikan sebab untuk digantikan bagiannya. Madzhab ini adalah madzhab Imam Ahmad yang diikuti oleh ulama mutakhir dari kalangan ahli hukum Islam golongan Syafi'iyah dan Malikiyyah.

Dasar hukum yang dikemukakan ulama mengenai pembagian sebab pertalian nasab adalah sebagai berikut:

- a. Asar sahabat yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakha'I dari Ali bin Abibdillah mengenai masalah seorang pewaris yang meninggalkan ahli waris dzawil arham, amah, dan khalah berikut:

"Harta peninggalan untuk keduanya dibagi tiga. Dua pertiga untuk amah dan sepertiga nya untuk khalah. Ammah diberi dua pertiga bagian karena ia dipertalikan nasabnya dengan yang telah meninggal melalui bapak sehingga ia dapat menempati tempat bapak. Khalah hanya diberi bagian pertiga, karena pertalian nasabnya dengan orang yang meninggal lewat ibu sehingga bagiannya sebanyak bagian yang diterima ibu sekiranya ibunya masih hidup."

- b. Suatu riwayat yang dinukilkan dari Sayyidina Ali:

"Beliau menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan ketempat anak perempuan, anak perempuan saudara ke tempat saudara, anak perempuan saudari ke tempat saudari, saudari ayah ke tempat ayah, dan saudari ibu ke tempat ibu".

3. Madzhab Ahlul Qarabah

a. Pengertian Ahlul Qarabah.

Yang dimaksud dengan madzhab Al-qarabah adalah asas dalam membagikan harta waris kepada ahli waris dzawil arham dengan dasar kedekatan hubungan nasab antara ahli waris dzawil arham dengan pewaris. Ahli waris dzawil arham yang memiliki hubungan dekat dengan si pewaris akan terlebih dahulu menerima harta peninggalan dari pada ahli waris dzawil arham dengan kekerabatan yang jauh.

b. Cara pemberian harta waris kepada ahli waris dzawil arham.

Susunan ahli waris dzawil arham terdiri dari empat rumpun yang berbeda-beda tingkatannya. Ahli waris dzawil arham yang tergolong dalam kekerabatan pertama harus didahulukan daripada kekerabatan yang kedua, begitu seterusnya. Untuk memudahkan pembagian harta waris maka menurut madzhab ahlul qarabah berikut dituliskan secara urutan empat rumpun yang dimaksud.

c. Cara membagi harta warisan Dzawil Arham

- 1) Jika ahli waris dzawil arham yang akan menerima bagian itu hanya seorang diri, maka seluruh sisa harta yang sudah dibagikan kepada ashabul furudh suami dan istri, dibagikan kepada dzawil arham semua.
- 2) Jika ahli waris dzawil arham lebih dari seorang, maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu:
 - a) Apakah mereka semua berasal dari rumpun yang berbeda-beda. Jika mereka berasal dari rumpun yang berbeda, maka yang berasal dari rumpun yang pertama harus didahulukan dari pada rumpun yang kedua dan begitu pun seterusnya sesuai dengan rumpun yang sudah diurutkan di atas.
 - b) Klasifikasi kedua apakah dia berasal dari satu rumpun, tetapi berbeda derajat, kekuatan kerabat, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahan masalahnya sebagai berikut:
 - Apabila derajat mereka tidak sama, harus diutamakan mereka yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris.
 - Apabila derajatnya sama, harus didahulukan mereka yang lebih kuat kekerabatannya.

- Apabila derajat dan kekuatannya sama, mereka berserikat dalam menerima seluruh atau sisa harta peninggalan. Apabila mereka terdiri atas laki-laki atau perempuan saja, maka mereka akan menerima sama banyaknya. Apabila mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki akan menerima dua kali lipat dari perempuan.

Dalam patrinalisme *dzawil arham* ini merupakan golongan ketiga. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja, sebagai kebalikan dari pengertian *ashabah* yang khusus dihubungkan dengan garis laki-laki. Kalau dilihat dari orang yang termasuk dalam *dzawil arham*, maka mereka cukup sulit untuk bisa menerima warisan dari keluarganya yang meninggal. Kalaupun ada bagiannya sangat sedikit.

Sementara itu dalam tradisi bilateral kelompok ketiga dikenal dengan nama "*mawaliu*" yaitu ahli waris karena penggantian. Dalam artian sebagaimana dijelaskan Hazairin (Hazairin, 1982:3) yaitu:

Orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubungan antara mereka dengan si pewaris. Ahli warisnya lainnya yang bukan mawali ialah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si pewaris.

Contoh kasus untuk mawali ini seperti, cucu yang langsung menjadi ahli waris karena bapak atau ibu cucu tersebut telah meninggal duluan dari pewaris.⁵

Kemudian dengan memberikan interpretasi terhadap bunyi QS. An-Nisa' (4):33, Hazairin mengklasifikasikan mawali atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris.
- b. Mawali dalam bentuk saudara pewaris.
- c. Mawali dalam bentuk keturunan tolan seperjanjian.

Mawali dalam bentuk pertama, terjadi kalau pewaris memiliki anak A (baik laki-laki maupun perempuan), tetapi anak tersebut meninggal sebelum pewaris meninggal, dengan demikian harta warisan yang semestinya jatuh pada anak (yang meninggal dulu) pewaris menjadi hak dari cucu pewaris tersebut.

5 Ibid., 52.

Sedangkan dalam kasus *mawali* tolan seperjanjian yaitu bilamana pewaris pada masa hidupnya mempunyai perjanjian dengan seseorang dalam bentuk wasiat. Namun karena orang yang punya perjanjian itu meninggal terlebih dahulu, maka harta peninggalan pewaris yang semestinya jatuh pada orang itu menjadi jatuh pada anak keturunannya.

C. Pihak di Luar Ahli Waris Dzawil Arham

Apabila Ahli Waris (AW) dari Pewaris (P) tidak ada, sementara Dzawil Arham juga tidak ada, maka masih ada beberapa pihak yang bisa diberi bagian waris, sebagai berikut:⁶

1. Budak yang dimerdekakan.
2. Orang yang meng-Islamkan Pewaris (P).
3. Orang yang diikrarkan Nasab kepadanya.
4. Baitulmal.
5. Warganya/Kaumnya.

6 Ibid., 108.

BAB 6

KETENTUAN KHUSUS

A. Pengertian Aul

Aul menurut bahasa berarti mengangkat atau bertambah. Selain itu menurut ilmu Faraidh, Aul adalah menambah atau menaikkan angka penyebut dari bagian tiap Ahli Waris (AW) sesuai dengan angka pembilang, yaitu terjadi ketika Ahli Waris yang ada seluruhnya Dzawil Furudh, tak adanya ahli waris Ashabah, dan jumlah bagian ahli waris lain melebihi jumlah waris, atau angka pembilang pembagian waris lebih besar dari angka penyebutnya. Dalam hal ini demikian angka penyebut perlu dinaikkan atau ditambah sehingga sama dengan angka pembilang. Inilah yang dimaksud dengan Aul. Dengan dilakukan Aul, porsi penerimaan tiap ahli waris menjadi berkurang sehingga harta waris mencukupi serta terbagi habis.¹ Hal ini dapat disamakan dengan orang yang dinyatakan wanprestasi atau jatuh pailit. Apabila harta yang dimiliki tidak memenuhi untuk membayar semua hutang, para kreditur hanya akan memperoleh pembayaran sebanyak harta yang ada. Apabila kreditur lebih dari satu orang, semua akan memperoleh pelunasan maupun pengembalian hutang dari harta yang sesuai dengan perbandingan piutang mereka.²

Masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterimanya, yaitu sebagai berikut:

Suami mestinya $\frac{3}{6}$ akan tetapi menjadi $\frac{3}{8}$

Ibu semestinya $\frac{1}{6}$ akan tetapi menjadi $\frac{1}{8}$

¹ Ibid., hal. 79

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Uji Press, Yogyakarta, 2013, hal. 25

Sdr pr sekandung $\frac{3}{6}$ akan tetapi menjadi $\frac{3}{8}$

Sdr pr sb $\frac{1}{6}$ akan tetapi menjadi $\frac{1}{8}$

Contoh: A meninggal dan meninggalkan Ahli Waris (AW):

Suami	$\frac{1}{2}$
Ibu	$\frac{1}{6}$
Sdr perempuan seibu	$\frac{1}{6}$
Sdr perempuan seapak	$\frac{1}{2}$

AW	Bagian	AM	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{8}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{8}$
Sdr pr seibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{8}$
Sdr pr seapak	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{8}$

Dalam posisi kasus seperti ini biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan, dan sekaligus menimbulkan permasalahan, yaitu siapa yang lebih diprioritaskan dari para ahli waris tersebut.³

Akan tetapi, pengurangan perolehan harta waris bagi masing-masing ahli waris tersebut dirasa masih tetap proposional, sehingga dipandang lebih adil daripada jika diselesaikan dengan rumus penyelesaian pembagian waris seperti biasa, sebab jika dikerjakan seperti biasa, maka akan ada ahli waris yang dirugikan, sementara ahli waris yang lain diuntungkan.⁴

Keterangan:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena istri yang meninggal (istri sebagai pewaris) tidak ada anak, cucu (baik laki-laki maupun perempuan)
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian karena saudara lebih dari 1 orang (>1)
3. 1 sdr pr seibu seapak mendapat setengah karena hanya 1 orang
4. 1 sdr pr seapak mendapat $\frac{1}{6}$ karena mewaris bersama dengan 1 orang saudara perempuan seibu seapak.

3 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 155

4 *Ibid.*

Moh. muhibbin, dalam bukunya, Aul menurut bahasa (etimologi) ialah *irtifa'* (mengangkat). Disebut *'alal mizaan* bila timbangan itu naik, terangkat. Kata Aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang) artinya ini ditunjukkan dalam firman Allah Surat Al-Nisa' ayat 3 yang artinya adalah "*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (curang)*".

Sedangkan menurut terminologi (istilah) Aul adalah bertambahnya jumlah bagian yang telah ditentukan dan berkurangnya masing-masing ahli waris atau bertambahnya saham dzawil furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Pada masa Rasulullah dan kekhalifahan Abu bakar Ashshiddiq, peristiwa Aul belum pernah terjadi. Aul pertama kali terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khatthab.

Di dalam sejarah dijelaskan bahwa orang yang pertama kali melakukan aul adalah Umar bin Khatthab. Ketika itu, ilmu faraidh sedang berkembang dan setiap orang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pada suatu hari khalifah Umar bin Khatthab didatangi oleh seorang sahabat yang menanyakan tentang kematian seseorang ketika ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara sekandung.

Menurut ketentuan yang berlaku, seorang suami mendapatkan bagian 1/2 (setengah) dan dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian 2/3 (duapertiga). Dengan demikian jumlah bagian masing-masing melebihi harta peninggalan Umar bin Khatthab semula bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan dan siapakah yang harus diakhirkan menurut ketentuan hukum Allah. Dia berkata, kepada para sahabat yang ada disisinya yang artinya adalah:⁵ "*jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain*".

Maka berilah aku perimbangan, lalu Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang memberikan pertimbangan dan pemikiran itu adalah Zaid bin Tsabit dengan cara aul.

Adapun cara penyelesaian masalah aul yaitu dengan mengetahui pokok, yakni yang menimbulkan masalah dan mengetahui saham setiap

5 Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016, hl.125

ashabul furudh lalu dengan menambahkan pokoknya. Kemudian bagian-bagian ahli waris dikumpulkan dan dijadikan sebagai pokok, lalu harta warisan dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan itu. Sehingga, akan terjadi kekurangan bagi setiap orang ahli waris sesuai dengan sahamnya dalam masalah ini tidak ada kedzaliman atau kecurangan. Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung maka asal masalahnya adalah enam, untuk suamisetengah, yaitu tiga, dan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, yaitu empat, jumlahnya menjadi tujuh. Tujuh itulah yang dijadikan dasar sebagai pembagian harta waris.⁶

B. Radd

Kebalikan dari *Aul* adalah *Radd*. *Radd* menurut bahasa berarti mengembalikan atau memulangkan kembali. Dan menurut ilmu *Faraidh*, *Radd* adalah membagi lagi harta waris yang masih tersisa secara proporsional kepada ahli waris *Dzawil Furudh*, karena angka pembilang pembagian waris lebih kecil dari angka penyebutnya. Dengan kata lain harta waris masih sisa, sementara ahli waris *ashabah* atau ahli waris *Dzawil Furudh* yang lain tidak ada, maka sisa harta waris tersebut dapat dikembalikan (dibagikan lagi) kepada ahli waris secara proporsional. Inilah yang dikenal dengan *Radd*.⁷

Kata *radd* secara bahasa (etimologi) berarti mengembalikan. Dikatakan ia mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata *radd* juga berarti memulangkan kembali. Dikatakan ia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Sedangkan *Radd* menurut istilah (terminology) adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawul furudh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, *radd* merupakan kebalikan dari *aul*. Apabila harta peninggalan masih mempunyai kelebihan setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan *ashabah*, kelebihan harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada menurut pembagiannya masing-masing.

6 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 126

7 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Op. cit, hal. 130

Adapun rukun-rukun Radd, di antaranya ialah *Radd* tidak akan terjadi, kecuali bila ada tiga rukun:

1. tidak adanya ahli waris *ashabah*;⁸
2. adanya pemilik *faradh* (*shahibul fardh*);
3. adanya sisa peninggalan.

Pendapat Para Ulama Fuqaha mengenai Radd, tidak ada *nash* maupun dalil yang menjadi rujukan mengenai masalah *radd*. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang *radd* ini. Menurut Zaid bin Tsabit, apabila tidak ada ahli waris *ashabah*, maka kelebihan dalam pembagian harta peninggalan (*radd*) tidak diberikan kepada seorang pun di antara *ashabul furudh*, tetapi diserahkan kepada *baitul mal* (kas perbendaharaan negara).

Menurut pendapat jumhur ulama, *radd* tidak diberikan kepada suami/istri melainkan kepada semua *ashabul furudh*. Dengan demikian, *radd* diberikan kepada 8 golongan, diantaranya ialah:⁹

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung.
4. Saudara perempuan seayah.
5. Ibu.
6. Nenek.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Saudara perempuan seibu.

Pemikiran yang disampaikan oleh jumhur ulama bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami/istri, hal itu dikarenakan bahwa *radd* itu dimiliki dengan jalan rahim, sedangkan suami/istri itu tidak mempunyai hubungan rahim, melainkan adanya perkawinan dan akan terputus akibat kematian. Mereka hanya berhak menerima bagian warisan berdasarkan ketentuan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tetap, tanpa memperoleh tambahan.

Radd juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek, hal itu dikarenakan akan bahwa *radd* terjadi jika tidak ada ahli waris *ashabah*, sedang ayah

8 *Ibid.* hal. 131

9 *Ibid.*

dan kakek termasuk ahli waris *ashabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta'shib*, bukan dengan cara *radd*.¹⁰

Persoalan *radd* secara garis besar dapat terjadi pada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:¹¹

1. *Radd* dalam hal suami atau istri tidak ada.
2. *Radd* dalam hal ada suami atau istri, dan ada 1 *Radd* dalam hal ada suami atau istri.

Asal Masalah (AM) adalah 24 sedangkan *shahibul faradh* hanya 23, dengan demikian ada sisa harta sebesar $\frac{1}{24}$ lagi. Dengan demikian timbul pertanyaan, sisa harta yang $\frac{1}{24}$ itu akan diberikan kepada siapa?¹²

Dalam masalah sisa harta ini diberikan kepada siapa, ada 2 (dua) pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Ada yang berpendapat bahwa sisa pembagian tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Di Indonesia tentunya dapat saja diserahkan kepada Bazis. Apabila ini yang dipakai maka tidak ada persoalan sama sekali.
2. Sisa hasil pembagian harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang *shahibul fardh*

Namun perlu dicatat bahwa istri atau suami tidak boleh mendapat keuntungan dari pembagian kelebihan harta tersebut, sebab suami atau istri tidak boleh bertambah bagiannya. Dengan demikian, sisa pembagian harta tersebut hanya dibagikan kepada ahli waris yang *shahibul faradh* di luar suami atau istri.

Apabila kemungkinan kedua yang dipakai, maka pertama sekali harus dikeluarkan bagian suami atau istri, baru kemudian sisanya dibagi di antara para ahli waris yang *shahibul faradh* secara proposional. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembagian, pada waktu memasukkannya ke dalam kotak-kotak bagian maka suami atau istri haruslah diletakkan pada bagian atas, sebab harus dikeluarkan terlebih dahulu bagiannya. Selanjutnya barulah kemudian dibagi sisanya.¹³

10 Suhrawardi K. Lubis, *Komis Simanjuntak, Op. cit.* hal 159

11 *Ibid.* hal. 160

12 *Ibid.*

13 Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 121

Dalam buku Sayuti Thalib, menyinggung sedikit persoalan siapa yang berhak memperoleh bagian radd. Menurut pendapat yang telah dikemukakan di atas, jika ada sisa bagi yang akan di-radd-kan, maka semua orang yang telah ditentukan sebagai *dzul faraidh* berhak mendapatkan bagian dari sisa yang bagi yang hendak di-radd-kan itu. imbangan perolehan adalah menurut imbangan perolehan menurut Al-Quran ketika pertama kali dibagi.¹⁴

Disamping itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa janda dan duda tidak mendapatkan bagian dari radd ini, walaupun mereka termasuk kepada golongan ahli waris *dzul fara'idh*. Dasar hukum yang dikemukakan ialah Surah Al-Anfal (8): 75, yang berbunyi: *"Dan mereka (orang-orang beriman) setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Dengan demikian maka sisa bagi itu diberikan kepada ahli waris *dzul fara'idh* yang bertalian darah saja, sedangkan istri dan suami hanya bertalian semenda bukan bertalian darah sehingga tidak mendapat pembagian dalam radd itu. Demikian pendapat kedua ini.

Meskipun demikian, menurut ajaran ini tidaklah dikecualikan dari kemungkinan dapat memperoleh bagian dari sisa bagi itu. Saudara-saudara yang dimaksud dalam garis hukum Surah Al Nisa' ayat 12 g dan h juga memperoleh bagian tertentu. Adapun menurut warisan patrilineal, saudara-saudara dalam ayat itu adalah saudara seibu lain bapak yang dalam pengertian kewarisan patrilineal bukanlah saudara sedarah. Demikian pula menurut penganut ajaran ini, kalau terjadi aul (pengurangan perolehan *dzul fara'idh* secara berimbang), maka suami atau istri terkena oleh pengurangan aul itu.¹⁵

1. Radd dan Baitul Mal

Baitul Mal adalah rumah harta atau semacam balai harta yang khusus menerima, menyimpan, dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan umat Islam dan agama Islam. Apabila harta peninggalan telah dibagikan kepada ahli waris yang semuanya adalah *dzul fara'idh*,

¹⁴ *Ibid.* hal 122

¹⁵ *Ibid.*

dan nyatanya masih ada sisa harta peninggalan yang belum habis terbagi, maka sisa ini dinamakan sisa bagi. Selanjutnya, sisa bagi ini di-radd-kan kepada semua *dzul fara'idh* yang tadi telah mendapat pembagian itu mereka mendapat prioritas pertama dalam *radd* ini, walau ada atau tidak ada baitul mal di daerah itu. Hanya orang yang meninggal khalalah, baik kebawah, ke atas atau ke samping yang harta warisannya diserahkan kepada baitul mal yang teratur baik. Demikianlah menurut ajaran kewarisan bilateral.

Di samping itu, dapat pula dikemukakan disini tentang adanya pendapat lain yang menyatakan bahwa *radd* barulah berlaku apabila tidak ada baitul mal yang teratur baik. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh sebagai penganut ajaran *Syafi'iyah*. Menurut ajaran ini kalau ada baitul mal yang teratur baik maka sisa sesudah dibagikan bagian waris yang pokok kepada *dzul fara'idh* diserahkan kepada baitul mal. Apabila tidak ada Baitul mal yang teratur baik, maka barulah sisa itu di-radd-kan kepada *dzul fara'idh* yang tadi telah menerima bagian pokok.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku Rad/Aul, misal:

Ahli Waris		AM	
Suami	1/4	3	$3/11 \times \text{Rp} \dots$
Ibu	1/6	2	$2/11 \times \text{Rp} \dots$
Anak Perempuan (AP)	1/2	6	$6/11 \times \text{Rp} \dots$

BAB 7

WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah merupakan amanat dari seseorang secara sukarela untuk memberikan suatu harta benda kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, dan hanya berlaku setelah pemberi amanat (*mushi*) tersebut meninggal dunia. Lafadz wasiat diambil dari kata "*washoitu al syai'a, uushihi*" yang bermakna "*asholtuhu*" yaitu menyampaikan sesuatu. Lafadz wasiat diambil dari kata "*al-washiyah*" (jamaknya washaya), yang secara harfiah memiliki arti pesan, perintah, dan nasihat. "*muushi*" (yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia mati. Dengan demikian ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati."¹

Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia. Definisi tersebut mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan seseorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli

¹ Aunur Rahi Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 65

5

dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi baru bisa direalisasikan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Pendapat Imam syafi'I mengatakan bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris, karena turunya ayat-ayat kewarisan yang berarti tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris. Menurut Ibnu Qudamah, pengikut mazhab Hambali mengatakan memperbolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Adapun menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebagian maka wasiat diambil dari orang yang memperbolehkan saja hal ini sesuai dengan pasal 195 ayat 2 dan 3 KHI, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Ayat 2, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
2. Ayat 3, wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Sebagaimana halnya hibah, bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak. Dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.

Berbeda dengan hukum Islam, definisi wasiat dalam hukum perdata barat, adalah hibah yang tidak dibatasi beberapa besarnya sedangkan dalam hukum Islam besarnya wasiat paling banyak hanya 1/3 harta peninggalan. Menurut Oemar salim, jika wasiat (*testament*) tersebut menetapkan penghibahkan barang tertentu dipakailah sebutan "*legaat*", sedangkan istilah "*efstelling*" digunakan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian tertentu (seper delapan) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu. Adapun menurut Syi'ah Immamiyah, bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi 1/3 harta warisan.

Dalam buku Indah Purbasari, Wasiat merupakan suatu satu kesatuan yang umumnya tidak dapat dipisahkan dari hukum waris.

Waris merupakan perpindahan kepemilikan harta yang otomatis terjadi dari pewaris kepada ahli waris karena adanya kematian. Hibah merupakan perpindahan kepemilikan harta karena pemberian harta dari pemberi dan penerima hibah yang keduanya. Sementara wasiat memiliki pengertian yang berbeda. Wasiat merupakan pembuatan hukum ketika seseorang memberikan suatu pernyataan dari kehendaknya sebelum meninggal untuk dilaksanakan ketika meninggal. Apabila dikaitkan dengan peralihan kepemilikan, wasiat merupakan pemberian pesan untuk mengalihkan hak milik harta kepada orang lain sebelum pemberi wasiat meninggal sedangkan peralihan harta kepada penerima wasiat berlangsung ketika pemberi wasiat meninggal.²

Selain surat Al-Baqarah ayat 180, perkataan wasiat juga terdapat dalam ²surat Al-Nisa' ayat 11 dan 12 yang diterjemahkannya sebagai berikut: "Allah mesyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. (Pembagian-pembagian itu) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya". Ayat ini mensiratkan makna waris dapat dibagikan apabila sudah terpenuhi sama halnya telah dibayar hutangnya. Wasiat ditafsirkan dengan cara diqiyaskan sama dengan hutang, apabila penerima wasiat telah memenuhi kewajiban melaksanakan wasiatnya yang diberikan pemberi wasiat, penerima wasiat tersebut sama halnya telah membayar hutang-hutangnya.³

Ulama mengutarakan perbedaan pendapat mengenai kedudukan pelaksanaan wasiat. Pendapat pertama bahwa wasiat hukumnya wajib dilaksanakan apabila orang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan harta. Harta tersebut banyak atau sedikit tidak akan berpengaruh seperti halnya pendapat yang dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Miljaz. Pendapatnya ini berpatokan pada Al-quran surat Al-Baqarah ayat 180 seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa wasiat diwajibkan ketika si pewasiat menghadapi kematian atau hendak meninggal dunia. Pendapat yang kedua yakni dari mazhab masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan az-Zuhri. Beliau menyatakan bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat keluarga yang tidak mewarisi, orang yang meninggal tersebut diwajibkan hukumnya. Pendapat yang ketiga dari empat imam

2 Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 169

3 *Ibid.* hal 170

mazhab dan aliran Zaidiyah menurut beliau wasiat bukanlah suatu kewajiban bagi orang yang meninggalkan harta pendapat yang disampaikan ini merupakan pendapat pertamanya, pendapat keduanya yakni bukan pula kewajiban kepada kedua orang tua serta kerabat keluarganya yang tidak mempunyai waris mewarisi, namun wasiat berbeda-beda hukumnya menurut keadaan yang ada. Dengan demikian, hukum wasiat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, jaiz (boleh) bergantung keadaan yang melekat pada isi dan/atau pelaksanaan wasiat.⁴

Wasiat menjadi wajib apabila manusia tersebut mempunyai suatu kewajiban yang syara' serta dikhawatirkan kewajiban tersebut akan disia-siakan apabila orang tersebut tidak mewasiatkan atau tidak berwasiat, seperti halnya orang tersebut mempunyai titipan kepada Allah serta mempunyai hutang kepada manusia. Misalnya, orang tersebut mempunyai suatu kewajiban zakat yang masih belum ditunaikan, atau orang tersebut masih belum melaksanakan haji, atau bisa jadi orang tersebut mempunyai suatu amanah yang masih belum bisa disampaikan. Orang tersebut masih mempunyai hutang dan hanya dirinyalah yang tahu jumlah hutangnya tersebut, atau orang tersebut mempunyai suatu titipan yang masih belum untuk dipersaksikan.⁵

Wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut diperuntukkan untuk kebajikan, untuk kerabat dekat, untuk orang-orang yang fakir, serta untuk orang-orang yang saleh. Wasiat dapat menjadi haram apabila wasiat tersebut dapat merugikan ahli waris, seperti halnya wasiat yang melebihi 1/3 dari harta waris, apalagi sampai menghabiskan harta warisnya, juga diharamkan apabila si pewasiat mewasiatkan khamar, membangun sebuah gereja serta membangun tempat-tempat hiburan. Hal ini sangat diharamkan untuk berwasiat. Wasiat dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat mempunyai sedikit hartanya sedangkan banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya, serta dimakruhkan bagi orang-orang yang fasik apabila diketahui orang tersebut menggunakan hartanya di dalam kefasikan atau kerusakan yang dapat merugikan orang-orang sekitarnya. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tersebut tahu bahwa orang yang diberi wasiat menggunakan hartanya untuk ketaatan, maka wasiat tersebut menjadi

4 *Ibid.*

5 *Ibid.* Hal. 171

sunnah. Wasiat dapat menjadi boleh atau dibolehkan apabila ditujukan kepada orang-orang yang mampu atau kaya baik itu kerabat maupun bukan kerabatnya.⁶

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI wasiat mempunyai pengertian yakni pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang telah dipilih untuk menerima wasiat, dan pemberian tersebut akan berlaku ketika si pewasiat meninggal dunia. Rukun dan syarat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Pemberi wasiat yakni orang yang member pesan sebelum meninggal terkait dengan peralihan hartanya. Orang tersebut mempunyai sifat atau bersifat mukalaf, selalu berbuat kebaikan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan.
2. Penerima wasiat (mausilah); penerima wasiat dianjurkan orang yang dapat memanfaatkan harta yang diterima bukan untuk maksiat melainkan kemaslahatan umum, seperti halnya membangun masjid-masjid, membangun sekolah atau yang lainnya.
3. Suatu yang diwasiatkan, yakni barang-barang yang disyaratkan dapat berpindah kepemilikannya dari seseorang kepada orang lain.
4. Lafaz (kalimat) wasiat, yakni kalimat yang dapat dipahami dalam wasiat.

Wasiat utamanya ditunjukkan kepada bukan ahli waris. Apabila wasiat ditunjukkan kepada ahli waris, hukumnya tidak sah, kecuali disepakati seluruh ahli waris. Banyaknya wasiat yang akan diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta si pemberi wasiat, dan harta yang diberikan tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga. Hal ini ada pengecualiannya apabila ahli waris sepakat untuk memberikan lebih dari sepertiga bagian maka hal ini boleh dilakukan.

Adapun syarat untuk orang yang diserahi untuk menjalankan wasiat dalam hal ini ada enam, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang diserahi wasiat tersebut beragama islam, jadi orang yang akan menjalankan wasiat tersebut hendaklah orang yang beragama islam.
2. Orang yang diserahi wasiat umurnya sudah baligh (sampai umur).

6 *Ibid.*

3. Orang yang disertai wasiat merupakan orang yang berakal.
4. Orang yang disertai wasiat merupakan orang yang telah merdeka dan bukan merupakan hamba sahaya.
5. Orang yang disertai wasiat merupakan orang yang dapat memegang amanah atau bisa dibilang orang yang dapat dipercaya
6. Orang yang disertai wasiat merupakan orang yang cakap dalam menjalankan wasiat sebagaimana yang telah dipilih oleh si pemberi wasiat

Adanya beberapa persyaratan tersebut di atas dikarenakan penyerahan tersebut merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang disertai wasiat tersebut merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat dalam penerima wasiat cukup ada pada dirinya serta orang yang disertai wasiat tersebut dapat atau sanggup untuk menjalankannya hendaknya orang tersebut dapat menerima wasiat tersebut. Namun, sebaliknya apabila ia merasa kurang cukup untuk mempunyai sifat-sifat itu, atau kurangnya kemauan serta kurangnya kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang bisa dibilang cukup berat, alangkah baiknya wasiat tersebut tidak diterimanya, dan hal ini agar dapat diserahkan kepada orang lain agar pekerjaan tersebut tidak sia-sia. Wasiat diatur pula dalam KHI. Pasal 194 ayat 1 KHI mensyaratkan: Orang yang berwasiat berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan” dalam memberikan wasiat kepada orang atau lembaga dengan kata lain, penerima wasiat yang diatur oleh KHI dapat berupa orang/perorangan atau lembaga. Pasal 194 ayat 2 KHI yang mempersyaratkan harta yang diwasiatkan adalah hak milik sah dari pewasiat. Bentuk menurut pasal 195 ayat 1 KHI dapat dilakukan baik secara lisan maupun bentuk tertulis dihadapan dua saksi atau di hadapan Notaris. KHI juga mengatur batasan wasiat maksimal 1/3 kecuali disetujui oleh ahli waris yang diatur dalam pasal 195 ayat 2 dan 3. Persetujuan ini dapat diucapkan secara lisan dihadapan dua saksi atau tertulis dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat 4 KHI. Apabila wasiat yang diberikan lebih dari 1/3 dan ahli waris keberatan, menurut pasal 201 KHI, wasiat hanya dilaksanakan sampai batas 1/3 tersebut.⁷

⁷ Ibid. hal 173

1. Ketentuan Hukum Islam Terkait Wasiat Wajibah

Wasiat wajibnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan serta kemauan sendiri, serta dalam situasi dan keadaan bagaimanapun tindakan ini juga bisa disebut dengan tindakan ikhtariyah.

Wasiat wajibah (wasiat yang hukumnya) ini tidak pernah dibuat oleh pewaris, namun Pengadilan Agama dapat memberikan putusan pemberian wasiat wajibah bagi mereka yang dapat menerimanya seperti anak angkat dan atau orang tua angkat. Wasiat wajibah diatur dalam pasal 209 KHI yang isinya sebagai berikut:

- a. Pasal 209 ayat 1 KHI, yakni harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai pasal 193 yang telah tersebut di atas, dan untuk orang tua angkat yang dalam hal ini tidak menerima suatu wasiat maka dalam pembagiannya diberi wasiat wajibah besaran takarannya yakni sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. PASAL 209 ayat 2 KHI, yang intinya untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya maka anak tersebut diberi wasiat wajibah yang takarannya juga sebanyak-banyaknya sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orang tua angkatnya.

Dengan kata lain, ketentuan mengenai wasiat yang diatur dalam pasal 209 KHI merujuk ketentuan wasiat dalam hukum Islam yakni diberikan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Terminologi wasiat wajibah ini memang tidak ditemukan secara tersurat dalam fiqh mawaris namun KHI mengatur ini untuk memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa antara anak angkat dan anak kandung terhadap waris. Hal ini dikarenakan status anak angkat bukanlah ahli waris sehingga tidak boleh mewaris dari orang tua angkatnya.

Sementara, anak angkat dalam kenyataan memperlakukan orang tua angkatnya dengan baik sama dengan anak kandung bahkan ada yang lebih baik dari pada anak kandungnya sendiri sehingga Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak angkat ataupun orang tua angkat. Dengan kata lain pada dasarnya, anak angkat tetaplah bukan ahli waris dan tidak akan mendapat harta waris dari orang tua angkatnya. Namun demikian ketika terjadi sengketa waris yang melibatkan anak angkat, hakim boleh menggunakan

instrument pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah agar memberikan keadilan baik bagi ahli waris maupun anak angkat.⁸

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.⁹ Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakansesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹⁰

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.¹¹ Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan islam, yakni Al-quran surah al-Baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.¹²

Surah Al-Baqarah ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 180).

Ma’aruf ialah adil dan tidak. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini di-nashkh-kan dengan ayat mewaris.

Surah Al-Maidah ayat 106:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua

8 Ibid. hal 174

9 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 147

10 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 147

11 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 147

12 Ibid.

saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun ia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Maidah (5): 106)

² Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, perlu perbandingan dengan pengertian wasiat menurut KUH Perdata, Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tercantum dalam Pasal 875, yakni Pasal 875 KUH Perdata Surah wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Kalau kehendak ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Kewarisan, menurut konsep KUH Perdata bisa karena ditentukan oleh Undang-undang, bisa juga karena penunjukan ahli waris (*erfselling*) berdasarkan wasiat atau testamen. Oleh karena itu, yang terakhir ini juga sering disebut ahli waris testamenter. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam suatu penunjukan ahli waris "selalu mengenai seluruh warisan" kendati dalam perkembangannya pengertian testamen mengalami banyak perubahan, tetapi intinya tetap yaitu penunjukan atau pengangkatan ahli waris.¹³

Jika Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tersebut dibandingkan dengan pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfselling*), yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. "Pemberian" dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUH Perdata dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga *legaat*.¹⁴

13 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 148

14 *Ibid.* Hal 149

Kalau diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata washshaitu *asy-syaia*, *ushi* artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu” (Sayid sabiq, 14, 1988: 215).¹⁵ Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H. mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati. (Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1993: 122).¹⁶

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.¹⁷ Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dasar ketentuan hukumnya antara lain dapat dijumpai dalam sebuah hadis sebagai berikut:¹⁸

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra, telah bersabda Rasulullah SAW:

“Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”

Lebih lanjut Ibnu Umar berkata:

“Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku”. (Sayid Sabiq, 14, 1988: 216-217).

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ijab Kabul.
- b. Ijab Kabul harus tegas dan pasti

15 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 44

16 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 44

17 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 44

18 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 46

- c. Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- d. Ijab dan Kabul tidak mengandung *ta'liq*

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut hemat penulis apa yang akan dikemukakan dalam poin 1, 2, dan 3 terlampau mengada-ada, sebab wasiat tidak ada di tempat, misalnya dalam keadaan si pewasiat berada di tengah perjalanan, atau si pewasiat meninggal mendadak. Apakah wasiat yang telah diperbuatnya sebelum meninggalnya (tanpa kehadiran si penerima wasiat) di pandang sebagai tidak sah?

Hal ini penulis kemukakan berdasarkan ketentuan Al-quran dan hadis sebagaimana dikemukakan di atas, yang jelas tergambar bahwa tidak mesti ada Kabul (penerimaan) dari pihak penerima wasiat. Hal tersebut dapat dipahamkan dari ungkapan hadis yang berbunyi: *Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, hal ini dipertegas lagi oleh ungkapan Umar, "Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW. mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku".*¹⁹

Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak). Jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang yang berhak membuat wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Selain itu harta yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pemberi Wasiat.²¹

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan Notaris.
- b. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan ahli waris.

19 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 46

20 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 47

21 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997/1998: 85.

22 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 47

- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada point 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dibuat dihadapan Notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.²³

Menurut Eman Suparman, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat antara lain sebagai berikut:

- a. Almushji, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
- b. Almushja, lahu, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
- c. Almusahji, bihi, yaitu benda yang akan di hibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah, Hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. "Hal itu berdasarkan Hadis Riwayat Buchari yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia".
- d. Asj Sjighah, yaitu isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

23 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. cit.* hal 48

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan;
- b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya".²⁴

Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat. "Hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah pemberi hibah wasiat meninggal sebab ketika pemberi hibah wasiat hidup, hibah wasiat sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali. Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu".²⁵

Dalam buku Sayuti Thalib, wasiat di sini memiliki pengertian sebuah pernyataan terhadap oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan itu dalam pelaksanaannya, terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik. Menurut pengertian harfiah dan untuk pemakaian persoalan lain di luar kewarisan, maka warisan berarti pula nasehat-nasehat atau kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada, dan untuk orang lain, yang berupa kehendak, orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah ia telah tidak ada di dalam dunia yang fana ini.

2. Ayat-ayat yang Mengatur Tentang Wasiat

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang kali perihal wasiat disebutkan dalam Al-quran, baik pada saat sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan yang bersangkutan itu sendiri. Tuntunan-tuntunan dalam Al-quran mengenai wasiat antara lain termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 180-182, dan 240; Surat Al-Nisa' ayat 11 dan 12, dan Surat Al-Ahzab ayat 6.

²⁴ Sayuti Thalib, *Op. cit.*, Hal. 134

²⁵ Komar Andasasmita dalam buku Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 98.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 180-182 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa (ayat 180). Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (ayat 181). Akan tetapi, barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka maka ia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (ayat 182).” (QS. Surat Al-Baqarah ayat 180-182).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 yang artinya:

“Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah) akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Surat Al-Baqarah ayat 240).

Dalam Surat Al-Nisa’ ayat 11 yang artinya:

“Pengeluaran wasiat untuk anak-anak (garis hukum a, b, dan c, dan untuk ibu bapak garis hukum b, d, e, dan f) sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkannya dan atau utangnya.”

Dalam Surat Al-Nisa’ ayat 12 yang artinya:

“(Pengeluaran warisan untuk duda itu) setelah diselesaikan wasiat dan/atau utangnya. (Pengeluaran warisan untuk janda itu) setelah diselesaikan wasiat dan/atau utangnya.”

Dalam Surat Al-Ahzab ayat 6 yang artinya:

“Dan Ulu al-arham (ulu arham, orang yang sepertalian darah) itu setengahnya lebih dekat kepada setengahnya dalam kitab Allah (dalam hal waris) daripada orang mukminin dan muhajirin lainnya, kecuali bahwa kamu berbuat baik (wasiat) kepada auliya’akum (auliya’akum yaitu orang mukminin dan orang muhajirin itu).”

Dalam ajaran ilmu Ushul fiqh ada bagian yang erat hubungannya dengan pembicaraan ayat-ayat Al-Qur’an bersangkutan. Ajaran itu ialah

untuk menjawab pertanyaan apakah ayat yang satu menghapuskan (me-mansukh-kan) ayat yang terdahulu, yang membicarakan hal yang sama. Ada yang menyatakan mansukh (hapus kekuatannya) dan ada yang menyatakan tidak.

Beberapa pendapat telah dikemukakan mengenai adanya beberapa ayat wasiat itu. Surat Al-Baqarah lebih dahulu turunnya (urutan ke 87) dari surat walaupun Nisa' (urutan ke-92), walaupun sama-sama turun di Madinah.

Kewarisan bilateral berkesimpulan bahwa member wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa atau badan apa saja, asalkan dalam rangka kebaikan, dan lain-lain. Bahkan, menurut ajaran ini, berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dengan garis hukum mengenai wasiat dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya seluruh ketentuan ayat 180 tersebut. Mungkin terjadi perubahan hukumannya. Hukum yang tadinya kutiba' atau diwajibkan, sekarang beralih lebih ringan berupa kebolehan atau ibahah.

Pendapat dari ajaran kewarisan patrilineal Syafi'I mengatakan bahwa dengan turunnya ayat-ayat kewarisan pada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, maka ayat 180 dari surat Al-Baqarah tersebut tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada bapak dan aqrabun, bahkan tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak, dan ahrabun kalau ketiganya itu telah mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan.

Dikemukakan lagi suatu hadist yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi, menurut ajaran ini, kekuatan ayat 180 telah di-mansukh-kan atau dihapuskan. Dengan demikian, berwasiat di sini hanya untuk kemaslahatan umum seperti perbaikan masjid, sekolah agama, orang-orang yang memerlukan bantuan, serta perjuangan untuk agama Islam.

Selanjutnya, pembahasan mengenai wasiat yang penting adalah tujuan wasiat sebagai penyeimbang perolehan anak laki-laki dan anak perempuan. Garis hukum ayat 11 a (surat An-Nisa), menyatakan bahwa perolehan warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan berbanding dua dengan satu. Dengan demikian, seorang anak laki-laki mendapat

perolehan warisan sejumlah dua kali perolehan seorang anak perempuan. Melihat keadaan kesadaran perasaan keadilan anggota masyarakat di daerah istilah yang patrilineal pada saat itu, ketentuan ini dirasakan terlalu menguntungkan kaum hawa. Perempuan yang sebelumnya tidak memperoleh sedikitpun dari harta warisan, dengan datangnya ketentuan Islam dalam hukum kewarisan ini, kaum perempuan mendapat jaminan. Perempuan umumnya menjadi dzul faraidh yang perolehan warisannya tidak boleh dikalahkan oleh siapapun, tetapi jumlahnya juga dibatasi sehingga tidak terlalu besar.

Dalam hal anak, maka anak perempuan dijamin perolehannya berupa $\frac{2}{3}$ (dalam hal pewaris hanya memiliki anak perempuan saja dan jumlahnya lebih dari satu, sedangkan jika anak pewaris hanya ada seorang saja dan anak itu perempuan maka ia dijamin memperoleh setengah bagian harta peninggalan), suatu jumlah yang tak dapat dipikirkan dan diperhitungkan oleh anggota masyarakat yang patrilineal itu. Ketentuan tersebut walaupun dirasakan menyalahi adat kebiasaan dan rasa keadilan mereka, tetap mereka terima karena ini adalah perintah Allah dan Rosulnya. Di sisi lain, dalam hal ahli waris itu terdiri atas anak perempuan dan anak laki-laki, maka ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh warisan dua kali dari perolehan anak perempuan itu.

Keadaan rasa keadilan pada sebagian tempat ternyata berubah. Perempuan dianggap mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, setidaknya dalam hal memperoleh bagian dalam harta peninggalan ibu bapaknya. Di Indonesia, rasa kesadaran hukum yang demikian ini diajukan dengan baik oleh sejumlah organisasi wanita Indonesia.

Sungguhpun demikian dalam hal rasa kesadaran hukum di Indonesia, dewasa ini benar-benar merasakan perlunya pembagian satu berbanding satu antara perolehan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dalam hal waris. Dengan kata lain, kita dapat mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah dalam ayat-ayat kewarisan itu berupa lembaga wasiat. Al-Quran sebanyak empat kali dalam ayat 11 dan 12 menegaskan keperluannya lembaga wasiat itu. Orang tua dapat berwasiat agar dalam pembagian harta peninggalannya nanti dilakukan dengan menambah banyaknya perolehan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya.

Dengan demikian, terpenuhilah keinginan keadilan yang dirasakan oleh anggota masyarakat tersebut dan diperbolehkan dengan jelas oleh

hukum kewarisan Islam. Hendaklah diingat bahwa tidak tepat kalau keinginan menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan itu dilakukan dengan mengatakan anak-anak itu memperoleh satu berbanding satu (1:1). Hal ini karena perilaku tersebut jelas bertentangan dengan garis hukum 11 a yang menentukan perolehan mereka adalah dua banding satu (2:1).²⁶

B. Adab Berwasiat

Mengingat pentingnya wasiat, Islam telah mengatur adab atau tatacara dalam berwasiat, antara lain adalah sebagai berikut:²⁷

1. Wasiat itu tertulis

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (1) menyatakan wasiat tertulis ialah wasiat yang seluruhnya ditulis oleh pewaris dihadapan 2 (dua) orang saksi dan atau dihadapan Notaris.

2. Adanya 2 orang saksi yang adil

Hal ini dimungkinkan apabila wasiat dibuat secara lisan dan atau apabila dalam sebuah perjalanan terjadi musibah yang dialami pewaris yang tidak sempat menulis wasiat maka hendaknya dipilih dua orang saksi yang adil, dalam hal ini seorang pewaris haruslah berhati-hati dalam menentukan 2 (dua) orang saksi yang adil untuk melindungi hak para ahli waris. Dengan demikian, diharapkan setelah meninggal tidak terjadi perselisihan soal pembagian warisan di antara para ahli waris.

3. Wasiat tidak melebihi 1/3 bagian.

4. Wasiat bukan untuk ahli waris.

Wasiat bukan untuk ahli waris merupakan wasiat yang dibuat oleh pewaris yang ditujukan kepada seseorang di luar ahli waris.

5. Wasiat tidak merugikan ahli waris.

C. Batalnya Wasiat

Wasiat yang telah dibuat oleh seseorang dapat saja menjadi batal atau tidak berlaku, yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:²⁸

26 Sayuti Thalib, *op. cit*, hal 127-133

27 Subchan Bashori, *Op.cit*, hal . 31.

28 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997/1998: 86, dan sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1987: 14/239.

1. Calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena hal sebagai berikut:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada orang yang berwasiat.
 - b. Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan, bahwa orang yang berwasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah orang yang berwasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari orang yang berwasiat.
2. Orang yang ditunjukkan untuk menerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia. Mengetahui adanya wasiat, tetapi ia menolak untuk menerimanya atau menolak sampai ia meninggal dunia.
3. Apabila calon penerima wasiat telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pemberi wasiat.
4. Harta benda atau barang yang diwasiatkan telah musnah atau hilang, sebelum diterima oleh calon penerima wasiat.

Menurut buku Rachmad Budiono, Di antara sekian sebab batalnya wasiat tersebut, dapat dikatakan sebab terberat adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat. Mengenai pembunuhan ini, di antara para fuqaha timbul berbagai pendapat, yakni apakah si pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak menerima wasiat atau tidak. Berbagai pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat tersebut, meskipun pembunuh itu benar-benar disengaja dan bermotif untuk mempercepat kematian orang yang member wasiat agar ia lekas memperoleh harta yang diwasiatkan. Tidak maka, pembunuhan semacam itu menyebabkan orang yang membunuh terlarang mempusakai (mewaris), tetapi tidak meniadakan usaha yang meninggal dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya.

Kedua, fuqaha hanafiah, menegaskan bahwa wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, asalkan pembunuhan itu bukan pembunuhan karena sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang telah memberi wasiat, maka wasiat itu batal.

Ketiga, fuqaha malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat. Yakni sebagai berikut:

1. Wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul.
2. Si korban hendaknya mengenal pembunuhannya bahwa dialah yang sebenarnya menjalankan tindakan maker pembunuhan tersebut.

Berdasarkan dua syarat tersebut, jika ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya berwasiat kepada penganiaya yang menyebabkan kematian, maka wasiat tersebut sah.

Keempat, menurut Imam Abu Yusuf, berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak, adalah tidak sah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya "Tidak ada hak menerima wasiat bagi pembunuh". Menurut beliau, Hadis tersebut harus diartikan secara umum, tanpa pengecualian apapun. Pendapat terakhir inilah yang pada dasarnya dianut oleh Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu tiga sebab batalnya wasiat yang tercantum dalam pasal 197 huruf b, c, dan d diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada metode berijtihad, yakni metode istihlah atau maslahat mursalat. dapat dimengerti bahwa sebab-sebab tersebut dicantumkan untuk kepentingan kemaslahatan.

Pasal 912 KUH Perdata (Burgelijk wet book) menurut ketentuan yang serupa dengan ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapnya berbunyi pasal 912 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

5 Mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi akan mencabut atau merubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti

tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

Di samping hal-hal yang diuraikan diatas pasal 197 ayat 2 KHI juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai dia meninggal dunia sebelum meninggalkan pewasiat;
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya;
3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia, sebelum meninggalnya pewasiat.

Menurut pasal 197 ayat 3 KHI wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.²⁹

Menurut Aunur Rahim Faqih, sah atau tidaknya suatu wasiat tergantung dari praktik wasiat itu, apakah sudah memenuhi segala rukun dan persyaratan wasiat yang telah ditetapkan. Jika wasiat sudah memenuhi segala rukun dan persyaratannya maka wasiat dianggap sah dan bisa dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak memenuhi segala rukun dan persyaratan, atau tidak terpenuhi salah satu rukun dan persyaratannya maka wasiat dianggap batal dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Ulama fikih menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat, sebagiannya disepakati seluruh ulama fikih dan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun hal-hal yang disepakati dapat membatalkan wasiat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Dari aspek pewasiat (mushi):
 - a. Mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum;
 - b. Yang berwasiat mewasiatkan yang bukan miliknya;
 - c. Yang berwasiat tidak cakap hukum.
2. Dari aspek penerima wasiat:

29 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 177

- 5
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewasiat
 - e. Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat;
 - f. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak menerimanya;
 - g. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Dari aspek harta yang diwasiatkan:
 - a. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur ditelan banjir;
 - b. Penerima wasiat meminta harta lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal;
 - c. Benda yang diwasiatkan adalah yang diharamkan atau tidak bermanfaat secara syara';
 - d. Wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta orang yang berwasiat.
4. Syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi. Misalnya, pewasiat mengatakan, "Apabila sakit saya ini membawa kematian, maka saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Fulan." Tetapi, ternyata si pewasiat itu sembuh dan tidak jadi wafat, maka wasiat itu batal.³⁰

D. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri

30 Aunur Rahim Faqih, *Op. cit*, hal. 75-76

dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 180. Adapun yang berpendapat seperti ini, misalnya Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm, Said ibnul Musyyab, Al-Hasanul Bishri.³¹

Al-Jashshah dalam bukunya, *Ahkamul Qur'an*, menegaskan bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-quran tersebut di-*mansukh* oleh ayat-ayat Al-Quran dalam bidang kewarisan atau tidak. Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat ntuk ibu, bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak. Mereka juga berpendapat bahwa hadis Rasulullah yang artinya "*Tidak ada wasiat untuk para Ahli waris*" merupakan peneguhan dari pemikiran mereka.³²

Karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para Ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka.³³

Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tidak mendapatkan warisan baik ia merupakan anak dari anak perempuan atau anak dari anak laki-laki, dikarenakan memiliki anak laki-laki yang masih hidup,

31 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 150

32 *Ibid.* Hal 150

33 *Ibid.* Hal 151

2
wajiblah dibuat wasiat.³⁴ Pendapat Ibnu Hazm, dan beberapa ulama mengenai wasiat *wajibah* di atas, di ikuti oleh undang-undang Wasiat mesir nomor 71 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat *wajibah* adalah sebesar yang seharusnya diterima oleh orang tua seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Di samping itu harus dipenuhi pula dua syarat, yaitu:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan.
2. Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya, seperti hibah umpamanya.

Undang-undang di atas sama sekali tidak menyinggung soal kemenakan. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa undang-undang tersebut berusaha untuk mengatasi persoalan yang dirasakan sangat mendesak. Pusat perhatian wasiat *wajibah* ini terfokus pada masalah cucu, sehingga *ijtihad* yang muncul seperti wasiat *wajibah* tersebut. Dalam perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, para pemikir ahli hukum Islam (*fuqaha*) tidak hanya melihat pada persoalan cucu saja, tetapi dengan memperluas cakrawala analisisnya, yakni dengan mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai penggantian tempat. Ahli pemikir hukum Islam yang disebut terakhir ini, misalnya Profesor Hazairin. Namun demikian, walaupun dalam lingkup yang sangat terbatas, wasiat *wajibah* mempunyai kemiripan dengan penggantian tempat. Kemiripan tersebut terletak pada ada orang yang meninggal lebih dulu daripada orang yang meninggalkan harta kekayaan.³⁵

Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan wasiat *wajibah* menunjukkan kesamaan, tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar pokok pikiran yang tidak sama antara keduanya.

Wasiat *wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan “menyeluruh” di sini adalah menyeluruh persoalan kematian

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

lebih dulu daripada pewaris, baik dalam garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, maupun garis ke samping.³⁶

Menurut Buku Sayuti Thalib, Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris. Dasar ketentuan dari pendapat ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut adalah ucapan Rasul dalam dialog dengan Sa'ad bin Abi Waqas yang kala itu sedang sakit. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:³⁷

"Sa'ad bin Abi Waqas bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah: "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya ini?" Rasulullah menjawab: "Jangan!" Maka bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika seperdua?" Rasulullah menjawab lagi: "Jangan!" Setelah itu bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika sepertiga?" Maka berkata Rasulullah: Atstsulutsu kabirun, innaka in tarakta waladaka agnniya 'a khairun..... (besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam kecukupan adalah lebih baik.....)" (HR. Bukhari).

Ahlu'sunnah berdasarkan hadis tersebut menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melampaui 1/3 dari harta setelah dikurangi dengan semua utang. Prof. Hazairin menyatakan bahwa beliau sependapat. Walaupun demikian, apabila ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara:

1. dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau
2. diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Apabila mereka mengikhlaskannya, maka halal dan *ibahah* hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.

Adapun utang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat. Penyelesaian utang si pewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik. Oleh sebab itu, membayarkan kewajiban

³⁶ Ibid.

³⁷ Sayuti Thalib, *Op. cit.* hal 133

lebih didahulukan pelaksanaannya. Terdapat hadis Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini. Maksudnya ialah hadis perkataan (qauliyah) Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengetahui keadaan tersebut.

Menurut hadis itu, Ali berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan bahwa wasiat barulah boleh dikeluarkan setelah semua utang telah dibayarkan (HR. Tirmidzi bin Madjah, dari misykat Imasabih). Dihubungkan dengan pembatasan wasiat atas sepertiga, maka wasiat yang melampaui sepertiga dari sisa setelah utang dibayarkan mestilah diperkecil sampai sama besarnya dengan sepertiga dari sisa tersebut. Ketetapan Rasulullah itu sangat bijaksana.³⁸

E. Pencabutan Wasiat

Dalam hukum Islam, wasiat tidak harus dituangkan dalam suatu testamen yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana dilaksanakan dalam hukum perdata, karena wasiat yang dibuat secara lisan juga diakui sebagai wasiat yang sah dengan syarat dapat menghadirkan dua orang saksi. Oleh karena itu, setiap orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga atau kepada ahli warisnya yang lain. Pernyataan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dapat secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat dihadapan notaries. Dalam surat wasiat baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk untuk menerima harta yang diwasiatkan itu.³⁹

Wasiat itu bukan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang member wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang telah dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan, seperti mewasiatkan sebidang tanah untuk orang

38 5yuti Thalib, *Op. cit.* hal 133

39 Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hal. 218

lain, kemudian orang yang mewasiatkan itu menjual tanah tersebut kepada pihak lain lagi tanpa memberitahukan kepada orang yang telah menerima wasiat itu. Terhadap yang terakhir ini Imam Hanafi mengatakan bahwa, menjual wasiat secara sepihak seperti itu tidak dianggap menarik kembali wasiat yang telah diberikannya, si penerima wasiat berhak menerima harga barang wasiat yang telah dijual itu.

Menurut Sayyid sabiq mengatakan bahwa wasiat termasuk kedalam perjanjian yang diperbolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu pewasiat boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencabutan wasiat yang diatur dalam pasal 199 yaitu sebagai berikut:

1. Pewasiat dalam mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh kedua orang saksi atau berdasarkan akta notaries.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaries maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaries.

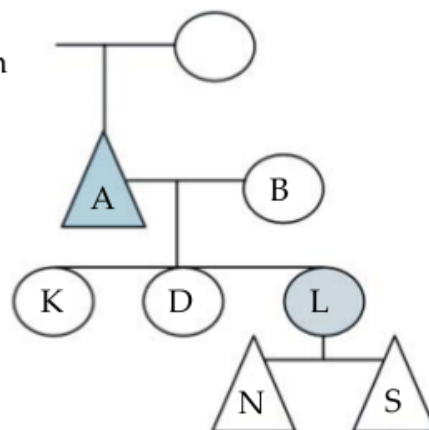
BAB 8

CONTOH-CONTOH KASUS DAN PENYELESAIANNYA

1. A adalah suami B binti C yang menikah pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama L, D, dan K. Kemudian A meninggal dunia pada 1 Januari 2010. Ayah kandung A telah meninggal dunia pada 1 Januari 2000, tetapi ibu kandung A masih hidup. Anak A bernama L telah meninggal dunia pada 1 Januari 2005 dan meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki bernama N dan S. Selama perkawinan A dan B memperoleh harta berupa rumah di Pondok Blimbing Indah Malang, dan sebuah mobil Toyota Kijang Innova tahun 2009, warna hitam, Nopol N-000-X, semua harta tersebut dikuasai anak kedua bernama D. Selain itu, A mempunyai utang kepada Bapak F, Ketua RT setempat, untuk keperluan menambah kekurangan uang pembelian mobil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Buatlah bagan pewarisannya!
 - Siapakah Ahli Warisnya?
 - Berapakah masing-masing bagian ahli waris?

Jawaban

- a. Gambar bagan pewarisan



- b. Ahli waris adalah 2 anak D, K, B (istri), ibu
c. Bagian masing-masing

		AM=24	CARA MENYELESAIKAN
2 ANAK PR	2/3	16	16/23 X HW
ISTRI	1/8	3	3/23 X HW
IBU	1/6	4	4/23 X HW
2 CUCU LAKI-LAKI DARI ANAK PR	M	-	-
HM (HASIL MASALAH)		23	RADD
HW = 1/2 HARTA BERSAMA-HUTANG			

2. Seorang Istri meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris (AW) yang ada yaitu Suami (Duda), Ayah, Ibu, dan 2 Anak Laki-laki (AL). Harta peninggalan berjumlah 70 juta. Hutang yang ditinggalkan sebesar 6 juta, biaya RS sebesar 3 juta, dan biaya pengurusan jenazah 1 juta rupiah. Hitunglah bagian masing-masing AW sesuai aturan hukum waris Islam!

Jawaban

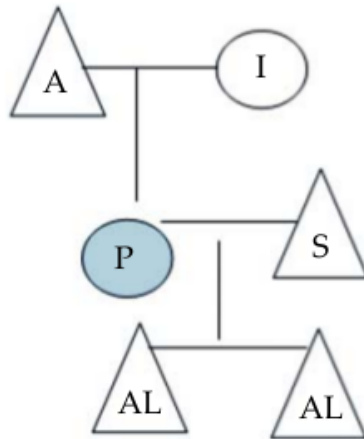
- a. Ahli warisnya adalah Suami, Ayah, Ibu dan 2 anak laki-laki
b. Bagiannya

JENIS HARTA

HARTA	70.000.000
HUTANG	6.000.000
BIAYA RS	3.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	1.000.000
TOTAL	60.000.000

AHLI WARIS		AM=12	TIRKAH	6.000.000
SUAMI	1/4	3	3/12 X 60.000.000	1.500.000
2 ANAK LK	ASOBAB	5	5/12 X 60.000.000	2.500.000
AYAH	1/6	2	2/12 X 60.000.000	1.000.000
IBU	1/6	2	2/12 X 60.000.000	1.000.000
		12	TOTAL	6.000.000

c. Bagan pewarisan



3. Seorang Istri ¹meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris (AW): Suami (Duda), Ayah, dan 1 Anak Perempuan (AP). Harta peninggalan berjumlah 30 juta. Hutang yang harus dibayarkan sebesar 7 juta, sedangkan biaya pengurusan jenazah sebesar 1 juta. Hitunglah bagian masing-masing AW sesuai aturan hukum waris Islam!

Jawaban

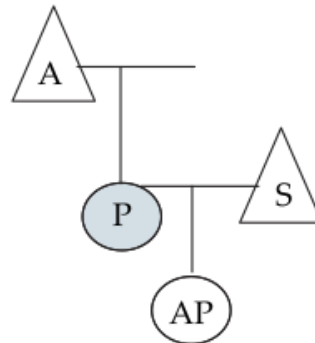
- Ahli waris adalah suami, ayah, 1 anak perempuan
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA	30.000.000
HUTANG	7.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	1.000.000
TOTAL	22.000.000

AHLI WARIS		AM=4	TIRKAH	22.000.000
SUAMI	1/4	1	1/4 X 22.000.000	5.500.000
1 ANAK PEREMPUAN	1/2	2	2/4 X 22.000.000	11.000.000
AYAH	ASHOBAH	1	1/4 X 22.000.000	5.500.000
				-
		4	TOTAL	22.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



4. Seorang Suami meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris (AW) yaitu Istri (Janda) Ayah, Ibu, 2 AP. Harta Peninggalan berjumlah 60 juta. Biaya RS 5 juta. Biaya pengurusan jenazah 1 juta. Hitung bagian masing-masing AW sesuai aturan hukum waris Islam!

Jawaban

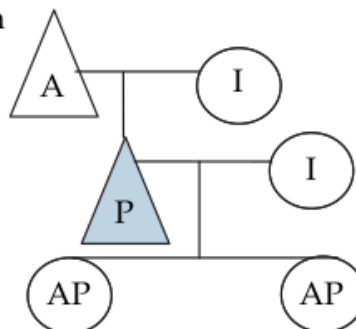
- Ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan 2 anak perempuan
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA	60.000.000
BIAYA RS	5.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	1.000.000
TOTAL	54.000.000

AHLI WARIS		AM=24	TIRKAH	54.000.000
ISTRI	1/8	3	$3/27 \times 54.000.000$	6.000.000
2 ANAK PEREMPUAN	2/3	16	$16/27 \times 54.000.000$	32.000.000
AYAH	1/6	4	$4/27 \times 54.000.000$	8.000.000
IBU	1/6	4	$4/27 \times 54.000.000$	8.000.000
	AUL	27	TOTAL	54.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



5. Seorang bernama P mati meninggalkan ahli waris seorang istri (janda), seorang ibu, 2 anak perempuan. Harta peninggalan sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Buatlah bagan pewarisannya berdasarkan aturan hukum waris Islam dan hitung bagian masing-masing ahli waris!

Jawaban

- Ahli waris adalah istri, ibu, 2 anak perempuan
- Bagian masing-masing

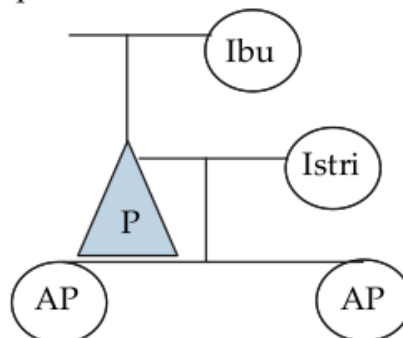
JENIS HARTA

HARTA

24.000.000

AHLI WARIS		AM=24	TIRKAH	
ISTRI	1/8	3	$3/23 \times 24.000.000$	3.130.435
2 ANAK PEREMPUAN	2/3	16	$16/23 \times 24.000.000$	16.695.652
IBU	1/6	4	$4/23 \times 24.000.000$	4.173.913
	RADD	23	TOTAL	24.000.000

- Gambar bagan pewarisan



6. Diketahui ahli waris yang ada adalah janda, 1 anak perempuan, dan ayah. Pewaris mempunyai hutang berjumlah 50 juta rupiah. Biaya pengurusan jenazah 3 juta rupiah dan biaya perawatan selama sakit 20 juta rupiah. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris apabila pewaris meninggalkan harta bawaan berupa tabungan sebesar 30 juta rupiah dan jumlah harta bersama adalah 200 juta rupiah!

Jawaban

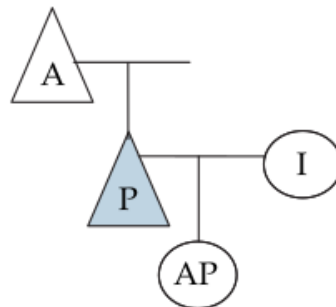
- Ahli waris adalah istri, ayah dan 1 anak perempuan
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA bersama	200.000.000
harta asal	30.000.000
BIAYA RS	20.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	3.000.000
hutang	50.000.000
bagian suami $\frac{2}{3}$ dari Harta bersama	114.666.666,67
bagian istri $\frac{1}{3} \times$ Harta bersama	42.333.333,33

AHLI WARIS		AM=8	TIRKAH	114.666.666,67
Istri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times 114.666.667$	14.333.333,33
1 Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	4	$\frac{4}{8} \times 114.666.667$	57.333.333,33
Ayah	ashobah	3	$\frac{3}{8} \times 114.666.667$	43.000.000,00
		8	TOTAL	114.666.666,67

c. Gambar bagan pewarisan



7. (P) menikah dengan (A= Istri) dan memiliki 1 anak perempuan (B) dan 2 anak laki-laki (C,D). kemudian (P) meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan senilai Rp 250.000.000,-. Namun (P) juga meninggalkan seorang ayah (E) dan kakek (F) serta nenek (G) dari pihak ibu. Sedangkan ibunya (P) sudah meninggal jauh hari sebelum (P) meninggal.

Pertanyaan:

- Buatlah bagan pewarisannya
- Siapakah Ahli Waris dari P?
- Berapa bagian masing-masing ahli warisnya?

Jawaban

- Ahli waris adalah istri, ayah, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, nenek (ibu dari ibu)

b. Bagian masing-masing

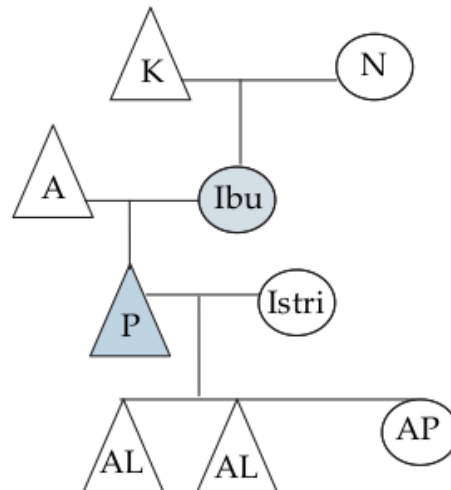
JENIS HARTA

HARTA

250.000.000

AHLI WARIS		AM=24	TIRKAH	250.000.000
Istri	1/8	3	$3/24 \times 250.000.000$	31.250.000
1 Anak Perempuan	ashobah	13	$13/24 \times 250.000.000$	135.416.667
2 anak laki-laki				
Nenek	1/6	4	$4/24 \times 250.000.000$	41.666.667
Ayah	1/6	4	$4/24 \times 250.000.000$	41.666.667
		24	TOTAL	250.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



8. (P) meninggal dunia meninggalkan seorang istri (A) dan 2 orang anak perempuan (B,C). (P) juga meninggalkan seorang ibu (E) dan 2 saudara laki-laki (F,G). P meninggalkan harta bersama/harta gono-gini sebesar Rp 600.000.000,-
- Buatlah bagan pewarisannya
 - Siapaakah Ahli Waris dari P?
 - Berapa bagian masing-masing ahli warisnya?

Jawaban

- Ahli waris adalah ISTRI, ibu, 2 anak PEREMPUAN, 2 saudara laki-laki kandung
- Bagian masing-masing

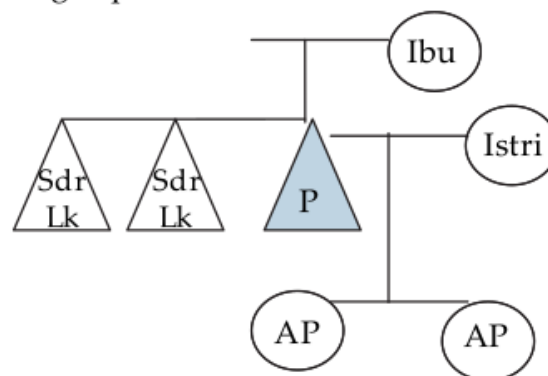
JENIS HARTA

HARTA

600.000.000

Ahli Waris		AM=24	TIRKAH	600.000.000
Istri	1/8	3	$3/24 \times 600.000.000$	75.000.000
2 Anak Perempuan,	2/3	16	$16/24 \times 600.000.000$	400.000.000
2 Saudara Laki-Laki	ashobah	1	$1/24 \times 600.000.000$	25.000.000
Ibu	1/6	4	$4/24 \times 600.000.000$	100.000.000
		24	TOTAL	600.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



9. (P) menikah dengan (A) dan memiliki 2 anak perempuan (B,C) dan 2 anak laki-laki (D,E). kemudian (P) meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan senilai Rp 500.000.000,-. Namun (P) juga meninggalkan seorang ayah (F) dan kakek (J) serta nenek (G) dari pihak ibu. Sedangkan ibunya (P) sudah meninggal jauh hari sebelum (P) meninggal.

Pertanyaan :

- Buatlah bagan pewarisannya
- Siapakah Ahli Waris dari P?
- Berapa bagian masing-masing ahli warisnya?

Jawaban

- Ahli waris adalah ISTRI, ayah, nenek (ibu dari ibu), 2 anak perempuan, 2 Anak laki-laki
- Bagian masing-masing

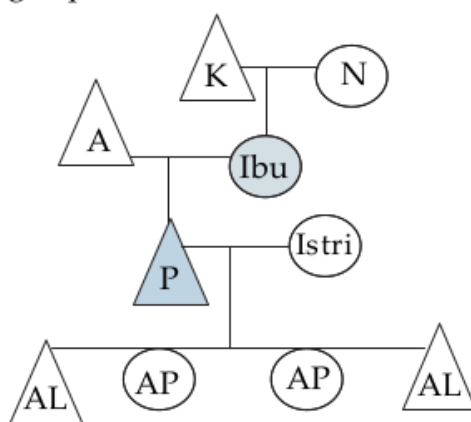
JENIS HARTA

HARTA

500.000.000

Ahli Waris		AM=24	Tirkah	500.000.000
Istri	1/8	3	$\frac{3}{24} \times 500.000.000$	62.500.000
2 Anak Perempuan,	ashobah	13	$\frac{13}{24} \times 500.000.000$	270.833.333
2 Anak Laki-Laki				-
Nenek	1/6	4	$\frac{4}{24} \times 500.000.000$	83.333.333
Ayah	1/6	4	$\frac{4}{24} \times 500.000.000$	83.333.333
		24	TOTAL	500.000.000
1 Anak Lelaki	90.277.778			
1 Anak Perempuan	45.138.889			

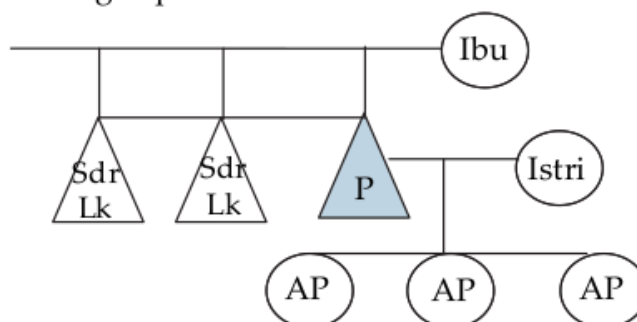
c. Gambar bagan pewarisan



10. (P) meninggal dunia meninggalkan seorang istri (A) dan 3 orang anak perempuan (B,C,D). (P) juga meninggalkan seorang ibu (E) dan 2 saudara laki-laki (F,G). P meninggalkan harta bersama/harta gono-gini sebesar Rp 800.000.000,-
- Buatlah bagan pewarisannya
 - Siapaakah Ahli Waris dari P?
 - Berapa bagian masing-masing ahli warisnya?

Jawaban

a. Gambar bagan pewarisan



- b. Ahli waris adalah istri, 3 anak (B,C,D), ibu, 2 saudara laki-laki kandung
- c. Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA

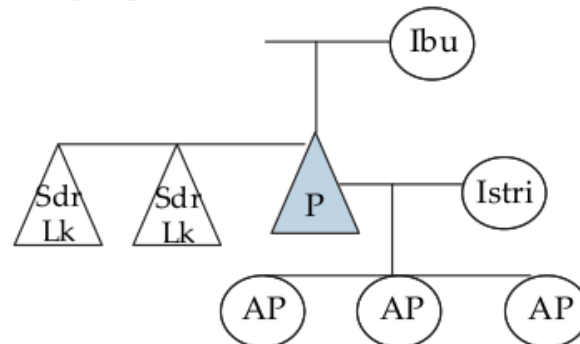
800.000.000

Ahli Waris		AM=24	TIRKAH	800.000.000
Istri	1/8	3	$3/24 \times 800.000.000$	100.000.000
3 Anak Perempuan,		16	$13/24 \times 800.000.000$	533.333.333
2 Saudara Laki-Laki	ashobah	1	$1/24 \times 800.000.000$	33.333.333
Ibu	1/6	4	$4/24 \times 800.000.000$	133.333.333
		24	TOTAL	800.000.000

11. Pada tahun 1940 terjadi perkawinan antara Tono dan Tini diperoleh 3 anak perempuan yang bernama Rita, Ratna, dan Rara. Pada tahun 1960 Tini meninggal dunia. Pada tahun 1970, Tono menikahi janda yang bernama Tina yang tidak memiliki anak. Ketika menikah dengan Tono, Tina membawa harta asal Rp 100.000.000. dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Bagus dan Bagas. Tahun 1980, Tina meninggal dunia. Pada tahun 1981 Tono meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan berupa tanah senilai Rp 300.000.000, sebuah mobil senilai Rp 150.000.000, sebuah rumah senilai Rp 250.000.000. Selama menikah dengan Tina, harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut berupa tambak udang² senilai Rp 350.000.000 dan tanah senilai Rp 150.000.000. Siapakah ahli waris Tono? berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jika dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian? (Buatlah bagan/skema pewarisannya).

Jawabannya

- a. Gambar bagan pewarisan



- b. Ahli waris adalah 3 anak perempuan (Rita, Rartna, Rara) dan 2 anak laki-laki (Bagas dan Bagus)
- c. Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA asal Tono

Tanah 300.000.000

Mobil 150.000.000

Rumah 250.000.000

HARTA asal Tina 100.000.000

harta bersama

tambah udang 350.000.000

Tanah 150.000.000

Total harta Tono (2/3 dari harta Bersama) 1.033.333.333

Total harta Tina (1/3 dari harta bersama) 266.666.667

Ahli Waris		AM=7	Tirkah	1.033.333.333
3 Anak Perempuan,	Ashobah	3	3/7 X 1.033.333.333	442.857.143
2 Anak Laki-Laki		4	4/7 X 1.033.333.333	590.476.190
Karena 2:1		7	TOTAL	1.033.333.333
Bagian Masing-Masing Anak				
1 Anak Perempuan	147.619.048			
1 Anak Laki-Laki	295.238.095			

- 2
12. Dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki (X) dan perempuan (Y) diperoleh dua anak perempuan (A) dan (B) serta dua anak laki-laki (C) dan (D). Pada tanggal 12-12-1975 (Y) meninggal dunia. Tahun 1979 (X) menikahi janda (Z) yang telah memiliki seorang anak laki-laki (E) dan perempuan (F), ketika menikah dengan X, Z membawa harta asal Rp 500.000.000. dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga anak laki-laki yaitu (G), (H), dan (I). tahun 1985 (C) menikah dengan (J) dan dikarunia dua orang anak perempuan yaitu (K) dan (L). tahun 1989 (C) meninggal dunia, pada tanggal 10-10-2009 (X) meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan berupa sebuah swalayan senilai Rp 300.000.000, sebuah mobil senilai Rp 120.000.000, sebuah tanah senilai Rp 150.000.000. selama menikah dengan Z, harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut sebesar Rp 600.000.000.

siapa ahli waris dari X? ² dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut, jika dalam perkawinan tersebut ada perjanjian? (Buatlah bagan/skema pewarisannya).

Jawaban

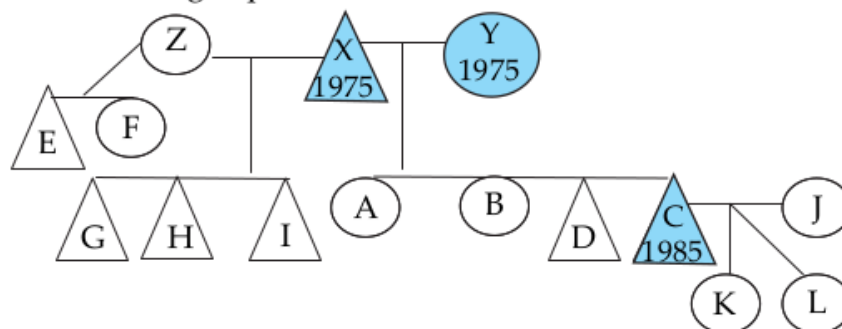
- Ahli waris P adalah Z, A, B, D, G, H, I
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA ASAL P TANAH	150.000.000
SWALAYAN	350.000.000
MOBIL	120.000.000
HARTA GONO GINI	600.000.000
HARTA BAWAAN Z	500.000.000
HARTA TOTAL P	920.000.000

Ahli Waris		AM=8	Tirkah	920.000.000
Istri	1/8	1	1/8 X 2.150.000.000	115.000.000
4 Anak Lk	ASOBAH	7	7/8 X 2.150.000.000	805.000.000
2 Anak Perempuan				
		8	TOTAL	920.000.000
jadi bagian masing-masing				
A			80.500.000	
B			80.500.000	
D			161.000.000	
G			161.000.000	
H			161.000.000	
I			161.000.000	
Z			915.000.000	

- Gambar bagan pewarisan



13. Seorang suami (P) meninggal dunia meninggalkan istri (A), 1 anak perempuan (B), dan ibu (C). Pewaris mempunyai hutang berjumlah Rp 50.000.000. Biaya pengurusan jenazah Rp 3.000.000 dan biaya perawatan selama sakit Rp 20.000.000. pewaris meninggalkan harta bawaan berupa tabungan sebesar 30.000.000 dan jumlah harta bersama adalah 200.000.000.
- Buatlah bagan!
 - Siapa AW?
 - Hitunglah bagian masing-masing AW!

Jawaban

- Ahli waris P adalah A,B,C
- Bagian masing-masing

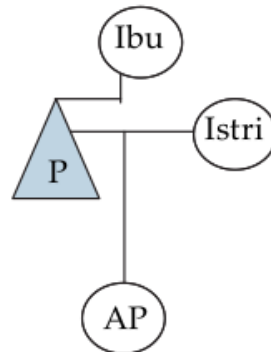
JENIS HARTA

HARTA bersama	200.000.000
harta asal	30.000.000
BIAYA RS	20.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	3.000.000
Hutang	50.000.000
bagian suami 1/2 dari Harta bersama	93.500.000,00
bagian istri 1/2 x Harta bersama	63.500.000,00

#**catatan:** pembagian harta bersama 1/2, apabila ada pencampuran harta dalam perkawinan namun, apabila Harta asal, hasil harta asal istri, maupun harta pencaharian istri kembali ke istri ada perjanjian atau tidak ada perjanjian maka bagian harta bersama, istri mendapatkan 1/3

Ahli Waris		AM=24	Tirkah	93.500.000,00
Istri	1/8	3	3/19 X	14.763.157,89
1 Anak Perempuan	1/2	12	12/19 X	59.052.631,58
Ibu	1/6	4	4/19 X	19.684.210,53
	radd	19	TOTAL	93.500.000,00

c. Gambar bagan pewarisan



14. Seorang isteri (P) meninggal dunia yang meninggalkan suami (A), Ibu (B), 2 Anak Perempuan (C,D). Harta Peninggalan sebesar Rp 100.000.000, Biaya RS berjumlah Rp 20.000.000, biaya pengurusan jenazah Rp 2.000.000. Pewaris mempunyai hutang Rp 10.000.000. Pewaris meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya (Y) sebesar Rp 16.000.000.

- Buatlah bagan!
- Siapa AW?
- Hitunglah bagian masing-masing AW!

Jawaban

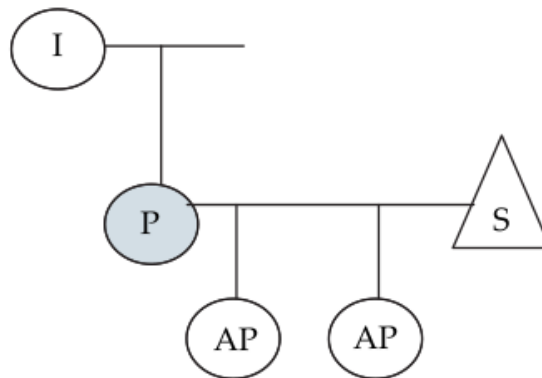
- Ahli waris adalah suami, ibu, 2 anak perempuan
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA	100.000.000
BIAYA RS	20.000.000
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH	2.000.000
HUTANG	10.000.000
WASIAT KEPADA Y	16.000.000
TOTAL HARTA PEWARIS	52.000.000,00

Ahli Waris		AM=12	Tirkah	52.000.000,00
Suami	1/4	3	3/13 X	12.000.000,00
2 Anak Perempuan	2/3	8	8/13 X	32.000.000,00
Ibu	1/6	2	2/13 X	8.000.000,00
	AUL	13	TOTAL	52.000.000,00
1 Anak Perempuan				16.000.000,00

c. Gambar bagan pewarisan



15. Roni seorang arsitek muda yang tinggal di Malang, mengalami kecelakaan pesawat dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengunjungi Arman sang kakek dan buyut dari jalur ayah. Selain kakek dan buyut dari ayah, Roni juga masih memiliki Dewi sang nenek dari jalur ibu serta Allan sang buyut dari jalur ibu. Sementara Ayah dan ibunya Roni sudah meninggal 13 tahun lalu.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 100 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Arman, Dewi
- Bagian masing-masing

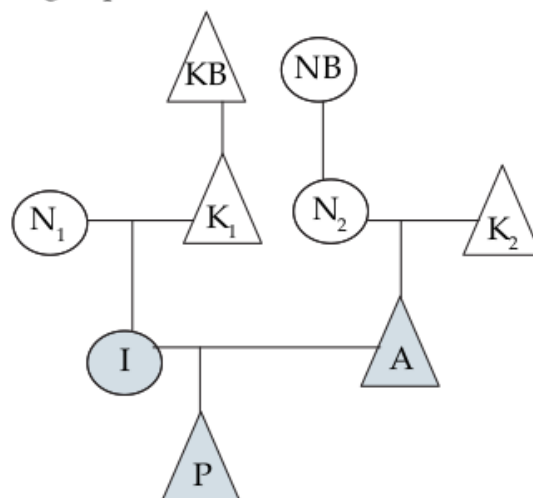
JENIS HARTA

HARTA

100.000.000

Ahli Waris		AM=3	Tirkah	100.000.000,00
Kakek	ashobah	2	$\frac{2}{3} X$	66.666.666,67
Nenek	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} X$	33.333.333,33
		3	TOTAL	100.000.000,00

c. Gambar bagan pewarisan



16. Indro seorang arsitek muda yang tinggal di Malang, mengalami kecelakaan pesawat dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengunjungi Armein sang kakek dan Mega sang nenek dari jalur ayah. Selain itu, Indro juga masih memiliki Tomi sang kakek serta Rika sang buyut dari jalur ibu. Sementara Ayah dan ibunya Indro sudah meninggal 17 tahun lalu.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 200 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Armein, Mega, Tomi, dan Rika
- Bagian masing-masing

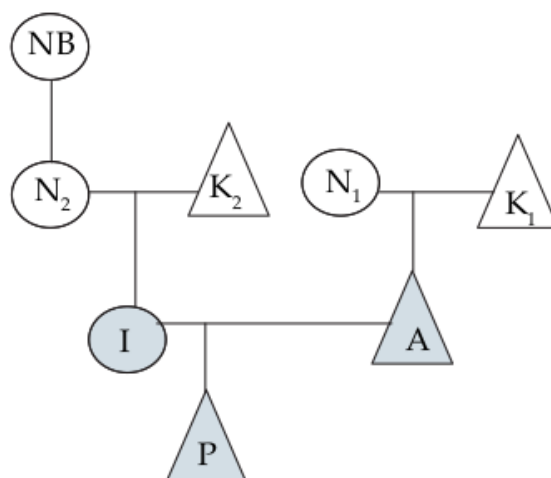
JENIS HARTA

HARTA

200.000.000

Ahli Waris		AM =3	Tirkah	200.000.000,00
2 Kakek	Ashobah	2	$\frac{2}{3} \times$	133.333.333,33
Nenek Dan Buyut	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times$	66.666.666,67
		3	TOTAL	200.000.000,00
1 Kakek				66.666.666,67
Nenek				33.333.333,33

c. Gambar bagan pewarisan



17. Tina seorang Pengusaha muda yang tinggal di Malang, mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Jogjakarta untuk mengunjungi Maman sang kakek dan Sartika sang buyut (Ibunya Nenek) dari jalur ayah. Selain kakek dan buyut dari ayah, Tina juga masih memiliki Anggi dan Oman sang nenek- kakek dari jalur ibu. Sementara Ayah dan ibunya Tina sudah meninggal 5 tahun lalu.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 250 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Maman, Sartika, Anggi, dan Oman
- Bagian masing-masing

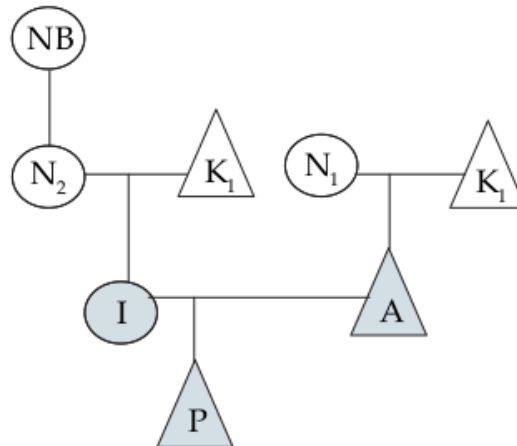
JENIS HARTA

HARTA

250.000.000

Ahli Waris		AM=3	Tirkah	250.000.000,00
2 Kakek	ashobah	2	$\frac{2}{3} X$	166.666.666,67
Nenek Dan Buyut	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} X$	83.333.333,33
		3	TOTAL	250.000.000,00
1 kakek nenek				83.333.333,33
				41.666.666,67

c. Gambar bagan pewarisan



18. Hari seorang Perancang Busana yang tinggal di Malang, mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengunjungi Sartika sang buyut (Ibunya Nenek) dari jalur ayah. Selain buyut dari ayah, Hari juga masih memiliki Amri sang buyut (ayahnya Kakek) dan Ani sang nenek dari jalur ibu. Sementara kedua orang tua Hari sudah meninggal terlebih dahulu.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 155 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Sartika, Amri, Ani
- Bagian masing-masing

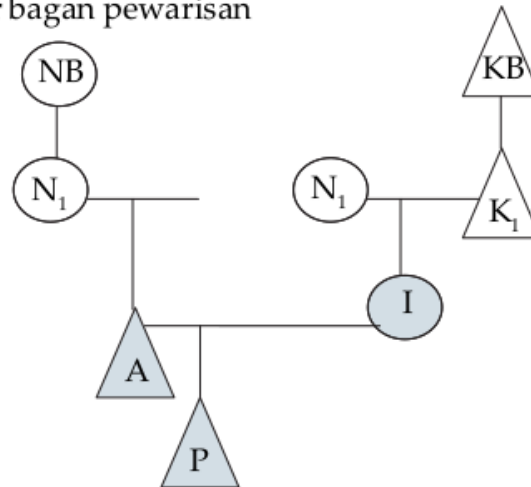
JENIS HARTA

HARTA

155.000.000

Ahli Waris		Am=3	Tirkah	155.000.000,00
1 Kakek (Ayah Dari Kakek)	Ashobah	2	$\frac{2}{3} X$	103.333.333,33
Nenek Dan Buyut	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} X$	51.666.666,67
		3	TOTAL	155.000.000,00
Kakek (Ayah Dari Kakek)				103.333.333,33
Nenek				25.833.333,33
Buyut				25.833.333,33

c. Gambar bagan pewarisan



19. Devo seorang arsitek muda yang tinggal di Malang, mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Bandung untuk mengunjungi Arman sang kakek dan Ice sang nenek (ayah-ibu dari jalur ayah). Selain kakek-nenek dari ayah, Devo juga masih memiliki Cris sang kakek (ayah dari jalur ibu) serta Ellian sang buyut (ibunya nenek dari jalur ibu). Sementara Ayah dan ibunya Devo sudah meninggal 8 tahun lalu.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 205 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Arman, Ice, Cris, dan Ellian
- Bagian masing-masing

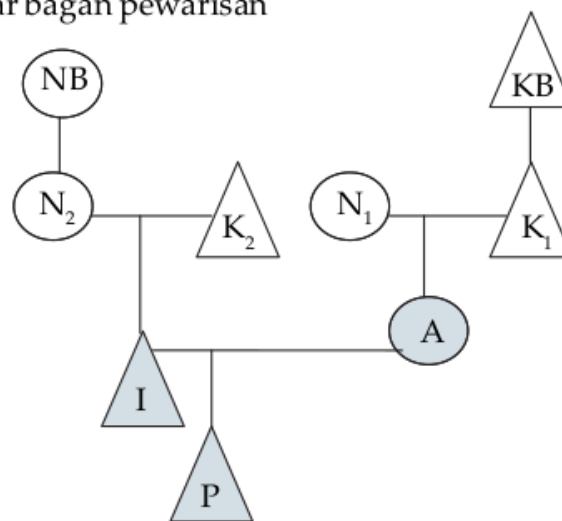
JENIS HARTA

HARTA

205.000.000

Ahli Waris		AM=3	Tirkah	205.000.000,00
2 Kakek	ashobah	2	$\frac{2}{3} X$	136.666.666,67
Nenek dan Buyut	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} X$	68.333.333,33
		3	TOTAL	205.000.000,00
1 kakek				68.333.333,33
nenek				34.166.666,67
buyut				34.166.666,67

c. Gambar bagan pewarisan



20. Meninggal dalam kecelakaan mobil, seorang Advokat Dea dalam perjalanan beracara ke Pengadilan di Gresik. Dea memiliki 2 (dua) paman dari jalur ayah yaitu Lim, dan Nam (namun Nam meninggal lebih dahulu dua tahun lalu) yang memiliki 2 (dua) anak yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun dari jalur Ibu ada 2 (dua) bibi yaitu Sisca dan Jessica (Jessicka meninggal lebih dahulu lima tahun lalu yang memiliki 3 anak, yaitu Zen, Min dan Yun) serta 1 (satu) paman yaitu Oscar, mereka sangat terpukul mengetahui Dea meninggal.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan!
- Tentukan ahli waris nya!
- Tentukan bagian masing-masing dengan harta waris yang ditinggalkan sejumlah 255 Juta!

Jawaban

- Ahli waris adalah Lim
- Bagian masing-masing

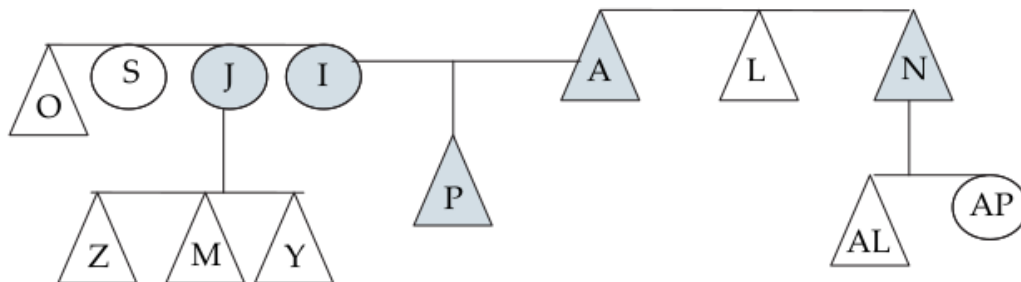
JENIS HARTA

HARTA

255.000.000

Ahli Waris		AM=1	TIRKAH	255.000.000
1 Paman Kandung Ayah	Ashobah	1	1/1 X	255.000.000
		1	TOTAL	255.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



21. Eka seorang diplomat yang sukses di Madura meninggal karena serangan jantung dalam perjalanan ke Malang untuk mengunjungi ayah dan ibu (Adi dan Ida) dan Nandi yang merupakan anak dari perkawinan pertamanya dengan Ika serta keponakannya, Eki anak dari kakak perempuannya yang sudah meninggal (Atin). Mendengar Kematian Eka, Ina sang istri dan Ila, Ali, Lia (anak Eka bersama Ina) yang berada di madura langsung berangkat menuju Malang untuk melakukan prosesi pemakaman.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan pewarisan!
- Tentukan ahli waris Pewaris!
- Tentukan bagian masing-masing ahli waris dengan harta yang ditinggalkan jika Eka memiliki Tabungan sejumlah Rp 50 Juta,, rumah senilai Rp. 500 Juta,- dan Mobil senilai Rp 250 Juta, Harta Gono Gini sebesar 350 Juta serta utang yang dimiliki Eka sebesar Rp 75 Juta-!

Jawaban

- Ahli waris adalah 2 istri, ayah dan ibu, 1 anak laki-laki dan anak perempuan
- Bagian masing-masing

JENIS HARTA

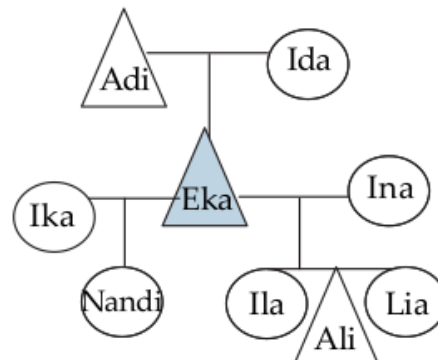
HARTA asal Eka

Tabungan	50.000.000
Rumah	500.000.000
Mobil	250.000.000
Uang	75.000.000

harta bersama	350.000.000
Total harta eka (1/3 dari harta Bersama)	991.666.667
Total harta istri 1 (1/3 dari harta bersama)	116.666.667
Total harta istri 2 (1/3 dari harta bersama)	116.666.667

Ahli Waris		AM=24	TIRKAH	
2 Istri	1/8	3	3/24 X	123.958.333
3 Anak Perempuan,	ashobah	13	13/24 X	537.152.778
1 Anak Laki-Laki				-
Ayah	1/6	4	4/24 X	165.277.778
Ibu	1/6	4	4/24 X	165.277.778
		24	TOTAL	991.666.667
Bagian Masing-Masing Anak				
1 Anak Perempuan				107.430.556
1 Anak laki-Laki				214.861.111
1 Istri				61.979.167
Bagian Istri Di Tambah HGG				178.645.833

c. Gambar bagan pewarisan



22. Ade seorang pengusaha pemula di Bogor meninggal karena serangan angin duduk dalam perjalanan ke Cirebon untuk mengunjungi Kakek dan Nenek (Aziz dan Zia) dan Edo dan Edi anak kembar dari perkawinan pertamanya dengan Aisa serta keponakannya yang bernama Aldo anak dari kakak perempuannya yang sudah meninggal (Ajeng). Mendengar Kematian Ade, Shantee sang istri serta Anee dan Inna (anak Ade bersama Shantee) yang berada di Bogor langsung menuju Cirebon untuk melakukan prosesi pemakaman.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan pewarisan!
- Tentukan ahli waris Pewaris!

- 4 c. Tentukan bagian masing-masing ahli waris dengan harta yang ditinggalkan berupa deposito sejumlah Rp 119 Juta,-, Harta gono-gini yang berupa rumah senilai Rp 450 Juta dan 1 buah mobil senilai Rp 225 Juta, sedangkan Ade memiliki utang sebesar Rp 80 Juta dan biaya rumah sakit sebesar 55 Juta serta biaya pemakaman sebesar Rp 30 Juta!

Jawaban

- a. Ahli waris adalah 2 istri, kakek dan nenek, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan
b. Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA asal Ade

Deposito	119.000.000
Hutang	80.000.000
biaya RS	55.000.000
Pemakaman	30.000.000
harta bersama	450.000.000
mobil bersama	225.000.000

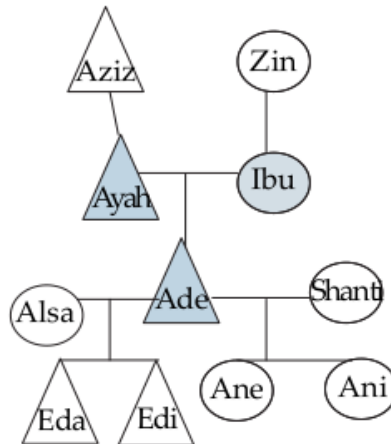
Total harta Ade ($\frac{1}{3}$ dari harta Bersama) 289.000.000

Total harta istri 1 ($\frac{1}{3}$ dari harta bersama) 170.000.000

Total harta istri 2 ($\frac{1}{3}$ dari harta bersama) 170.000.000

Ahli Waris		AM=24	TIRKAH	289.000.000
2 Istri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times$	36.125.000
2 Anak Perempuan,	Ashobah	13	$\frac{13}{24} \times$	156.541.667
2 anak laki-laki				-
Kakek	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times$	48.166.667
Nenek	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times$	48.166.667
		24	TOTAL	289.000.000
Bagian masing-masing anak				
1 anak perempuan				26.090.278
1 anak laki-laki				52.180.556
1 istri				18.062.500
bagian istri di tambah HGG				188.062.500

c. Gambar bagan pewarisan



23. Abdul wafat, meninggalkan seorang Istri (Dahlia), Ibu (Mery), seorang saudara perempuan sekandung (Alin) dan saudara seibu (Ana). Harta warisan yang ditinggalkan oleh Abdul sebanyak Rp 900.000.000,-. Tentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah istri, ibu, 1 sdr perempuan sekandung, 1 saudara perempuan seibu
- Bagian masing-masing

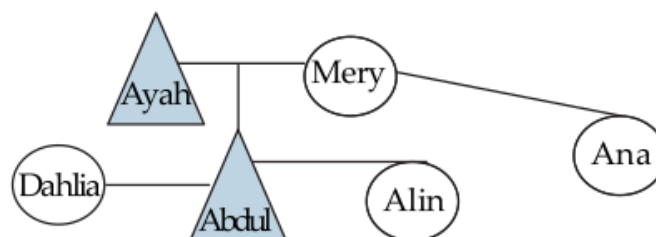
JENIS HARTA

HARTA

900.000.000

Ahli Waris		AM=12	TIRKAH	900.000.000
1 Sdr Perempuan Kdg	1/2	6	6/13 X	415.384.615
Ibu	1/6	2	2/13 X	138.461.538
1 Sdr Perempuan Seibu	1/6	2	2/13 X	138.461.538
Istri	1/4	3	3/13 X	207.692.308
	aul	13	TOTAL	900.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



24. Mohan meninggal, dengan meninggalkan ibu (Mariati), seorang saudara perempuan sekandung (Ummi), seorang saudara perempuan seayah (Amel). Harta yang ditinggalkan oleh Mohan sebesar Rp 850.000.000,-. Tentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah ibu, 1 sdr perempuan sekandung, 1 saudara perempuan seayah
- Bagian masing-masing

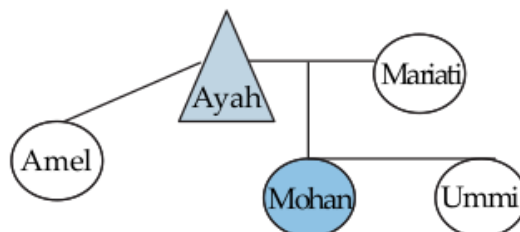
JENIS HARTA

HARTA

850.000.000

Ahli Waris		AM=6	TIRKAH	850.000.000
1 Sdr Perempuan Kdg	1/2	3	3/5 X	510.000.000
Ibu	1/6	1	1/5 X	170.000.000
1 Sdr Perempuan Sebpk	1/6	1	1/5 X	170.000.000
	Radd	5	TOTAL	850.000.000

- Gambar bagan pewarisan



25. Tina seorang Muslimah meninggal, dengan meninggalkan suami (Mahe), seorang anak perempuan (Lita) dan ibu (Nina). Jika total harta warisan yang ditinggalkan oleh Tina sebesar Rp. 700.000.000,- maka, berapa bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah suami, 1 anak perempuan, ibu
- Bagian masing-masing

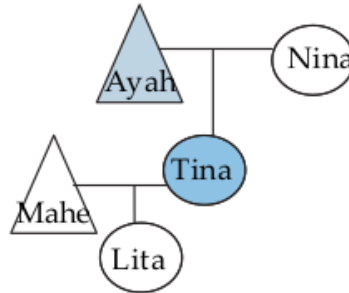
JENIS HARTA

HARTA

700.000.000

Ahli Waris		AM=12	TIRKAH	700.000.000
1 Anak Perempuan	1/2	6	6/11 X	381.818.182
Ibu	1/6	2	2/11 X	127.272.727
Suami	1/4	3	3/11 X	190.909.091
	radd	11	TOTAL	500.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



26. Rita meninggal, meninggalkan seorang suami (Roni), seorang ibu (Tini), dua saudara perempuan kandung (Lina dan Lili). Jika total harta warisan yang ditinggalkan oleh Rita sebesar Rp 500.000.000,- maka, berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan dengan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah suami, ibu, 2 sdr PEREMPUAN sekandung,
- Bagian masing-masing

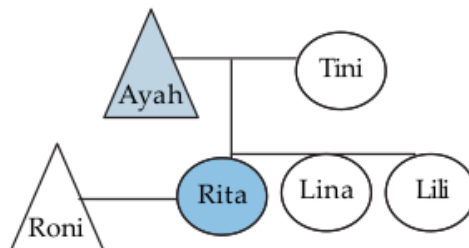
JENIS HARTA

HARTA

500.000.000

Ahli Waris		AM=6	TIRKAH	500.000.000
2 Sdr Perempuan Kdg	2/3	4	4/8 X	250.000.000
Ibu	1/6	1	1/8 X	62.500.000
Suami	1/2	3	3/8 X	187.500.000
	aul	8	TOTAL	500.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



27. Ahad meninggal, meninggalkan seorang Istri (Siti), Ibu (Riya), dua orang saudara perempuan sekandung (Anna dan Ani) dan saudara seibu (Rian). Harta warisan yang ditinggalkan oleh Ahad Sebanyak Rp 955.000.000,-. Tentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah istri, ibu, 2 sdr perempuan sekandung, dan 1 sdr perempuan seibu
- Bagian masing-masing

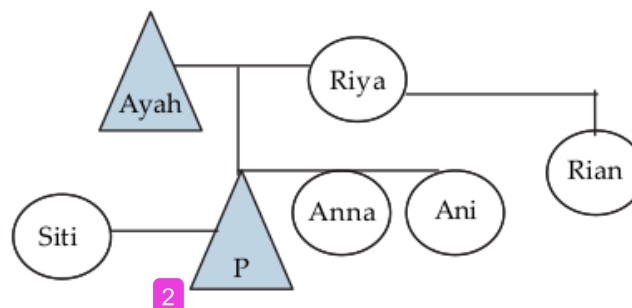
JENIS HARTA

HARTA

955.000.000

Ahli Waris		AM=12	TIRKAH	955.000.000
2 Sdr Perempuan Kdg	$\frac{2}{3}$	8	$\frac{8}{15} X$	509.333.333
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{15} X$	127.333.333
1 Sdr Perempuan Seibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{15} X$	127.333.333
Istri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{15} X$	191.000.000
Aul		15	TOTAL	955.000.000

- Gambar bagan pewarisan



28. Aldo meninggal, meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara seibu. Harta waris yang ditinggalkan oleh Aldo sebesar Rp 299.000.000,-. Tentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan hukum waris Islam.

Jawaban

- Ahli waris adalah 1 sdr PEREMPUAN sekandung, 1 sdr perempuan seayah, dan 1 sdr perempuan seibu
- Bagian masing-masing

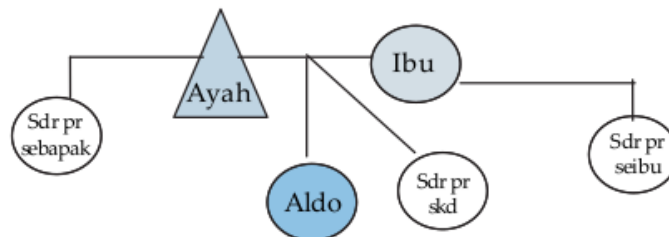
JENIS HARTA

HARTA

299.000.000

Ahli Waris		AM=6	TIRKAH	299.000.000
1 Sdr Perempuan Kdg	1/2	3	3/5 X	179.400.000
1 Sdr Perempuan Seapak	1/6	1	1/5 X	59.800.000
1 Sdr Perempuan Seibu	1/6	1	1/5 X	59.800.000
	radd	5	TOTAL	299.000.000

c. Gambar bagan pewarisan



29. Toni seorang Muslim meninggal, meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu. Jika total harta warisan yang ditinggalkan oleh Toni sebesar Rp 125.000.000,- maka, berapa bagian yang akan didapatkan oleh anak perempuan dan ibunya tersebut.

Jawaban

- Ahli waris adalah IBU, 1 anak PEREMPUAN
- Bagian masing-masing

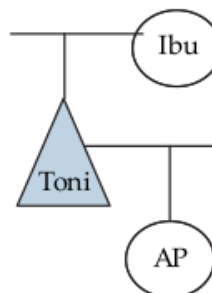
JENIS HARTA

HARTA

125.000.000

Ahli Waris		AM=6	TIRKAH	125.000.000
1 Anak Perempuan	1/2	3	3/4 X	93.750.000
Ibu	1/6	1	1/4 X	31.250.000
	radd	4	TOTAL	125.000.000

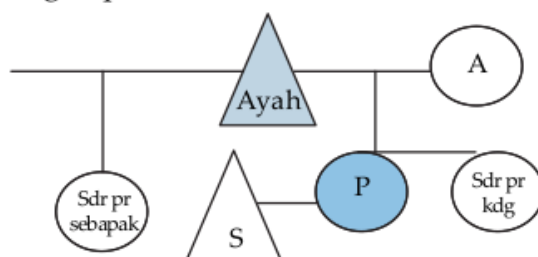
c. Gambar bagan pewarisan



30. Rita meninggal, meninggalkan seorang suami (Rino), seorang ibu yang bernama Nana, saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seapak. Jika total harta warisan yang ditinggalkan oleh Rita sebesar Rp 172.000.000,- maka, Tentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan hukum waris Islam.

Jawaban

- a. Gambar bagan pewarisan Rita



- b. Ahli waris Rita adalah Suami, ibu, saudara perempuan kandung seorang, 1 saudara perempuan seapak
c. Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA

172.000.000

Ahli Waris		AM=6	TIRKAH	172.000.000
Suami	1/2	3	3/8 X	64.500.000
1 Sdr PEREMPUAN Kdng	1/2	3	3/8 X	64.500.000
1 Saudara Pr Sebpk	1/6	1	1/8 X	21.500.000
Ibu	1/6	1	1/8 X	21.500.000
	aul	8	TOTAL	172.000.000

31. B menikah dengan A dengan dikaruniai tiga anak perempuan bernama Serf, Sila dan Priska serta tiga anak laki-laki bernama, Haera, Giri, dan Irlita. Pada bulan Februari 2016 lalu, B beserta A mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan keduanya meninggal di tempat kejadian. Anak-anak mereka dan M (Saudara kandung laki-laki dan perempuan A) sangat sedih dengan kepergian mereka

Harta yang ditinggalkan oleh B dan A adalah:

- Harta bawaan A senilai Rp. 50.000.000
- Harta bawaan B senilai Rp. 100.000.000
- Harta pencaharian A sebesar Rp. 200.000.000

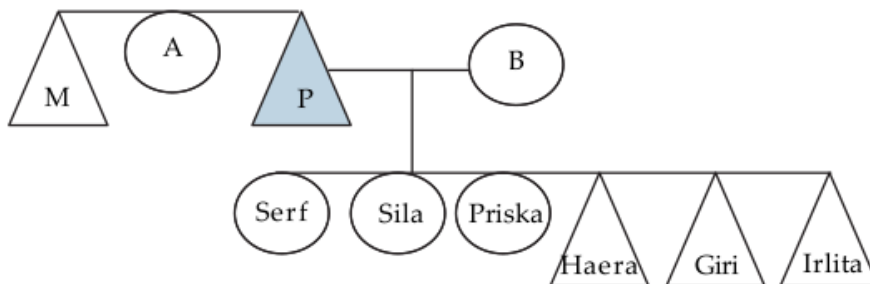
- Harta pencaharian B sebesar Rp. 250.000.000
- Harta pemberian A sebesar Rp. 275.000.000
- Harta pemberian B sebesar Rp. 225.000.000
- Harta bersama A dan B sebesar Rp. 560.000.000

Tugas!

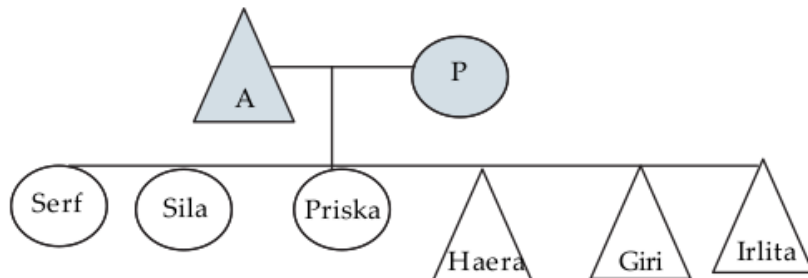
1. Buatlah bagan Pewarisannya!
2. Siapakah ahli warisnya? Berapakah bagian masing - masing ahli waris?

Jawaban

- a. Gambar bagan pewarisan A (apabila A meninggal lebih dulu dari B)



Gambar bagan pewarisan B (apabila, B meninggal setelah A)



- b. Ahli waris A dan bagian masing-masing adalah istri, 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki

JENIS HARTA

Harta A	
Harta Asal	50.000.000
Pencaharian	200.000.000
Pemberian	275.000.000
Bersama	560.000.000
total Harta A	831.666.667

Ahli Waris		AM=8	TIRKAH	831.666.666,67
Istri	1/8	1	1/8 X	103.958.333,33
2 Anak Perempuan	ashobah	7	7/8 X	727.708.333,33
6 Anak Laki2				
		8	TOTAL	831.666.666,67
1 Anak Laki-Laki				103.958.333
1 Anak Perempuan				51.979.167
Istri				103.958.333,33

- c. Ahli waris B dan bagian masing-masingnya adalah 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki

JENIS HARTA

Harta A

Harta Asal	50.000.000
Pencapaian	200.000.000
Pemberian	275.000.000
Bersama	560.000.000
total Harta A	831.666.667

Ahli Waris B		AM=14	TIRKAH	865.625.000,00
2 Anak Perempuan	Ashobah	2	2/14 X	123.660.714,29
6 Anak Laki2		12	12/14 X	741.964.285,71
		14	TOTAL	865.625.000,00
1 Anak Laki-Laki				123.660.714
1 Anak Perempuan				61.830.357

32. Klien sebagai kakak (A) yang berasal dari Mergosono

Kasus posisi :

A memiliki adik (B), B sudah menikah dengan (C) dan memiliki anak-anak (D,E). pada saat itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan B,C,D dan E meninggal di saat yang sama. Bagaimanakah penyelesaian warisnya bu?

Jawaban Konsultan :

Seluruh harta harus dikurangi dulu dengan utang-utang dan biaya perawatan jenazah. Jika sudah dikurangi maka namanya Harta Waris (harta yang sudah siap untuk dibagikan ke Ahli Waris). Harta Waris di bagi menjadi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pihak keluarga suami dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak keluarga isteri. Ahli Waris (orang yang berhak menerima

harta waris) di pihak keluarga suami yang masih ada yaitu ibu mendapatkan ($\frac{1}{6} \times$ Harta Waris) dan saudara-saudaranya (Ashobah yaitu sisa Harta Waris dengan perbandingan 1:2). serta Ahli Waris (orang yang berhak menerima harta waris) di pihak keluarga isteri yang masih ada yaitu ibu mendapatkan ($\frac{1}{6} \times$ Harta Waris) dan saudara-saudaranya (Ashobah yaitu sisa Harta Waris dengan perbandingan 1:2).

33. Di suatu daerah ada seorang Tuan A menikah dengan Nyonya B, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki (C dan D) dan 2 orang anak perempuan (E dan F).

Harta asal A adalah kebun kelapa sawit warisan dari kakek buyutnya senilai Rp 1.100.000.000, toko minimarket senilai Rp 400.000.000 dan 2 unit mobil senilai Rp 300.000.000. Harta asal B terdiri dari rumah peninggalan orang tuanya senilai Rp 250.000.000, mobil senilai Rp 200.000.000 dan perhiasan senilai Rp 75.000.000.

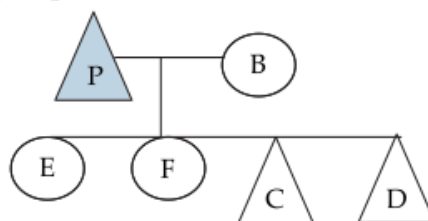
Harta gono-gini mereka adalah RP 900.000.000

Pertanyaan:

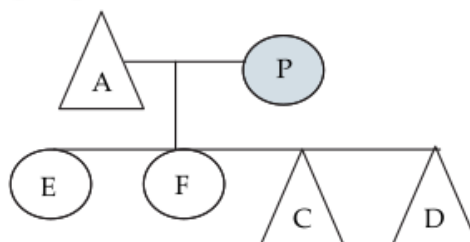
- Buatlah bagannya
- Siapa ahli waris dan berapa bagiannya jika A sebagai pewaris hukum waris Islam!
- Siapa ahli waris dan berapa bagiannya jika B sebagai pewaris hukum waris Islam!

Jawaban

- a. Gambar bagan pewarisan A



Gambar bagan pewarisan B



- b. Ahli waris A adalah istri, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki

JENIS HARTA

Harta Bersama	900.000.000
Harta Asal A	
Perkebunan Sawit	1.100.000.000
Minimarket	400.000.000
2 Mobil	300.000.000
Harta Asal B	
Rumah	250.000.000
Mobil	200.000.000
Perhiasan	75.000.000
Total Harta A	2.250.000.000
Total Harta B	975.000.000

Ahli Waris A		AM=8	Tirkah	2.250.000.000,00
Istri	1/8	1	1/8 X	281.250.000,00
2 Anak Perempuan	Ashobah	7	12/19 X	1.968.750.000,00
2 Anak Laki2				
		8	TOTAL	2.250.000.000,00
1 Anak Laki-Laki				656.250.000
1 Anak Perempuan				328.125.000

- c. Ahli waris B adalah Suami, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki

JENIS HARTA

Harta Bersama	900.000.000
Harta Asal A	
Perkebunan Sawit	1.100.000.000
Minimarket	400.000.000
2 Mobil	300.000.000
Harta Asal B	
Rumah	250.000.000
Mobil	200.000.000
Perhiasan	75.000.000
Total Harta A	2.250.000.000
Total Harta B	975.000.000

Ahli Waris B		AM=4	TIRKAH	975.000.000,00
Suami	1/4	1	1/4 X	243.750.000,00
2 Anak Perempuan	ashobah	3	3/4 X	731.250.000,00
2 Anak Laki2				
		4	TOTAL	975.000.000,00
1 Anak Laki-Laki				243.750.000
1 Anak Perempuan				121.875.000

34. Di daerah M terdapat seorang pria P yang memiliki istri lebih dari satu. Di perkawinan pertama P menikahi A dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu B,C, dan D. di perkawinan kedua P menikahi E dan dikaruniai seorang anak laki-laki (F) dan seorang anak perempuan (G). dan perkawinan yang ketiga P menikahi H dan dikaruniai 4 orang anak perempuan yakni I,J,K,L dan satu orang anak laki-laki (M). Dalam pernikahan P membawa harta asal yakni Tanah kebun dari orang tuanya senilai Rp 800.000.000, sawah senilai Rp 250.000.000, dan sebuah rumah senilai Rp 400.000.000. Kemudian P meninggal dunia.

Pertanyaan:

- Buat bagannya dan siapakah ahli warisnya?
- Bagaimana sistem pewarisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris, apabila harta gono-gini sebesar:
 - Perkawinan P dengan A = Rp 750.000.000
 - Perkawinan P dengan E = Rp 450.000.000
 - Perkawinan P dengan H = Rp 700.000.000

Jawaban

- Bagian masing-masing

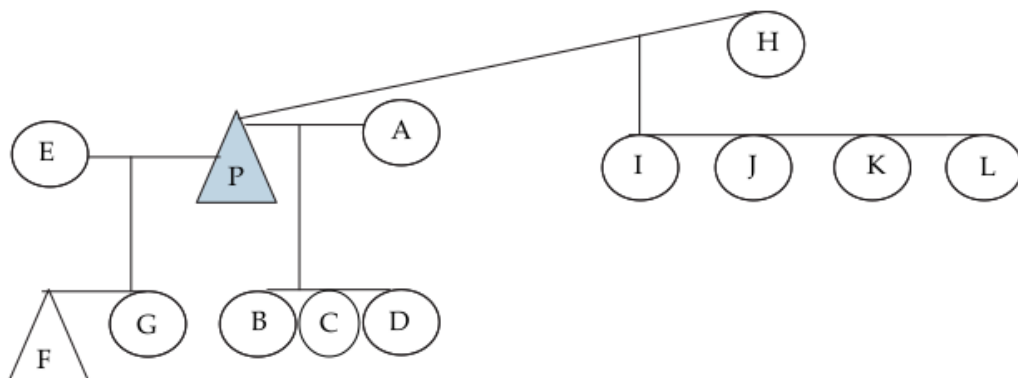
JENIS HARTA

HARTA ASAL P TANAH	800.000.000
SAWAH	250.000.000
RUMAH	400.000.000
HARTA GONO GINI A	750.000.000
HARTA GONO GINI E	450.000.000
HARTA GONO GINI H	700.000.000

BAGIAN P			menurut putusan Mahkamah
dengan A	375.000.000		Agung (MA), Bahwa @1/2
dengan E	150.000.000		menurut putusan MA, Bahwa
dengan H	175.000.000	@1/3	
Total	700.000.000		menurut putusan MA, Bahwa
total harta P	2.150.000.000	@1/4	

Ahli Waris		AM=8	TIRKAH	2.150.000.000
3 Istri	1/8	1	1/8 X 2.150.000.000	268.750.000
2 Anak Lk	asobah	7	7/8 X 2.150.000.000	1.881.250.000
8 Anak Perempuan				
		8	TOTAL	2.150.000.000
Jadi bagian masing-masing				
A				464.583.333
E				239.583.333
F				264.583.333
B				156.770.833
C				156.770.833
D				156.770.833
I				156.770.833
J				156.770.833
K				156.770.833
L				156.770.833
M				313.541.667
F				313.541.666,7
G				156.770.833

b. Gambar bagan pewarisan



35. B (perempuan) yang berasal dari Tajinan kabupaten Malang melakukan konsultasi hukum waris ke Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang.

Kasus Posisi:

2 bersaudara (A dan B, laki-laki dan perempuan). B menghendaki agar segera dibagi Harta waris yang dari orang tuanya karena B mau ke Kalimantan. Namun A selalu menunda-nunda untuk melakukan pembagian Harta Waris (karena A sudah diberi oleh orang tuanya).

Jawaban Konsultan:

Dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan A, hasil musyawarah harus ada hitam di atas putih (tertulis, bermaterai dan ada saksi-saksinya). jika menurut aturan hukum waris Islam maka B mendapatkan $\frac{1}{3} \times$ Harta Waris, dan A mendapatkan $\frac{2}{3} \times$ Harta Waris. Disarankan oleh konsultan untuk kembali lagi melakukan konsultasi jika sudah melakukan musyawarah dengan A.

36. Sudarsono menikah dengan Sulistina pada Tahun 1965 dengan dikaruniai lima anak, yaitu Wardino, Mulyono, Namira, Amanah, dan Deliyo. Tahun 1974, karena melahirkan putra ke enam dengan diberi nama Derinda dan Sulistina meninggal. Pada tahun 1959, Sudarsono mengakui kembar 2 anak luar kawin dengan perempuan asal Sorong. Tahun 1983, Sudarsono menikah lagi dengan perempuan asal Tiongkok yang bernama Chin Anastasya. Dengan pernikahan kedua ini, Sudarsono dikaruniai 3 anak, yaitu melisa, Doni, dan Aryanda. Tahun 2000, Namira (lahir tahun 1970) melahirkan anak kembar yang diberi nama Feri dan Fero dan meninggal sesaat setelah melahirkan. Di saat yang sama, Wardino kakak sulung Namira mengalami sakit jantung atas meninggalnya Namira. Wardino sendiri mempunyai seorang istri bernama Lula dan 4 anak, yaitu Nevo, Arya, Dina dan Denda. Tahun 2016, Aryanda (lahir tahun 1987) menikah dengan seorang gadis asal Banyuwangi bernama Berlian. Satu tahun kemudian, Mulyono (putra ke-2 lahir tahun 1965 dari pernikahan pertama Sudarsono) menikahkan putra pertamanya bernama Setyo di Bandung. Dalam perjalanan pulang ke Solo, kendaraan rombongan Sudarsono mengalami kecelakaan yang menyebabkan Sudarsono meninggal di tempat dan yang lainnya mengalami luka berat.

Sudarsono memiliki dua saudara dan seorang bibi, aset di perusahaan X senilai Rp. 100 Juta. Memiliki apartemen di wilayah Jakarta dengan senilai Rp. 500 Juta, rumah di Solo senilai Rp. 90 Juta, perkebunan 2 Hektar senilai Rp. 150 Juta dan Villa senilai Rp 700 Juta di Bogor. Hutang di Bank B senilai Rp. 600 Juta

Tugas:

1. Bagan pewarisannya!
2. Siapa ahli warisnya!
3. Pembagian harta waris:
 - a. Apabila tidak ada perjanjian Perkawinan
 - b. Ada perjanjian Perkawinan
4. Bagian masing-masing ahli waris.

Jawaban

- a. Ahli waris Sudarsono adalah Chin Anastasa, Mulyono, Amanah, Deliyo, Derinda, Melisa, Doni, Aryanda.
- b. Bagian masing-masing bila tidak ada perjanjian (setelah Undang-Undang Perkawinan/UUP) pembagian hukum waris Islam? Harta tidak ada Perjanjian setelah UUP

Harta Asal Sudarsono

Aset	100.000.000
Apartemen	500.000.000
Rumah di solo	90.000.000
Perkebunan	150.000.000
Vila	700.000.000
Hutang di bank M	600.000.000
Total harta tidak ada perjanjian	940.000.000

Ahli Waris A		AM=8	TIRKAH	940.000.000,00
Istri	1/8	1	1/8 X	117.500.000,00
2 Anak Perempuan	ashobah	7	12/19 X	822.500.000,00
6 Anak Laki2				
		8	TOTAL	940.000.000,00
1 Anak Laki-Laki				117.500.000
1 Anak Perempuan				58.750.000
Istri				117.500.000,00

- c. Bagian masing-masing apabila ada perjanjian (setelah UUP) pembagian hukum Islam

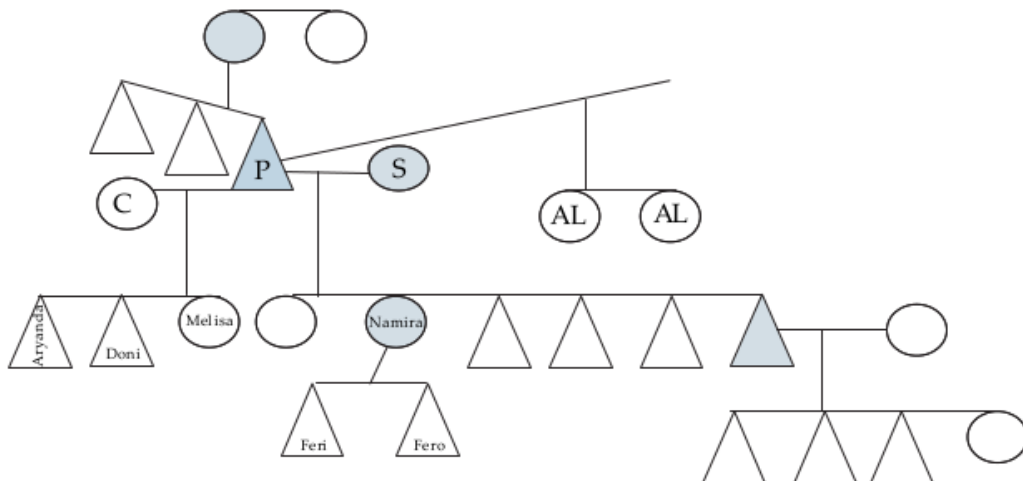
Harta ada perjanjian setelah UUP

Harta Asal Sudarsono

Aset	100.000.000
Apartemen	500.000.000
Rumah di solo	90.000.000
Perkebunan	150.000.000
Vila	700.000.000
Hutang di bank M	600.000.000
Total harta ada perjanjian	470.000.000

Ahli Waris B		AM=8	TIRKAH	470.000.000,00
Istri	1/8	1	1/8 X	58.750.000,00
2 Anak Perempuan	ashobah	7	7/8 X	411.250.000,00
2 Anak Laki2				
		8	TOTAL	470.000.000,00
1 Anak Laki-Laki				58.750.000
1 Anak Perempuan				29.375.000
Istri				528.750.000

- d. Gambar bagan pewarisan



37. Pak Saman (A), Singosari Kabupaten Malang.

Kasus Posisi:

(B) Bapak kandung nya A sudah meninggal, sedangkan (C) ibu kandung nya A masih hidup. B dan C memiliki 5 anak (A, D, E, F dan G). Harta waris sudah dibagikan kepada ahli waris (C) mendapatkan Harta Waris dan sudah sesuai dengan bagiannya, sedangkan anak-anak (A, D, E, F dan G) mendapatkan bagiannya namun tidak 1:2 (ada yang menerima lebih besar dan ada yang menerima lebih kecil).

Jawaban konsultan:

- a. Dimusyawarahkan dengan keluarga
- b. Jika ada yang menerima berlebih (melebihi bagiannya) maka harus dipotong (disusuki)
- c. Jika ada yang menerima kurang (tidak sesuai dengan bagiannya) maka harus menerima tambahan
- d. Ada salah satu anak-anak (A, D, E, F dan G) menyampaikan bahwa sudah menerima aja bagiannya (nrino), namun ada anak-anak yang menginginkan yang adil bagaimana karena ada salah satu menantu yang non muslim???
- e. Disarankan agar kembali lagi untuk konsultasi setelah bermusyawarah dengan keluarga.

38. Pak Rustam (A)

Kasus posisi:

Pak Rustam (A) memiliki isteri (B) dan (B) memiliki bapak ibu (C dan D). Yang akhirnya (C) meninggal dunia dan (D) masih hidup. (B) memiliki adik-adik (E,F,G). kemudian semasa hidupnya (B) membiayai dan merawat adik-adiknya (E,F,G). dan (C) saat masih hidup pernah berucap bahwa harta milik (C) milik (B) semuanya karena (B) lah yang membesarkan adik-adiknya (E,F,G). Salah satu dari E,F,G ini sudah diberi hibah oleh C. Kemudian (B) meninggal dunia. Pak Rustam (A) menikah lagi dengan (X). Perkara ini sudah sampai Mahkamah Agung (Kasasi) dan (A) kalah.

pembagian harta waris saat C sebagai Pewaris?

Jawaban konsultan:

Maka (D) mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan anak-anak (B, E,F,G) mendapatkan Ashobah (sisa) dengan perbandingan 1:2 lebih lanjut diharapkan untuk konsultasi lagi.

39. Pak Ruly (A), Perumahan Pesona, Singosari Kabupaten Malang
Kasus Posisi:

Bapak (B) dan ibu (C) memiliki anak (A,D,E). Kemudian C meninggal dunia, sedangkan B menikah lagi dengan perempuan (X). Bagaimanakah pembagian warisnya?

Jawaban konsultan:

Saat C sebagai Pewaris, maka pembagiannya adalah Harta Gono-Gini (HGG) dibagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ untuk B dan $\frac{1}{2}$ untuk C, kemudian $\frac{1}{2}$ untuk C menjadi Harta Waris, maka B mendapatkan $\frac{1}{2}$ HGG + $\frac{1}{4}$ HW sedangkan sisanya (Ashobah) untuk anak-anak (A,D,E).

Saat B sebagai Pewaris, maka pembagiannya adalah B mendapatkan ($\frac{1}{2}$ HGG + $\frac{1}{4}$ HW + $\frac{1}{2}$ HGG dengan X). Maka inilah HW nya B, yang siap dibagikan ke anak-anak dan isteri (X).

Saran dari konsultan:

- Seharusnya seluruh pihak datang untuk konsultasi agar tidak terjadi konflik.
- Diharapkan konsultasi lagi setelah dilakukan kumpul keluarga dengan seluruh Ahli Waris (AW)

40. Ibu 'Aisyiyah di Temenggungan

Pertanyaan klien:

Jika Pewaris memiliki anak angkat, tidak memiliki anak kandung, namun saat Pewaris sakit yang merawat orang lain (bukan anak angkat) nya.

Jawaban Konsultan:

- Dilakukan musyawarah dengan seluruh Ahli Waris
- Anak angkat orang yang merawat bagiannya maksimal $\frac{1}{3}$ x Harta Waris
- Sisa Harta Waris (Ashobah) menjadi milik saudara-saudara Pewaris

41. Bu Aminah, Songsong, Singosari Kabupaten Malang

Pertanyaan dari klien:

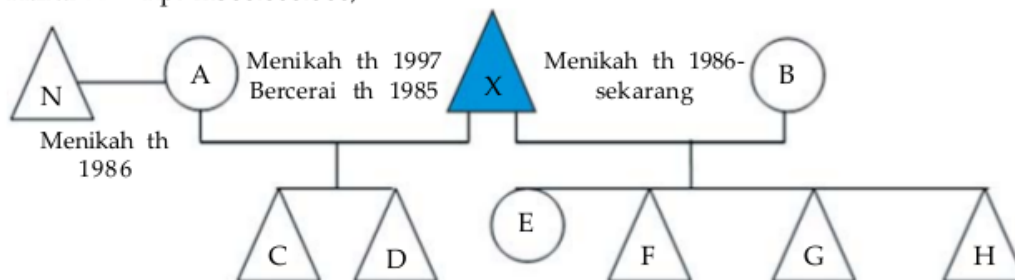
Bagaimana cara mematuhi aturan hukum Islam mengenai warisan?

Jawaban konsultan:

- 1) Datang ke seluruh Ahli waris untuk bermusyawarah
- 2) Maunya apa dan bagaimana cara pembagiannya?
- 3) Prinsip hukum waris Islam 1:2, dan jika anak-anaknya perempuan semuanya maka saudara-saudara Pewaris memiliki hak untuk mendapatkan waris. namun ada surat edaran Mahkamah Agung (Yurisprudensi, yang mana boleh digunakan juga boleh tidak digunakan) yang berlandaskan Q.S An-Nisa' ayat 33, bahwa jika anak-anak Pewaris semuanya adalah perempuan maka saudara-saudara pewaris tidak menjadi ahli waris
- 4) Disarankan untuk konsultasi lagi
- 5) Harapan bisa dilakukan tindak lanjut dalam pengabdian ini

X meninggal pada 2 Agustus 2016

Harta X = Rp. 2.500.000.000,-



Tugas:

1. Tentukan ahli waris X?
2. Berapa bagian masing-masing ahli waris

Jawaban

- a. Ahli waris X adalah B, C,D, E,F,G,H
- b. Bagian masing-masing Ahli Waris?

JENIS HARTA

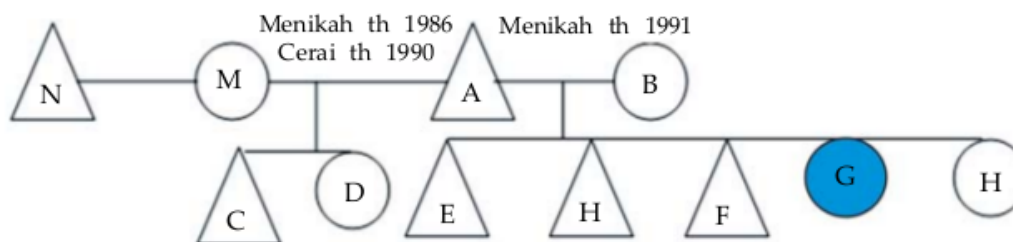
HARTA

2.500.000.000

Ahli Waris		AM=8	Tirkah	2.500.000.000
Istri	1/8	1	1/8 X 2.500.000.000	312.500.000
1 Anak Perempuan,	ashobah	7	7/8 X 2.500.000.000	2.187.500.000
5 Anak Laki-Laki				
		8	Total	2.500.000.000
1 Anak Perempuan				198.863.636
1 Anak Laki-Laki				397.727.273

G meninggal pada 12 Oktober 2016

Harta H = Rp. 7.500.000.000,-



Tentukan:

1. Siapakah ahli waris G?
2. Bagian masing-masing ahli waris?

Jawaban

- a. Ahli waris G adalah A,B
- b. Bagian masing-masing

JENIS HARTA

HARTA

7.500.000.000

Ahli Waris		Am=3	Tirkah	7.500.000.000
Ibu	1/3	1	$1/3 \times 7.500.000.000$	2.500.000.000
Ayah	Ashobah	2	$2/3 \times 7.500.000.000$	5.000.000.000
		3	Total	7.500.000.000

42. Pada tanggal 15 Januari 2015, ibu T, menghubungi penulis sebagai konsultan hukum melalui telp untuk konsultasi mengenai hukum waris, dan menceritakan sesuai dengan kasus posisi, kemudian pada tanggal 19 Januari 2015 ibu T mengirimkan surat dan semua berkas-berkas pendukung para Pewaris dan berkas-berkas pendukung para Ahli Waris.

Kasus posisi:

Pada tanggal 7 November 1968 terjadi perkawinan antara M (Alm), (Lahir di S, 17 Agustus 1941) dan S (Alm), (Lahir di M, 15 Februari 1943), kemudian pada tanggal 16 November 1969 lahir anak laki-laki yang bernama F, kemudian pada tahun 1972 lahir anak laki-laki yang kedua yang bernama B.

Selama perkawinan berlangsung M dan S memiliki harta berupa:

- a. Sebidang Tanah Dan Bangunan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.XXX, Gambar situasi no XXXX/1986 Kel.Pelabuhan, Kec. S, Kota S, Luas 973 M2 , A.n M. , Yang Terletak Di Jl.Sei Kalian No. XXX, Kel.Pelabuhan, Kec. S, Kota S;
 - b. Tiga buah unit Rumah Toko/Ruko, sebagaimana:
 - Sertifikat Hak Milik No.XXXX, Surat Ukur No XXXX/D/2003 Kel. D, Kec.L, Kota M, Luas97m2 , A.n M
 - Sertifikat Hak Milik No.XXXX, Surat Ukur No XXXX/D/2003 Kel. D, Kec.L, Kota M, Luas 99m2 , A.n M.
 - Sertifikat Hak Milik No. XXXX, Surat Ukur No XXXX/D/2003 Kel. D, Kec.L, Kota M, Luas 97m2 , A.n M yang kesemuanya tiga unit ruko tersebut terletak di Jl. M, Kel. D, Kec. L, Kota M.
 - c. Sebidang Tanah Dan Bangunan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 559 Gambar Situasi no 1228 tahun 1989 Kel. Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Luas 4150 M² , A.N Dr. M. Yunus Rasyid, M.A, yang Terletak Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
 - d. Sebidang Tanah Kosong, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1105, Gambar Situasi No 4976/1990 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Luas 3560 m², A.N Dr. M. Yunus Rasyid, M.A, yang Terletak Di Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
 - e. Sebidang Tanah Sawah, Sebagaimana Setifikat Hak Milik No.XXXX, Surat Ukur No XXXX/J/1999, Kel. J, Kec.L, Kota M Luas 1413 m², A.n M., yang Terletak Di Kel. J, Kec. L, Kota M.
43. Pada hari Rabu, 19 Oktober 1994 anak laki-laki yang bernama B meninggal dunia karena kecelakaan, pada usia 22 tahun. Pada hari sabtu 25 Pebruari 2006 S meninggal dunia karena sakit.

Kemudian pada hari senin 31 Desember 2007 M meninggal dunia karena sakit, dan pada hari Minggu, 16 Oktober 2011 F meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua M dan S semua sudah meninggal dunia.

1. Kedua orang tua kandung dari **M** telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. **R Bin** meninggal tanggal 10 Juli 1968, Surat Keterangan No XXX/57/1007-V/IV/2013, yang diterbitkan oleh Kelurahan M, Kec. S, Kota S.
 - b. **F** meninggal tanggal 22 Maret 2002, Surat Keterangan No : XXXX/108/GK-IV/2013, yang diterbitkan oleh Kelurahan G, K, Kota S;
2. Kedua orang tua kandung dari **S** telah meninggal dunia, yaitu :
 - a. **SJ** meninggal 2 Desember 2012, Surat Kematian No 474.3/83/...../2012 diterbitkan oleh Kelurahan Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang
 - b. **SB Binti** (**Alm**) meninggal 30 Juni 1973, Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit xxxx tertanggal 30 Juni 1973

Seluruh harta yang dimiliki masih atas nama M sesuai dengan yang terlampir di sertifikat. Bagaimanakah penyelesaiannya jika yang ada sekarang tinggal para saudara kandung dari M. dan para saudara kandung dari S?

1. **M** memiliki saudara kandung yaitu:
 - a. **SITI**
 - b. **MUHAMMAD**, yang telah meninggal tanggal 2 Januari 1981, Surat Kematian no : XXXX/48/2008 yang diterbitkan oleh Kelurahan K, Kec. S, Kota S. Memiliki 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - i. **AHMAD**
 - ii. **IHSAN**
 - c. **SYACHRUDDIN**, yang telah meninggal pada tanggal 12 Maret 2004, Surat Kematian no XXXX/27/1001/2004 yang diterbitkan oleh Kelurahan S, Kec. S, Kota S. Memiliki 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - i. **KESRA**

ii. **MARGA**

iii. **IQRO**

- d. **YUSUF**, yang telah meninggal tanggal 24 Juli 2000, Surat Kematian no : XXX/KJ-OBTA/VIII/2000, yang diterbitkan oleh Kelurahan K, Kec. B, Kota B. Memiliki 6 (enam) orang ahli waris:

i. **ETIKA**

ii. **RACHMAT**

iii. **ACHMADI**

iv. **MULKAM**

v. **SIERRA**

vi. **MUDZAKKIRO**

e. **DIAH**

f. **TINAH**

- g. **NAILAH**, yang telah meninggal tanggal 2 November 2013, Surat Keterangan Kematian No : XXXX/62/KESRA/XI/2013. Memiliki 2 (dua) orang ahli waris :

i. **RILA**

ii. **RANDI**

h. **RANI**

i. **YARAH**

j. **MANAN**

k. **SYAHYUNI**

Yang selanjutnya diwakili oleh **TINAH**

2. **S** memiliki saudara kandung yaitu:

a. **YATI**

b. **BUDI**

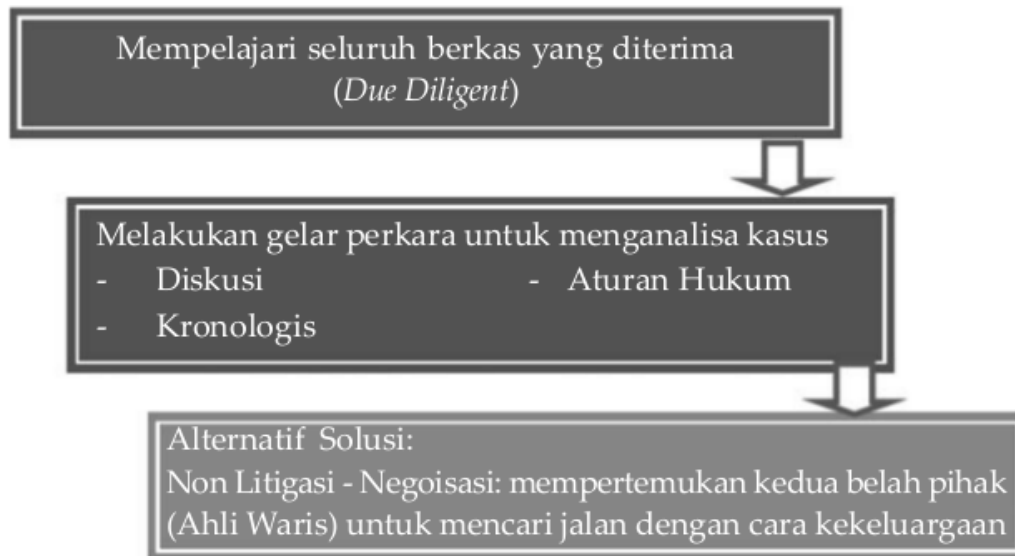
Yang selanjutnya diwakili oleh **BUDI**

Penyelesaiannya:

Pada dasarnya jika menganut hukum waris Islam maka yang berhak untuk menjadi Ahli Waris adalah para saudara kandung M karena Pewarisnya adalah F (berdasarkan yang meninggal paling akhir), namun karena seluruh Harta Waris masih a.n M maka harta yang

dimiliki masih dianggap harta gono-gini (harta bersama/harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung) antara M dan S, sehingga para saudara M dan S berhak untuk menjadi Ahli Waris.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsultan:



Negoisasi klien hukum waris antara R dan B

Malang, 14 April 2015

Diawali dengan salam dan do'a

Y : Membuka dan menjelaskan kasus posisi tentang waris, harta bergerak dan harta tidak bergerak namun yang kami terima adalah harta tidak bergerak yang berupa rumah di Malang, ruko di M dan rumah di S, mengenai pembagian waris, monggo kami berikan kesempatan untuk para pihak untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu dijelaskan dan perlu ada kejelasan.

Dilanjutkan dengan ibu Tinah (Ahli Waris dari Pak M : ucapan terimakasih, pesan-pesan dari saudara-saudara saya, kami menerima dengan senang hati karena 'Aisyiyah berdasarkan ajaran agama Islam.

Bapak Budi (Ahli Waris dari S) : terimakasih,,,,,, saya terimakasih banyak, saya sudah diberi kuasa oleh kakak saya yang ada di Jakarta, dan tadi baru disampaikan mengenai harta tidak bergerak saja, kemudian harta yang lain apakah ada mengenai deposito, tabungan, uang sewa ruko, tanah sawah yang menghasilkan, perhiasan.

Tanggapan dari bu Tinah: kakak saya yang menjaga mas fajar (anak Mas Yunus), tabungan digunakan untuk umroh, biaya makan, biaya hidup. Cerita kak ani : perhiasan milik bu sumiastuti : katanya sudah di jual oleh Ibu Sumiastuti.

B : Karena rasanya punya save deposite box, Mas y : uang kontrak di mana?

R : Uang kontrak digunakan untuk perawatan mas fajar, untuk tanah dan sawah dikelola oleh kakak saya.

B : Saya hanya ingin memperjelas saja, dan mengingatkan saja.

Y : Uang tabungan sudah habis, uang ruko juga sudah tidak ada karena sudah habis untuk biaya hidup, umroh.

B : Untuk yg ke eropa itu menjual perhiasan warisan dari orang tuanya.

B : Untuk yang hari ulang tahun (S) saya memberikan cincin bermata permata dan kakak mariati memberikan hadiah ulang tahun berupa gelang emas.

Sebelum kak M meninggal save deposite box ada di Bank B dan Bank C (saran dari kaka ati ke kakak M sebelum meninggal).

Kesimpulan Y : mengenai harta bergerak (emas, perhiasan, tabungan, sewa ruko berapa per tahun? agar terbuka.

Mengenai harta yang tidak bergerak ini harus segera dibagi karena diperoleh berdasarkan harta gono-gini. karena harta gono-gini maka harta dibagi setengah setengah, setengah untuk isteri dan setengah untuk suami.

Ahli waris karena harus terpenuhi semua, kesepakatan para pihak. harta yang ada sekarang adalah harus segera dibagi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jika selain dengan penyelesaian hukum Islam, maka bisa menggunakan dengan hukum waris BW (perdata), dan hukum adat juga berlaku di Indonesia semuanya.

Ilustrasi mengenai kasus seperti ini maka di daerah rampal itu.

Tinah : merujuk kepada hukum Islam saja.

Kesepakatan sesuai dengan hasil maka setengah, setengah.

Cari team independent untuk menyelesaikan semuanya.

Budi : Lebih baik cari team independent

Y : 1. Teknis penjualan bagaimana ?

2. Team independent untuk mengurus semuanya. Kemudian Budi menanggapi : bahwa lebih baik ada team independent

Tinah : masih di komunikasikan dengan saudara-saudaranya mengenai kedua hal tersebut. hari jum'at insya allah ada kelanjutannya informasi

Y : Selanjutnya pembacaan surat perjanjian (lebih lanjut ada diperjanjian).

Notulen

TDC

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terjemahan dari *Ushul al-Fiqh* oleh Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta : Rajawali 1996)
- Alwi, Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).
- Abbas, Sjahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009).
- Amin Suma, Muhammad, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*.
- Al-Maraghi, Imam, *Tafsir al-Maraghi*, Cairo ; Maktabah al-Islamiyah, 1982.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta : Firdaus, 1990).
- Abu Bakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran F'iqh Madzhab* (Jakarta: INIS, 1988).
- Abdul karim, Khalil, *Sejarah Perkelainan, Permaknaan*, (Al-Judhu Al-Takhiyah li AsySyari'ah), diterjemahkan Kamran As'ad, Yoyakarta : Lkis, 2003.
- Budiono, Rahmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Chalil, Munawar, *Ulil Amri*, (Semarang : Ramadhani, 1984)
- Daniel S. Lev. *Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia*, Jakarta : Prisma, 1973.

- Daud Ali, Muhammad, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.
- Daradjad, Zakiyah dkk., *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, 1984).
- Djazuli, H.A, *Al Majalah Al Ahkam Al Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Press, 2002.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993).
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1991).
- Hardjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1968).
- Hasabullah, Ali, *Ushul At tasrii' il Islami*, (Mesir : Dar El Ma'arif, 1964).
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al Husaini, tth, *Kifayatul Ahyar*, Bandung : Syirkatul Ma'arif.
- Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).
- Koesnoe, H. Moh., *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum Bagian 1*, (Bandung, Mandar Maju, 1992).
- Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*, Tejemahan dari Tashiilul Faraaidh, oleh Abu Ihsan al-Atsai (Bogor : Pustaka Ibnukasir, 2008).
- Nasir, Mohammad, *Islam sebagai Dasar Negara* (Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah, Universitas Mohammad Nasir dan Media Dakwah, 2000).
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta : PT. Intermasa, 1986).
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

- Sabiq, Sayyaid, *Fiqul al-Sunnah*, (Kuwait : Darul Al-Bayun, 1987).
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia Bandung), cetakan ke 3.
- Siddik, Ahmad, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam*, (Jakarta : Wijaya, 1980).
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Soeroengsan, 1955).
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali 1993).
- Salman Soemadiningrat, Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2011).
- Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Sjadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Iqbal Abdurrauf Saimima Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988).
- Syarifuddin, Amir *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984)
- Syarizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kecanan Prenada Media Group, 2009).
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991)
- Suparman, *et.all, Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997).
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983).
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang : Darul Ulum Press. 1993).
- Yahya Harahab, Muhamamd, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat*.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

INDEKS

A

Ahli Waris · 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 94, 96, 97, 99, 100, 101,
103, 107, 108, 110, 114, 115,
121, 123, 127, 128, 129, 130,
131, 133, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 141, 143, 144, 147,
150, 153, 156, 158, 159, 162,
163, 165
Ahlu'sunnah · 107
Ashabah · 49, 50, 54, 55, 57, 58, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 75, 77, 82, 83, 84
Ashabah Bil Ghair · 64, 65, 66
Ashabah Bin Nafsh · 62
Ashabah Ma'al Ghair · 66, 67

Aul · 16, 80, 81, 82, 141

D

Dzawil Arham · 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76
Dzawil Furudh · 53, 54, 59, 80, 82

F

Faraidh · 8, 71, 81, 85, 100
Fikih · 17, 19, 87, 104
Fuqaha · 42, 43, 46, 72, 102, 106
Fuqaha · 36, 42, 83

H

Haqiqi · 36, 39, 40
Harta Waris · 10, 24, 35, 38, 59, 146,
152, 156, 157, 163
Hibah · 16, 17, 21, 88, 94, 96, 97,
106, 156
Hukmy · 36, 37, 39, 40

I

Ijtihad · 106

Inkracht · 34

K

KHI · 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 88, 91, 92, 96, 103,
104

Khilafiah · 19

KUH Perdata · 23, 24, 29, 93, 94,
103

L

Litigasi · 1, 12, 15

M

Mafqud · 37

Mahjub · 41, 47, 48, 49, 50

Mazhab · 19, 87, 89

Mediasi · 1, 12, 15

Mediator · 13

Mewaris · 8, 9, 13, 16, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 67,
81, 92, 93, 99, 102

N

Nasab · 31, 32, 34, 35, 36, 61, 74

Non Litigasi · 15

P

Pengadilan Agama · 1, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 92

Pewaris · 3, 8, 9, 11, 16, 23, 24, 25,
26, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 43,
44, 45, 46, 61, 62, 63, 66, 70,
71, 73, 74, 76, 77, 88, 92, 99,
100, 101, 106, 107, 108, 115,
124, 147, 158

Pewasiat · 89, 90, 91, 94, 95, 102,
103, 104, 105, 109

R

Raad · 16

Rubu · 56

S

Sirkah · 13

T

Taqdiri · 40

Tirkah · 8, 11, 35, 36

W

Wajibah · 16, 92, 106, 107

Wasiat · 2, 4, 16, 21, 26, 29, 30, 36,
55, 57, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 125

Y

Yurisprudensi · 18, 19, 21

BIOGRAFI PENULIS



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum, Lahir di Madiun, 26 Maret 1983, dengan pendidikan SDN Teguhan II, Jiwan Madiun, SLTPN 1 Jiwan Madiun, SMUN 5 Madiun, Fakultas Hukum UMM, Fakultas Agama Islam UMM, Pendidikan Khusus Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Hukum Pasca Sarjana UMM. Sejak Tahun 2009 Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum UMM, Penulis juga merupakan Advokat sejak Tahun 2015 dan sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang sejak Tahun 2011 sampai sekarang.

Disela-sela kesibukan mengajar, Penulis juga memiliki pandangan dan pemikiran kritis tentang hukum yang dituangkan di dalam karya ilmiah, di antaranya:

1. Judul : DAMPAK SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ISLAM, Jurnal Ulumuddin FAI UMM, tahun 2008;

2. Judul : MENATA KEMBALI CHECKS AND BALANCES SISTEM LEMBAGA NEGARA INDONESIA, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume IV No. 2, November 2011;
3. Judul : Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011 Quo Vadis Pendidikan Indonesia di Koran kampus UMM, Bestari;
4. Judul : RESTRUKTURISASI PROBLEM LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume I No. 1, November 2012;
5. Judul : PERAN DAN TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI MENINJAU ULANG PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013;
6. Judul: Efektifitas Konsep Diversi Dalam proses Peradilan Anak pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang, Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2016;
7. Judul: "Upaya Hukum Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG)", Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018;

Selain menghasilkan karya ilmiah, Penulis juga melakukan Pengabdian kepada masyarakat, diantaranya ialah sebagai berikut;

1. Penyuluhan Hukum Melalui Obrolan Seputar Hukum Sebagai Pemateri dengan Tema : "Relevansi Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", di Radio Tidar Sakti Malang, 31 Maret 2011;
2. Konsultan Hukum bagi masyarakat Malang dan Pendampingan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DI Pengadilan Agama Kepanjen, Malang, 07 Juli 2011

3. Penyuluhan Hukum Melalui Obrolan Seputar Hukum Sebagai Pemateri dengan Tema : “Kasus Kekerasan di Mesuji dan Bima ditinjau dari Perspektif HAM”, di Radio Tidar Sakti Malang, 2 Januari 2012;
4. Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan judul “Hak Asasi Perempuan”, 02 Maret 2012;
5. Pengabdian Dana Block Grant Fakultas dengan judul “PENDAMPINGAN TERHADAP PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BEKERJASAMA DENGAN NASYIATUL ‘AISYIYAH KOTA MALANG”, Berdasarkan Surat Tugas Nomor: E.2.e/021/FH-UMM/I/2013;
6. Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan judul “Narkoba”, 05 September 2013;
7. Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan judul “Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam di LP Wanita”, 6 Desember 2013;
8. Pemateri, dengan judul “Sosialisasi dan Testimoni LKBH PDA Kota Malang” di acara RAKERPIM PWA Jawa Timur di RUSUNAWA UMM, 05 Januari 2014;
9. Peserta, Dalam Acara Diskusi Publik dan Workshop : Rangkaian Advokasi Undang-Undang Pengadilan Keluarga “Pentingnya Pengadilan Keluarga yang Terintegrasi” oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan LBH APIK, Tempat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 17 Januari 2014;
10. Ketua, Pendampingan Terhadap Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Bekerjasama dengan Nasyyiatul ‘Aisyiyah Kota Malang, dana Blog grant FH UMM, 2013;
11. Anggota, Pendampingan Klien Dalam Konsultasi Hukum Waris Islam, Pengabdian Masyarakat Internal, 2014.
12. Ketua, Pendampingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkolosis, Tahun 2015.
13. Ketua, Pendampingan kepada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang Tentang Pengurusan Tanah Wakaf Muhammadiyah Kota Malang Tahun 2016.

14. Ketua, Pendampingan kepada Ikatan Guru 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Malang Tentang Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2018.

Penulis juga turut andil sebagai Pemateri dalam seminar maupun pelatihan hukum, diantaranya sebagai berikut;

1. Pemateri, dalam Acara Kuliah Nikah Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, dengan tema: Hukum Acara Peradilan Agama, 2015;
2. Pemateri. dalam acara Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakat wanita Klas IIA Malang, dengan tema: Hukum Waris Adat di Indonesia, 2015;
3. Pemateri pada acara dialog tentang hukum di ATV, dengan tema: "Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Perdata", 2016;
4. Pemateri pada acara warung hukum di Radio Tidar Sakti, dengan tema: Ketentuan dalam Hukum Waris Perdata mengenai Bagian suami/istri kedua, 2016;
5. Pemateri pada acara Pelatihan Paralegal oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, dengan tema: Pendokumentasian kasus hukum, teknik pengumpulan data dan teknik wawancara klien, 2016;
6. Pemateri pada acara Multidisipliner oleh Lembaga Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Malang, dengan tema: TRADISI DAN HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH, 2016;
7. Pemateri pada acara Pelatihan Paralegal oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur, dengan tema: Proses pendirian LKBH, dan teknik wawancara klien, 2016;
8. Pemateri pada acara dialog hukum keluarga sakinah di RRI Malang, dengan tema: Alimentasi (kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak), 2016;
9. Pemateri pada Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakat Wanita Klas IIA Malang, dengan tema: Pentingnya pendaftaran HAKI merek, 2017;
10. Pemateri pada acara warung hukum di Radio Tidar Sakti, dengan tema: Perwakafan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, 2017;
11. Pemateri pada acara Sekolah Immawati, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan tema: Peran Perempuan dalam Organisasi Muhammadiyah, 2017;

12. Pemateri pada acara dialog Keluarga Sakinah di Radio Republik Indonesia (RRI) Malang, dengan tema: PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM JIKA PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN, 2017;
13. Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemberdayaan Perlindungan perempuan dan Anak (LP3A) FARHANA, dengan tema: Hukum Waris Islam, 2017;
14. Pemateri, pada acara Pelatihan Paralegal kerjasama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur dengan Universitas Muhammadiyah Malang, materi: hukum acara Peradilan Agama, TUN dan Hukum Acara Perdata, 2017;
15. Pemateri, pada acara Diskusi Panel oleh Majelis hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Batu, dengan tema: Menanamkan Edukasi dalam Penanganan Korban KDRT Berdasarkan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, 2017;
16. Pemateri pada acara Pelatihan Paralegal di Wilayah Kerja Jember Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur, dengan Tema: Keparalegalan, 2018.
17. Pemateri pada acara Pertemuan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Kelembagaan Perempuan di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Dinas P2TP2A & KB Kota Malang, dengan tema: Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Teori dan Praktik, Tahun 2018.
18. Pemateri pada acara Dialog Hukum di ATV Kota Batu Tentang Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2018.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

HUKUM WARIS DALAM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	0%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	www.khafidzt.ga Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%